

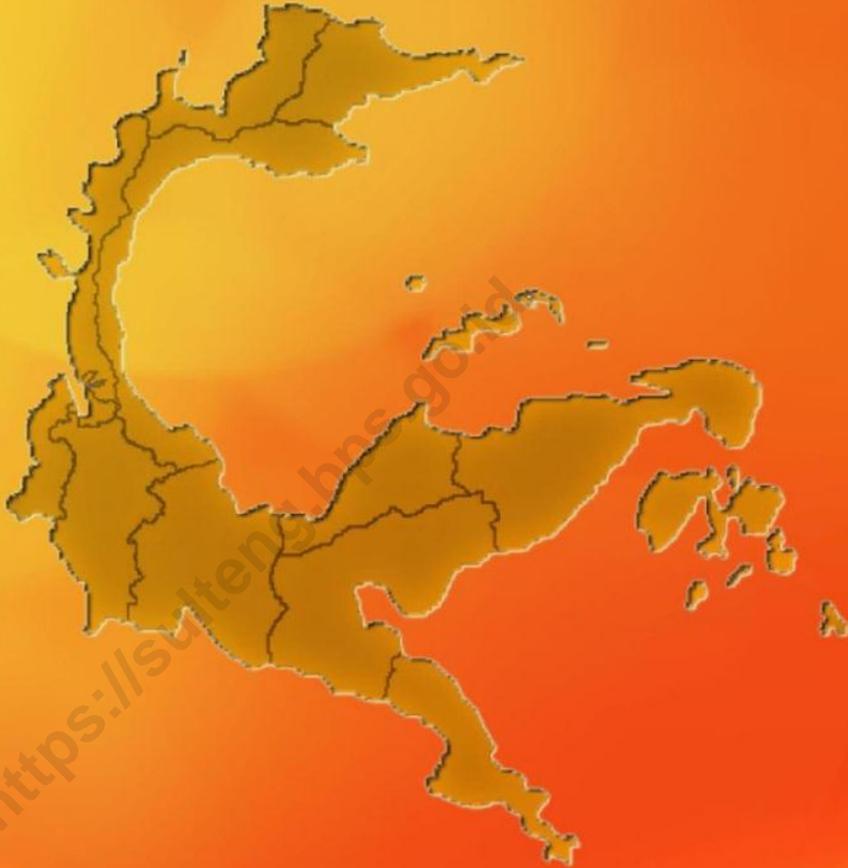
Katalog: 9102059.72



SENSUS EKONOMI 2016
ANALISIS HASIL LISTING

POTENSI EKONOMI SULAWESI TENGAH

ANALISIS KARAKTERISTIK USAHA DAN KETENAGAKERJAAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SENSUS EKONOMI 2016
ANALISIS HASIL LISTING

POTENSI EKONOMI SULAWESI TENGAH

ANALISIS KARAKTERISTIK USAHA DAN KETENAGAKERJAAN



Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Sulawesi Tengah Analisis Karakteristik Usaha dan Ketenagakerjaan

ISBN : 978-602-1385-68-5
No Publikasi : 72550.1713
Katalog : 9102059.72
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xviii + 159 Halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak oleh:
UD RIO

***Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik***

TIM PENYUSUN

Pengarah

Ir. Faizal Anwar, MT

Penanggung Jawab

Sukadana Sufii, SSi, ME

Editor

Irwan Kurniawan, SST

Penulis

Hafidlotul Daroini, SST

Panular Dinu Satomo, SST, MSi.

Desain Cover

Irwan Kurniawan, SST

Desain dan Tata Letak Layout

Hafidlotul Daroini, SST

Panular Dinu Satomo, SST, MSi.

Kata Pengantar

Sesuai amanat undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhir angka enam. Sensus Ekonomi tahun 2016 merupakan sensus ekonomi yang keempat yang telah dilaksanakan oleh BPS. Kegiatan Sensus Ekonomi 2016 dilaksanakan secara bertahap dimulai dari kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan kegiatan penyajian.

Penyusunan publikasi ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Sensus Ekonomi 2016. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal tentang karakteristik usaha dan ketenagakerjaan dari usaha-usaha yang dicakup dalam Sensus Ekonomi 2016. Publikasi ini menyajikan informasi tentang persebaran usaha, persebaran tenaga kerja, karakteristik usaha serta produktivitas dimasing-masing lapangan usaha. Dengan tersajinya informasi awal karakteristik usaha dan ketenagakerjaan menurut lapangan usaha dan wilayah diharapkan bisa memberikan gambaran tentang potensi ekonomi dan lapangan usaha yang menjadi penggerak perekonomian di Sulawesi Tengah.

Publikasi ini diharapkan dapat menyuguhkan sesuatu yang berguna dalam rangka pengambilan kebijakan tentang perekonomian Sulawesi Tengah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2016 hingga tersusunnya publikasi ini. Semoga publikasi ini memberikan manfaat kepada segenap penggunanya.

Palu, Desember 2017
KEPALA BPS PROVINSI SULAWESI TENGAH



Ir. FAIZAL ANWAR, MT

Kategori B: Pertambangan dan Penggalian

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau di bawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat.

Kategori C: Industri Pengolahan

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin, atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Kategori D: Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas, dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya.

Daftar Istilah

Kategori E: Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.

Kategori F: Konstruksi

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan tempat tinggal, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Kegiatan konstruksi khusus, seperti penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung dan lain-lain. Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan atas nama sendiri atau atas dasar balas jasa/kontrak. Sebagian pekerjaan dan dimungkinkan keseluruhan pekerjaan konstruksi dapat disubkontrakan. Unit yang melakukan subkontrak kegiatan konstruksi diklasifikasikan di sini. Kategori ini mencakup juga kegiatan perbaikan bangunan gedung dan bangunan sipil.

Kategori G: Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran,

pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan.

Kategori H: Pengangkutan dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan, atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.

Kategori I: Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Kategori J: Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Termasuk penerbitan yang mencakup perolehan hak cipta untuk isinya (produk informasi) dan membuat isinya tersedia ke masyarakat umum dengan cara atau melalui reproduksi dan distribusi dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang layak dari penerbitan (dalam bentuk cetakan, elektronik atau audio pada internet seperti

Daftar Istilah

produk multimedia seperti buku referensi CD-ROM dan lain-lain) dicakup dalam kategori ini.

Kategori K: Aktivitas Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Kategori L: Real Estat

Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Kategori M: Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis

Kategori ini mencakup kegiatan profesional, Ilmu pengetahuan, dan teknik, yang membutuhkan keahlian khusus atau menghasilkan ilmu pengetahuan.

Kategori N: Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

Kategori ini mencakup kegiatan pendukung operasional bisnis secara umum, yang berbeda dari kegiatan di kategori M.

Kategori P: Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus

termasuk siswa cacat baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.

Kategori Q: Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

Kategori R: Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Kategori ini mencakup segala bentuk kegiatan kesenian dan kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum. Pertunjukan langsung, pengoperasian museum, perpustakaan, dan olahraga termasuk didalamnya.

Kategori S: Aktivitas Jasa Lainnya

Kategori ini mencakup berbagai kegiatan terkait jasa yang tidak dicakup oleh kategori lainnya.

Kategori U: Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori ini mencakup berbagai kegiatan Badan Internasional, seperti perwakilan PBB, WHO, OPEC, dan Kedutaan Besar negara lain, tercakup pada kategori ini.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Istilah	vii
Daftar Isi	xiii
Ringkasan Eksekutif	xv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Tinjauan Permasalahan	3
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis	9
C. Metodologi	11
D. Sistematika Penulisan	12
Bab 2. Perkembangan serta Persebaran Usaha dan Tenaga Kerja	15
A. Perkembangan Usaha dan Tenaga Kerja	17
B. Persebaran Usaha	24
C. Persebaran Tenaga Kerja	49
Bab 3. Potensi Usaha	65
A. Penggerak Utama Perekonomian Sulawesi Tengah	67
B. Penyerapan Tenaga Kerja	71
C. Potensi Ekonomi Sulawesi Tengah	75
Bab 4. Karakteristik Usaha	81
A. Potensi Usaha Mikro Kecil dalam Perekonomian	83
B. Skala Omset	87
C. Pemanfaatan Internet Masih Minim	90
D. Status Badan Usaha	95
E. Jaringan Usaha	98
Bab 5. Produktivitas Tenaga Kerja	103
A. Ketersediaan Sumber Daya Manusia	105
B. UMK sebagai Penyerap Tenaga Kerja Utama	107
C. Produktivitas Tenaga Kerja	112
Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi	115
A. Kesimpulan	117
B. Rekomendasi	119
Lampiran	123

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan sektor usaha non pertanian di Sulawesi Tengah selama periode 2006-2016 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan persentase kenaikan jumlah usaha yang cukup tinggi. Hasil Sensus Ekonomi 2016 di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan jumlah usaha yang cukup signifikan dari tahun 2006 ke tahun 2016. Jumlah usaha/perusahaan mengalami peningkatan sebesar 77,5 persen, yaitu mencapai 343.705 usaha pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2006 tercatat 193.626 usaha.

Walaupun pertumbuhan jumlah usaha sektor non pertanian sedemikian tinggi, akan tetapi sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama dalam PDRB Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usaha tersebut didominasi oleh pertumbuhan jumlah usaha mikro kecil yang secara omset masih relatif kecil sehingga memberikan andil yang kecil pula terhadap PDRB. Berdasarkan skala usaha, jumlah usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah sangat didominasi oleh usaha skala mikro. Dari 343.705 usaha/perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah pada tahun 2016, sebanyak 90,80 persen merupakan usaha berskala mikro dan 8,29 persen berskala kecil, sedangkan sisanya 0,91 persen berskala menengah dan besar. Hal tersebut mengindikasikan sebanyak 99,09 persen usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK). Potensi UMK yang sangat besar ini sewajarnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung perekonomian di Sulawesi Tengah karena UMK terbukti mampu bertahan terhadap guncangan krisis.

Dari 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, sebesar 53,47 persen jumlah usaha nonpertanian berada di Parigi Moutong, Palu, Banggai dan Donggala. Persebaran usaha yang paling banyak berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 59.456 unit usaha atau sekitar 17,30 persen dari jumlah usaha di Sulawesi Tengah. Jumlah usaha terbanyak kedua ada di Kota Palu, yaitu sebesar 46.164 atau sebesar 13,43 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai dan Kabupaten Donggala, dengan jumlah usaha sebesar 11,95 persen dan 10,80 persen dari jumlah usaha di Sulawesi Tengah.

Dari sisi ketenagakerjaan perkembangan jumlah usaha di sektor non pertanian juga mengalami peningkatan. Jumlah usaha di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 yang sebesar 343.705 unit menyerap tenaga kerja sebesar 789.855

jiwa dan menyebar di 13 kabupaten/kota. Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan terjadinya peningkatan tenaga kerja yang signifikan. Jumlah tenaga kerja meningkat sekitar 108 persen, dari 380.248 orang pada tahun 2006 menjadi 789.855 orang pada tahun 2016. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sekitar 7,6 persen per tahun. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah usaha, hal tersebut dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dalam kurun 10 tahun antara tahun 2006 dan 2016, komposisi 3 usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak hampir tidak mengalami perubahan.

Sejalan dengan distribusi jumlah usaha maka jumlah tenaga kerja terbanyak hasil SE2016 berada di Parigi Moutong, Palu, Banggai dan Donggala dengan persentase total 53,48 persen dari jumlah tenaga kerja non pertanian seluruh Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja yang paling banyak berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 132.962 orang atau sebesar 16,84 persen dari jumlah tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja terbanyak kedua ada di Kota Palu, yaitu sebesar 132.377 orang atau sebesar 16,77 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai dan Kabupaten Donggala, dengan jumlah tenaga kerja 12,08 persen dan 9,30 persen dari jumlah tenaga kerja di Sulawesi Tengah

Jika dicermati jumlah penyerapan tenaga kerja menurut sektor, penyerapan tertinggi masih berada pada 3 sektor yang sama. Pada tahun 2006 lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa pendidikan. Ketiga lapangan usaha tersebut menyerap sekitar 68 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Kondisi pada tahun 2016 komposisi 3 usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, usaha industri pengolahan, dan usaha pendidikan. Ketiga lapangan usaha tersebut menyerap sekitar 69 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah.

Bila diperhatikan persebaran menurut kategori lapangan usaha, maka jenis usaha yang paling diminati masyarakat Sulawesi Tengah pada tahun 2016 adalah usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Kategori G), yaitu sekitar 42 persen dari total usaha. Usaha selanjutnya yang banyak diminati adalah usaha industri pengolahan (Kategori C), yaitu sekitar 27 persen dari total usaha di Sulawesi Tengah. Usaha ketiga yang cukup banyak diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah adalah usaha

penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, yaitu sekitar 13 persen dari total usaha.

Hasil Sensus Ekonomi 2016 mampu menakar potensi ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan tenaga kerja di luar sektor pertanian. Pengukuran potensi ekonomi yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan pendekatan *Economic Base Approach*. Teori ini didasarkan pada perkembangan peran sektor ekonomi, baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah dapat menggunakan metode *Location Quotient (LQ)* dan Tipologi Klassen. Berdasarkan pemetaan dari analisis Location Quotient dan Tipologi Klassen maka dapat disimpulkan sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota. Kota Palu sebagai ibukota provinsi mempunyai 6 sektor unggulan yaitu Pengangkutan dan Pergudangan, Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate dan Jasa Perusahaan. Sedangkan kabupaten yang tidak mempunyai satupun sektor unggulan komparatif yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong.

Potensi kekuatan ekonomi suatu wilayah tidak hanya tergantung dari Sumber Daya Alam (SDA), namun juga dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi. Data tenaga kerja berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 yang dibandingkan dengan output melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Lapangan usaha yang mempunyai produktivitas tertinggi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dengan produktivitas mencapai satu miliar per orang per tahun. Sebaliknya, lapangan usaha dengan produktivitas terendah yaitu penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp9,21 juta per orang per tahun. Output lapangan usaha ini menyumbang 0,82 persen dari total PDRB Sulawesi Tengah 2016 (di luar kategori A dan O).

Informasi pendukung untuk memperkuat pemahaman tentang potensi yang dapat dikembangkan bisa didekati dengan karakteristik usaha dalam masing-masing lapangan usaha. Dalam Sensus Ekonomi 2016 berbagai karakteristik usaha yang dikumpulkan meliputi pemanfaatan teknologi, sistim waralaba, skala usaha, jaringan usaha dan skala omset usaha.

Dilihat dari skala omset usaha sebanyak 92,80 persen usaha mempunyai omset kurang dari 300 juta rupiah. Usaha/perusahaan dengan omset kurang dari sama dengan Rp300 juta per tahun paling banyak berada di Kabupaten Parigi

Moutong karena banyaknya UMK di kabupaten tersebut, sedangkan usaha/perusahaan dengan omset di atas Rp50 milyar paling banyak berada di Kota Palu sebagai pusat perekonomian Sulawesi Tengah.

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi cara belanja masyarakat dari cara tradisional ke cara modern dengan memanfaatkan internet untuk bertransaksi terutama di daerah perkotaan. Keterjangkauan teknologi di Sulawesi Tengah masih tergolong rendah. Dari angka Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) tahun 2015 Sulawesi Tengah masih menempati peringkat 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan persentase usaha/perusahaan pengguna internet berada di Kota Palu sebesar 7,24 persen dari seluruh usaha/perusahaan di Kota Palu telah menggunakan internet. Sebaliknya, kabupaten dengan persentase usaha/perusahaan pengguna internet paling rendah yaitu Banggai Kepulauan, hanya 0,50 persen dari jumlah usaha/perusahaan yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan status badan usaha, jumlah usaha yang memiliki badan usaha dapat dikatakan sangat minim. Kepemilikan badan usaha dapat mempermudah usaha untuk memperoleh bantuan modal dari lembaga keuangan dan juga sebagai sarana perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dari hasil Sensus Ekonomi 2016 diketahui bahwa usaha/perusahaan yang memiliki badan usaha hanya sekitar 26 ribu dari 343 ribu usaha/perusahaan yang ada, atau hanya sekitar 7,82 persen, sedangkan 92,18 persen sisanya merupakan usaha/perusahaan tidak berbadan usaha.

Semakin besar dan berkembangnya suatu usaha maka jaringan usaha tersebut akan semakin luas. Karakteristik tentang jaringan usaha dapat menggambarkan potensi peluang untuk meningkatkan produksi dan mengukur kemampuan usaha yang ada di daerah tersebut untuk melakukan ekspansi bisnis. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha di Sulawesi Tengah yang merupakan usaha tunggal sebanyak 338.543 usaha/perusahaan dan 5.162 usaha/perusahaan atau sekitar 1,50 persen bukan merupakan usaha tunggal. Usaha non tunggal ini terdiri dari kantor pusat 67 unit, cabang 2.148 unit, perwakilan 210 unit, pabrik 17 unit, dan unit pembantu/penunjang 2.720 unit.



Pendahuluan

Pendahuluan

A. Tinjauan Permasalahan

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan – kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisiensi. Dalam penentuan kebijakan, haruslah memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah, dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah/regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan.

Potensi kekuatan ekonomi suatu wilayah tidak hanya tergantung dari Sumber Daya Alam (SDA), namun juga dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi. Dalam teori ekonomi, Robert Solow dan Trevor Swan mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan kualitas maupun kuantitas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal dan teknologi. Tenaga kerja berperan sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian. Oleh sebab itu, jumlah SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Potensi kekuatan ekonomi suatu wilayah tidak hanya tergantung dari Sumber Daya Alam (SDA), namun juga dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi.

Persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu isu strategis yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan dan kinerja dari pemerintah yang sedang berkuasa. Isu ketenagakerjaan selalu dikaitkan dengan isu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah. Menurut Soeparmoko (2002) Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya- sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

Pembangunan ekonomi dapat diartikan secara luas mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar pijakan dalam menentukan strategi kebijakan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan saat yang krusial bagi Indonesia untuk merencanakan kegiatan ekonomi yang lebih kompetitif agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Bahkan, desain besar pembangunan ekonomi itu amat diperlukan untuk melengkapi perencanaan tenaga kerja, terutama untuk mengantisipasi meningkatnya pertambahan usia produktif di era bonus demografi, yang puncaknya terjadi pada 2028-2030. Jika peningkatan penduduk usia produktif itu tak diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja pada dekade mendatang, itu akan menyebabkan bencana bagi negeri ini.

Selain hal tersebut diatas ketersediaan tenaga juga kerja sangat di butuhkan dalam menopang pembangunan, dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai maka rencana pembangunan lebih cepat terlaksana dengan cepat. Tenaga kerja merupakan sumberdaya yang penting dalam proses pembangunan , karena dengan faktor produksi tenaga kerja yang melimpah maka kegiatan ekonomi akan lebih cepat berkembang dan mampu bersaing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Demikian juga sebaliknya tanpa adanya tenaga kerja yang memadai maka aktifitas ekonomi akan terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi juga melambat.

Manurung (2001) menyatakan bahwa pada negara berkembang, Tenaga kerja (KL) masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang menjadi persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja yang akan meningkatkan output. Hal ini tergantung dari seberapa cepat terjadinya The

Law Diminishing Return (TDLR), sedangkan cepat lambatnya proses TDLR sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan keterkaitan dengan kemajuan teknologi (T) produksi. Selama sinergi antara TK dan teknologi maka penambahan TK akan memacu pertumbuhan ekonomi, dengan demikian dapat dikatakan pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi disisi lain juga akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya besarnya jumlah angkatan yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin banyak lapangan kerja akan meningkatkan total produksi di suatu wilayah. Yang merupakan jembatan utama yang mengaitkan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Mencermati perekonomian pada tahun 2015, Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi yaitu sebesar 15,52 persen. Walaupun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mengalami perlambatan yaitu menjadi 9,98 persen tetapi pertumbuhan Sulawesi Tengah masih tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mulai mendorong struktur ekonomi Sulawesi Tengah mengalami transformasi. Hal ini bisa dilihat dari laju pertumbuhan menurut lapangan usaha dimana laju pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan (35,12%), pertambangan dan penggalian (35,08%) dan jasa keuangan (17,66%). Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan laju pertumbuhannya hanya 2,40 persen.

Permasalahan dasar dari ketenagakerjaan adalah penambahan jumlah penduduk usia kerja yang terus bertambah. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah pada Agustus 2014 mencapai 1,34 juta, Agustus 2015 1,38 juta dan Agustus 2016 mencapai 1,51 juta jumlah tersebut hampir 52 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang terjadi di Sulawesi Tengah jika tidak diimbangi oleh lapangan kerja yang tersedia akan membawa dampak negatif pada pembangunan dan kerawanan sosial masyarakat.

Tingkat partisipasi kerja (TPAK) dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk pada usia kerja (penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun keatas yang berpotensi

memproduksi barang dan jasa. Salah satu indikator yang bisa mengukur besarnya penyerapan tenaga kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dengan nilai maksimum 100, semakin tinggi nilai TPAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam perekonomian. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran disini merupakan angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Pengangguran merupakan salah satu masalah (beban pemerintah) disatu sisi jumlah penduduk dari tahun ketahun terus bertambah, disisi lain peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk.

Berdasarkan data Sakernas keadaan ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah pada setahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan ke arah positif yang digambarkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja serta tingkat pengangguran yang menurun. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 bertambah sebanyak 14.748 orang dibanding keadaan Februari 2016 dan bertambah sebanyak 125.270 orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2015. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 bertambah sebanyak 16.743 orang dibanding keadaan Februari 2016, dan bertambah sebanyak 132.385 orang jika dibanding keadaan setahun yang lalu (Agustus 2015). Sementara jumlah penganggur pada Agustus 2016 mengalami penurunan yaitu sebanyak 1.995 orang jika dibanding keadaan Februari 2016, dan berkurang sebanyak 7.115 orang jika dibanding keadaan Agustus 2015. Dalam setahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 4,77 persen poin. Jumlah pengangguran pada Agustus 2016 mencapai 49.702 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,29 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TPT Februari 2016 (3,46 persen) maupun jika dibandingkan TPT Agustus 2015 (4,10 persen).

Selain permasalahan penambahan jumlah penduduk usia kerja permasalahan tingkat pendidikan tenaga kerja dan persebaran tenaga kerja juga menjadi masalah tersendiri dalam ketenagakerjaan. Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas tenaga kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas

tenaga kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Pengertian ini diyakini oleh suatu teori yang menamakan dirinya Teori Human Capital. Teori Human Capital menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Teori ini meyakini bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang karenanya. Teori Human Capital ini menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2016 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 652.876 orang (44,72 persen) dan Sekolah Menengah Pertama di peringkat ke dua sebanyak 270.624 (18,54 persen), Sekolah Menengah Atas di urutan ke tiga, sebanyak 259.311 orang (17,76 persen), dan Universitas sebanyak 132.424 orang (9,07 persen), Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 98.655 (6,76 persen) dan yang terakhir pekerja berpendidikan Diploma sebanyak 45.913 orang (3,15 persen).

Jika dilihat pada periode tahun 2013 sampai tahun 2016 struktur ketenagakerjaan mulai mengalami pergeseran. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2013 masih terdapat sekitar 579 ribu tenaga kerja yang bertahan di sektor pertanian. Jumlah tersebut setara dengan 49,25 persen penduduk Sulawesi Tengah yang bekerja pada tahun 2013. Data Sakernas Agustus 2016 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian turun menjadi 45,89 persen. Selama setahun terakhir (Agustus 2015 – Agustus 2016), tiga lapangan usaha mengalami penurunan kontribusi jumlah pekerja yang cukup signifikan yaitu Sektor Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 4,14 persen poin. Berkebalikan dengan sektor pertanian maka sektor non pertanian terutama sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan angkutan peningkatannya jauh lebih tinggi lagi yaitu sebesar 19,91 persen dari 385,9 ribu (Agustus 2015) menjadi 462,8 ribu (Agustus 2016).

Memperhatikan terjadinya peningkatan partisipasi angkatan kerja dan pergeseran ketenagakerjaan, maka perlu diketahui bagaimana kondisi ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini, baik yang mencakup jumlah persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja,

kesempatan kerja yang ada dan karakteristik-karakteristik usaha yang menyerap tenaga kerja dimasing-masing lapangan usaha. Diharapkan dengan teridentifikasinya kondisi ketenagakerjaan dan karakteristik usaha dapat diketahui potensi-potensi ekonomi sehingga mempermudah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menentukan perencanaan dalam mempercepat pembangunan dengan basis pada penciptaan lapangan pekerjaan dan merencanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Survei Angkatan Kerja Nasional merupakan survei yang khusus ditujukan untuk memotret ketenagakerjaan di Indonesia, akan tetapi ada beberapa karakteristik ketenagakerjaan yang tidak dicakup dalam survei tersebut bila dikaitkan dengan karakteristik usaha. Sensus Ekonomi 2016 yang telah dilaksanakan diharapkan bisa memberikan gambaran tentang permasalahan ketenagakerjaan dan karakteristik usaha di Sulawesi Tengah dengan lebih mendalam.

Secara umum Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan memiliki beberapa tujuan:

Pertama, memperoleh data dasar dari unit usaha/perusahaan yang bergerak di berbagai aktivitas usaha selain usaha pertanian, mencakup jumlah dan struktur usaha menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha.

Kedua, nilai dan struktur produksi/omset penjualan/pendapatan unit usaha/ perusahaan menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha.

Ketiga, jumlah dan struktur tenaga kerja menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha.

Keempat, berbagai karakteristik lainnya seperti jaringan usaha, penggunaan internet dalam kegiatan usaha (on-line), sistem waralaba (franchise), kepemilikan usaha (ownership) serta kendala dan prospek usaha unit usaha/perusahaan.

Jika dikaitkan dengan ketenagakerjaan dan karakteristik usaha, tujuan ketiga dan keempat dari sensus ekonomi sangat relevan sehingga dengan data SE 2016 diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja hingga level kabupaten/kota, perencanaan tenaga kerja untuk pengembangan angkatan kerja dan program pelatihan ketrampilan yang

relevan dengan karakteristik usaha, mengetahui keunggulan kompetitif usaha, hingga mengidentifikasi usaha unggulan menurut sektor ekonomi di masing-masing daerah.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Analisis

Tujuan penulisan Analisis hasil listing SE2016 untuk memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan dan karakteristik usaha di Provinsi Sulawesi Tengah untuk seluruh lapangan usaha non pertanian yang dicakup dalam Sensus Ekonomi 2016. Secara spesifik penyusunan analisis hasil pencacahan lengkap SE2016 bertujuan :

- a. Memberikan gambaran tentang persebaran lapangan usaha dan tenaga kerja,
- b. Memberikan gambaran tentang peranan usaha dalam perekonomian, penyerapan tenaga kerja dan persebaran usaha,
- c. Memberikan informasi tentang karakteristik usaha dalam hal pemanfaatan teknologi, sistim waralaba, skala usaha, jaringan usaha dan skala omset usaha,
- d. Mengukur produktivitas tenaga kerja menurut lapangan usaha,
- e. Menganalisis potensi usaha dalam peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ruang lingkup penulisan analisis hasil SE2016 mencakup semua lapangan usaha non pertanian yang dicakup dalam SE2016 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Lapangan usaha yang dicakup adalah :

1. Pertambangan dan Penggalian (Kategori B)
2. Industri Pengolahan (Kategori C)
3. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin (Kategori D)
4. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi (Kategori E)
5. Konstruksi (Kategori F)
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G)
7. Pengangkutan dan Pergudangan (Kategori H)
8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I)
9. Informasi dan Komunikasi (Kategori J)
10. Aktivitas Keuangan dan Asuransi (Kategori K)

11. Real Estate (Kategori L)
12. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (Kategori M)
13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N)
14. Pendidikan (Kategori P)
15. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Kategori Q); **kecuali** kegiatan sosial dalam panti (golongan 87) dan kegiatan sosial diluar panti (golongan 88)
16. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi (Kategori R); **kecuali** Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan (golongan 92)
17. Aktivitas Jasa Lainnya (Kategori S); **kecuali** layanan kencana (kelompok 96999), organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik dalam golongan 9412, 942 dan 949
18. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya (Kategori U), **kecuali** konsulat dan kedutaan besar.

Pengelompokan kriteria UMK dan UMB dalam penulisan ini menggunakan kriteria dari BPS dengan penjelasan lengkap untuk masing-masing kategori kami sajikan dalam bentuk tabel pada lampiran.

C. Metodologi

Penulisan analisis hasil listing SE2016 merupakan penulisan dengan kombinasi antara analisis deskriptif terhadap tabel-tabel yang telah diolah dari raw data hasil SE2016 dan alat analisis lain seperti analisis Tipologi Klassen dan Location Quotient (LQ).

C.1 Analisis Deskriptif

Penulisan menggunakan analisis deskriptif diharapkan dapat memberikan penjelasan secara lengkap dan menyeluruh tentang ketenagakerjaan dan karakteristik usaha, yang didukung dengan tabel-tabel, grafik-grafik dan peta yang diolah dari hasil listing SE2016. Untuk mempertajam analisis selain menggunakan hasil listing SE2016 digunakan juga sumber data lain seperti data Sakernas dan data PDRB.

C.2 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor disuatu wilayah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih luas dan membandingkan pangsa sektor tersebut dengan nilai rata-ratanya ditingkat yang lebih luas. Hasil analisis tipologi kelas akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor tersebut dalam membentuk perekonomian disuatu wilayah.

Untuk melihat potensi ekonomi disuatu wilayah digunakan pendekatan pertumbuhan sektoral dan kontribusinya terhadap perekonomian suatu wilayah. Untuk pengukuran sektor potensial pada analisis ini menggunakan data PDRB harga konstan untuk pertumbuhan dan PDRB harga berlaku untuk kontribusi. Melalui metode ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan dari sektor ekonomi yang berbeda, yaitu: sektor unggulan dan tumbuh pesat, sektor unggulan tapi pertumbuhannya tertekan, sektor potensial yang berkembang cepat dan sektor yang tidak potensial.

C.3 Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya peranan kategori perekonomian suatu region dengan membandingkan kategori yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi potensial yang menjadi unggulan yang dapat dikembangkan pada suatu wilayah dan dipergunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu wilayah.

Kriteria pengukuran model tersebut yaitu :

- a. Jika nilai $LQ > 1$, berarti kategori tersebut merupakan kategori potensial, yang menunjukkan suatu kategori mampu melayani pasar baik didalam maupun diluar daerah
- b. Jika nilai $LQ < 1$, berarti kategori tersebut bukan merupakan kategori potensial, yang menunjukkan suatu kategori belum mampu melayani pasar dalam daerah sendiri
- c. Jika nilai $LQ = 1$, berarti suatu kategori hanya mampu melayani pasar didalam daerah sendiri

Dengan demikian, apabila $LQ > 1$ berarti kategori tersebut merupakan kategori unggulan didaerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Begitupun sebaliknya bila nilai $LQ < 1$, berarti kategori tersebut bukan merupakan kategori unggulan didaerah dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.

D. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi teori-teori pendukung penganalisaan dan tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, batasan/ruang lingkup masalah, maksud dan tujuan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Selain itu bab ini memaparkan juga tujuan umum Sensus Ekonomi 2016 dan kaitannya dengan penulisan hasil analisis.

Bab II : Potret Persebaran Ketenagakerjaan dan Lapangan Usaha

Bab ini berisi perkembangan jumlah usaha dari hasil Sensus Ekonomi 2006 dibandingkan jumlah usaha hasil Sensus Ekonomi 2016. Dalam bab ini dipaparkan jumlah usaha di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan hasil SE2006 dan SE2016. Selain itu bab ini memaparkan jumlah pertumbuhan tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota dan menurut lapangan usaha

Bab III : Potensi Usaha

Bab ini memaparkan tentang kategori-kategori yang menjadi penggerak perekonomian Sulawesi Tengah. Dalam bab ini dipaparkan kategori-kategori unggulan di masing-masing kabupaten kota berdasarkan analisis Location Quotien (LQ) dan Tipologi Klassen. Selain itu dipaparkan pula tentang penyerapan tenaga kerja di masing-masing lapangan usaha serta kategori yang paling banyak menyerap tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota.

Bab IV : Karakteristik Usaha

Bab ini memaparkan tentang peranan usaha mikro kecil dalam perekonomian Sulawesi Tengah. Beberapa karakteristik usaha juga dipaparkan dalam bab ini seperti pemanfaatan internet, skala omset, status badan usaha dan jaringan usaha.

Bab V : Produktivitas Tenaga Kerja

Bab ini memaparkan tentang ketersediaan sumber daya manusia dilihat dari sisi jumlah tenaga kerja dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Selain itu dipaparkan tentang penyerapan tenaga kerja di masing-masing kategori, juga dipaparkan pula tentang penyerapan tenaga kerja menurut skala usaha UMK dan UMB serta distribusinya di masing-masing kabupaten/kota.

Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis dan rekomendasi, serta saran-saran yang diberikan untuk lebih memaksimalkan temuan analisis bagi perekonomian Sulawesi Tengah.

Lampiran

Lampiran ini berisikan tabel-tabel penjelas tentang berbagai karakteristik usaha dan ketenagakerjaan, juga berisi tentang penjelasan kriteria UMK dan UMB menurut masing-masing kategori

<https://sulteng.bps.go.id>

Bab 2



Perkembangan serta Persebaran Usaha dan Tenaga Kerja

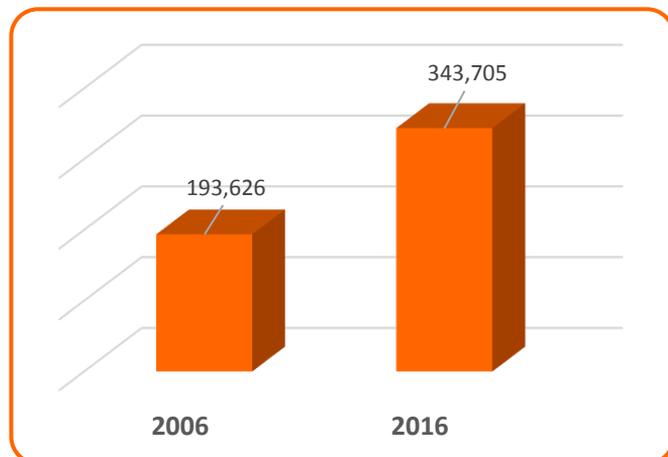
Perkembangan serta Persebaran Usaha dan Tenaga Kerja

A. Perkembangan Usaha dan Tenaga Kerja

Perkembangan kondisi ekonomi suatu wilayah dapat tercermin salah satunya melalui perkembangan usaha dan tenaga kerjanya. Sensus Ekonomi dapat memotret informasi tersebut dengan membandingkan kondisi sensus terakhir dengan hasil sensus sebelumnya. Selama kurun waktu 2006 - 2016 kondisi ekonomi di Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang positif. Hasil Sensus Ekonomi 2016 di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan jumlah usaha yang cukup signifikan dari tahun 2006 ke tahun 2016.

Gambar 2.1

Jumlah Usaha/Perusahaan di Sulawesi Tengah, 2006 dan 2016



Hasil Sensus Ekonomi 2016 di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan jumlah usaha yang cukup signifikan dari tahun 2006 ke tahun 2016. Jumlah usaha/perusahaan mengalami peningkatan sebesar 77 persen, yaitu mencapai 343.705 usaha pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 193.626 usaha.

Jumlah usaha/perusahaan mengalami peningkatan sebesar 77 persen, yaitu mencapai 343.705 usaha pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2006 yang hanya 193.626 usaha. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terjadi kenaikan sekitar 5,9 persen usaha pada setiap tahunnya. Perkembangan jumlah penduduk, perbaikan infrastruktur, serta inovasi industri dinilai memberikan andil yang signifikan dalam meningkatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2016.

Peningkatan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah dibentuk oleh peningkatan di semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Peningkatan aktivitas ekonomi di masing-masing kabupaten kota cukup bervariasi. Perbedaan peningkatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah dapat disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam, perbedaan sebaran penduduk, perbedaan pendidikan/kemampuan (*skills*) penduduk, perbedaan kemampuan dalam menarik investor, dan bisa jadi perbedaan pemberian stimulus (rangsangan).

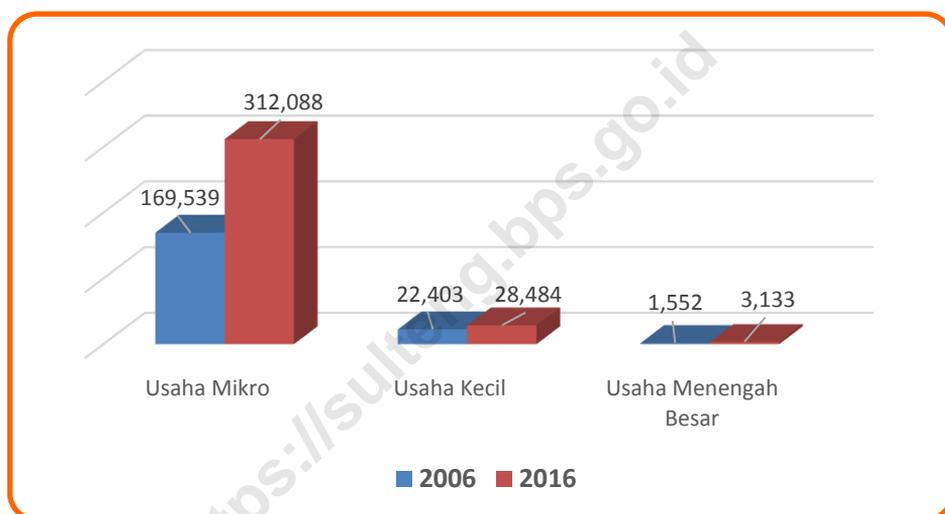
Tabel 2.1
Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Tahun 2006 dan 2016

Tahun 2006			Tahun 2016			Pertumbuhan	
No	Kabupaten/Kota	Jumlah	No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah	%
1.	Banggai Kepulauan	10 327	1	Banggai Kep.	17 192	15 908	154,04
			2.	Banggai Laut	9 043		
2.	Banggai	23 390	3.	Banggai	41 062	17 672	75,55
3.	Morowali	14 732	4.	Morowali	17 021	14 740	100,05
			5.	Morowali Utara	12 451		
4.	Poso	11 682	6.	Poso	21 028	9 346	80,00
5.	Donggala	34 485	7.	Donggala	37 112	26 037	75,50
			8.	Sigi	23 410		
6.	Tolitoli	13 894	9.	Tolitoli	25 848	11 954	86,04
7.	Buol	9 522	10.	Buol	14 525	5 003	52,54
8.	Parigi Moutong	31 469	11.	Parigi Moutong	59 456	27 987	88,94
9.	Tojo Una-Una	8 270	12.	Tojo Una-Una	19 393	11 123	134,50
10.	Palu	35 855	13.	Palu	46 164	10 309	28,75
Sulawesi Tengah		193 626	Sulawesi Tengah		343 705	150 079	77,51

Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Morowali, dan Morowali Utara merupakan kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah usaha yang cukup tinggi, yaitu di atas 100 persen dari tahun 2006 ke tahun 2016. Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut yang merupakan kabupaten pemekaran mengalami peningkatan jumlah usaha yang paling tinggi, yaitu

sekitar 154 persen. Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan usaha tertinggi kedua, yaitu sekitar 134 persen. Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang juga merupakan pemekaran mengalami peningkatan jumlah usaha sekitar 100 persen dalam kurun 10 tahun. Sedangkan kabupaten/kota yang lain mengalami peningkatan jumlah usaha di kisaran 28 – 89 persen.

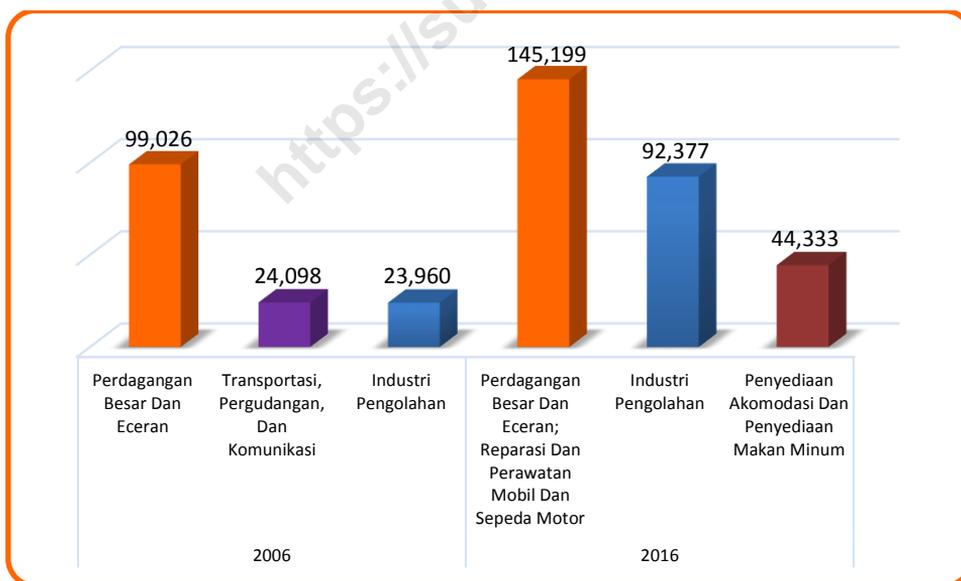
Gambar 2.2
Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha
di Sulawesi Tengah, Tahun 2006 dan 2016



Perkembangan aktivitas perekonomian selain dilihat dari jumlah usaha juga bisa terlihat dari perkembangan skala usaha. Jika dilihat dari skala usahanya, semua jenis usaha mengalami peningkatan dari tahun 2006 ke tahun 2016. Jenis usaha yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah usaha menengah besar, yaitu meningkat sekitar 102 persen dari 1.552 usaha pada tahun 2006 menjadi 3.113 usaha pada tahun 2016. Dengan kata lain, terjadi peningkatan usaha menengah besar sebesar 7,3 persen per tahun. Untuk usaha mikro juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu meningkat sekitar 84 persen dari 1.552 usaha pada tahun 2006 menjadi 3.113 usaha pada tahun 2016. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan usaha mikro sebesar 6,3 persen per tahun. Sedangkan untuk usaha kecil hanya mengalami peningkatan yang cukup rendah, yaitu sekitar 27 persen dalam kurun 2006-2016 atau meningkat sebesar 2,4 persen per tahun.

Komposisi usaha yang diminati di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 agak bergeser jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2006. Pada tahun 2006, 3 kategori usaha yang paling banyak diusahakan adalah kategori perdagangan besar dan eceran, diikuti oleh kategori transportasi, pergudangan, dan komunikasi, dan ketiga adalah kategori industri pengolahan. Sedangkan pada tahun 2016, komposisi tiga kategori usaha yang paling banyak dilakukan sedikit berubah. Perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor tetap merupakan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat Sulawesi Tengah, dimana usaha di kategori ini mencapai 145.199 usaha atau sekitar 42 persen dari total usaha di Sulawesi Tengah. Industri pengolahan merupakan usaha terbanyak kedua, dimana usaha di kategori ini mencapai 92.377 usaha atau sekitar 27 persen dari total usaha di Sulawesi Tengah. Sedangkan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum merupakan usaha terbanyak ketiga, dimana usaha di kategori ini mencapai 44.333 usaha atau sekitar 13 persen dari total usaha di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.3
Jumlah 3 Usaha/Perusahaan yang Dominan di Sulawesi Tengah,
Tahun 2006 dan 2016

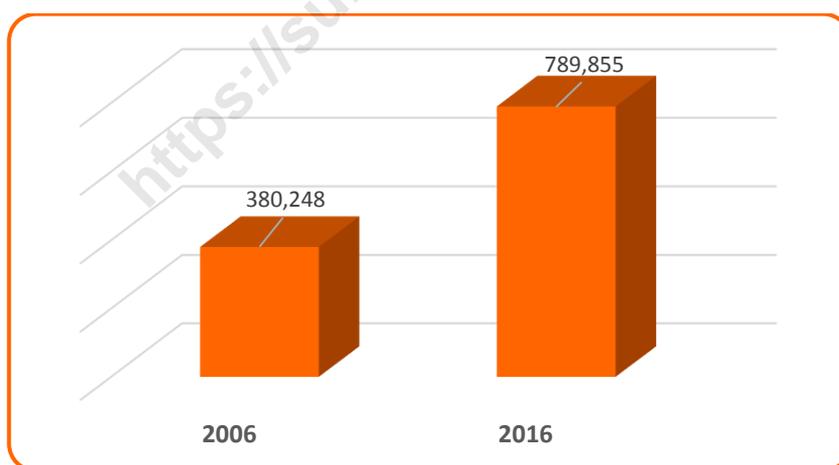


Dari perkembangan ketiga komposisi usaha yang dominan tersebut terlihat bahwa kontribusi jumlah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mengalami penurunan dari sekitar 51 persen pada tahun 2006 menjadi sekitar 42 persen pada tahun

2016, sedangkan kontribusi jumlah usaha industri pengolahan mengalami peningkatan dari sekitar 12 persen pada tahun 2006 menjadi sekitar 27 persen pada tahun 2016. Sedangkan peran kontribusi usaha sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi tergeser dengan peran kontribusi usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

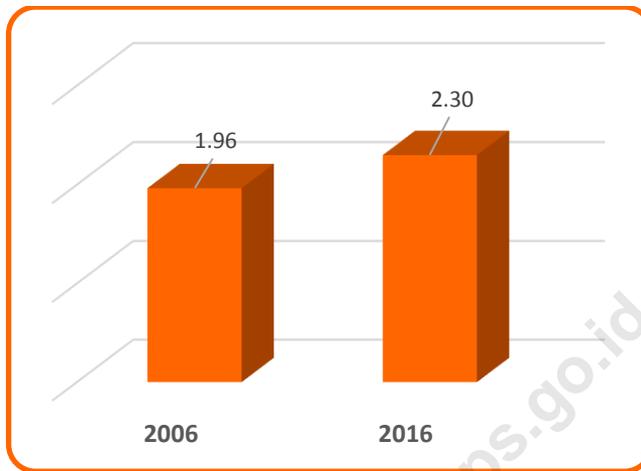
Selain dari sisi jumlah usaha untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi juga bisa dengan melihat perkembangan tenaga kerja yang melakukan aktivitas usaha. Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan terjadinya peningkatan tenaga kerja yang signifikan. Jumlah tenaga kerja meningkat sekitar 108 persen, dari 380.248 orang pada tahun 2006 menjadi 789.855 orang pada tahun 2016. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sekitar 7,6 persen per tahun. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah usaha, hal tersebut dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2.4
Jumlah Tenaga Kerja di Sulawesi Tengah,
Tahun 2006 dan 2016



Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2016 mencapai 2-3 orang per unit usaha, hal tersebut meningkat sekitar 17 persen jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2006 yang hanya mampu menyerap 1-2 tenaga kerja per unit usaha.

Gambar 2.5
Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja per Usaha
di Sulawesi Tengah, Tahun 2006 dan 2016



Jika dilihat menurut kabupaten/kota, maka peningkatan jumlah tenaga kerja juga terjadi di semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Tolitoli, serta Banggai merupakan kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu di atas 100 persen dari tahun 2006 ke tahun 2016. Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut yang merupakan kabupaten pemekaran mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang paling tinggi, yaitu sekitar 170 persen. Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang juga merupakan pemekaran, serta Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja sekitar 149 persen dalam kurun 10 tahun. Untuk Kabupaten Parigi Moutong, Tolitoli, dan Banggai masing-masing terjadi penambahan jumlah tenaga kerja sekitar 145 persen, 108 persen, dan 104 persen dari tahun 2006 ke tahun 2016. Sedangkan kabupaten/kota yang lain mengalami peningkatan jumlah usaha di kisaran 64 – 94 persen.

Tabel 2.2
Jumlah dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tengah, Tahun 2006 dan 2016

Tahun 2006			Tahun 2016			Pertumbuhan	
No	Kabupaten/Kota	Jumlah	No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Jumlah	%
1.	Banggai Kep.	20 246	1	Banggai Kep.	35 196	34 503	170,42
			2.	Banggai Laut	19 553		
2.	Banggai	46 791	3.	Banggai	95 347	48 556	103,77
3.	Morowali	29 312	4.	Morowali	43 586	43 822	149,50
			5.	Morowali Utara	29 548		
4.	Poso	24 157	6.	Poso	46 887	22 730	94,09
5.	Donggala	62 338	7.	Donggala	73 401	59 616	95,63
			8.	Sigi	48 553		
6.	Tolitoli	28 710	9.	Tolitoli	59 658	30 948	107,80
7.	Buol	20 243	10.	Buol	33 233	12 990	64,17
8.	Parigi Moutong	54 244	11.	Parigi Moutong	132 962	78 718	145,12
9.	Tojo Una-Una	15 859	12.	Tojo Una-Una	39 554	23 695	149,41
10.	Palu	78 348	13.	Palu	132 377	54 029	68,96
Sulawesi Tengah		380 248	Sulawesi Tengah		789 855	409 607	107,72

Dalam kurun 10 tahun antara tahun 2006 dan 2016, komposisi 3 usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2006 lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa pendidikan, masing-masing menyerap sekitar 43 persen, 14 persen, dan 11 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut menyerap sekitar 68 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Kondisi pada tahun 2016 komposisi 3 usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak hampir sama dengan kondisi tahun 2006, yaitu usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, usaha industri pengolahan, dan usaha pendidikan, masing-masing menyerap sekitar 30 persen, 28 persen, dan 11 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut menyerap sekitar 69 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.3
Jumlah 3 Usaha/Perusahaan dengan Jumlah Tenaga Kerja Terbanyak
di Sulawesi Tengah, Tahun 2006 dan 2016

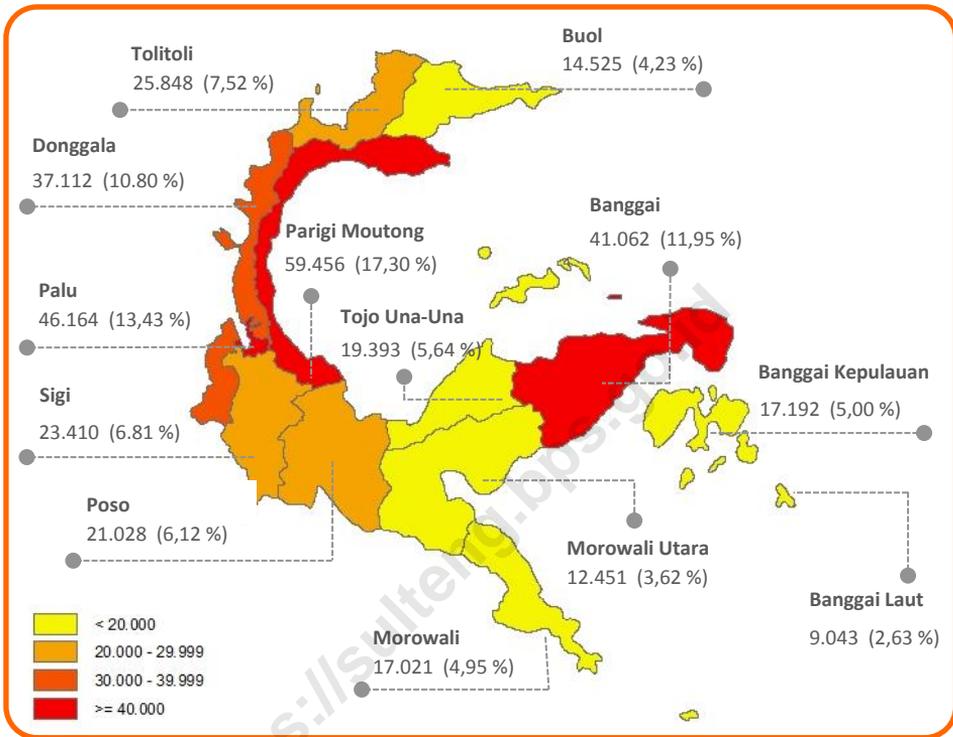
Tahun	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Persentase
2006	Perdagangan Besar dan Eceran	164 350	43,22
	Industri Pengolahan	53 283	14,01
	Jasa Pendidikan	42 433	11,16
2016	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	236 503	29,94
	Industri Pengolahan	223 007	28,23
	Pendidikan	85 024	10,76

Dari perkembangan ketiga komposisi usaha dengan tenaga kerja terbanyak terlihat bahwa urutan komposisi bisa dikategorikan sama, tetapi terjadi pergerakan kontribusi. Terlihat bahwa kontribusi tenaga kerja sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor terhadap total penyerapan tenaga kerja yang pada tahun 2006 sekitar 43 persen menurun menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2016. Sedangkan kontribusi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dengan kontribusi sekitar 14 persen meningkat menjadi sekitar 28 persen pada tahun 2016. Sedangkan kontribusi tenaga kerja di sektor pendidikan hampir bisa dikatakan hampir sama antara tahun 2006 dengan tahun 2016.

B. Persebaran Usaha

Jumlah usaha di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 yang sebesar 343.705 unit menyebar di 13 kabupaten/kota. Persebaran usaha yang paling banyak berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 59.456 unit usaha atau sekitar 17 persen dari jumlah usaha di Sulawesi Tengah. Jumlah usaha terbanyak kedua ada di Kota Palu, yaitu sebesar 46.164 atau sekitar 13 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai dan Kabupaten Donggala, dengan jumlah usaha sekitar 12 persen dan sekitar 11 persen dari jumlah usaha di Sulawesi Tengah. Sedangkan persebaran usaha di kabupaten lainnya sekitar 2 sampai 8 persen.

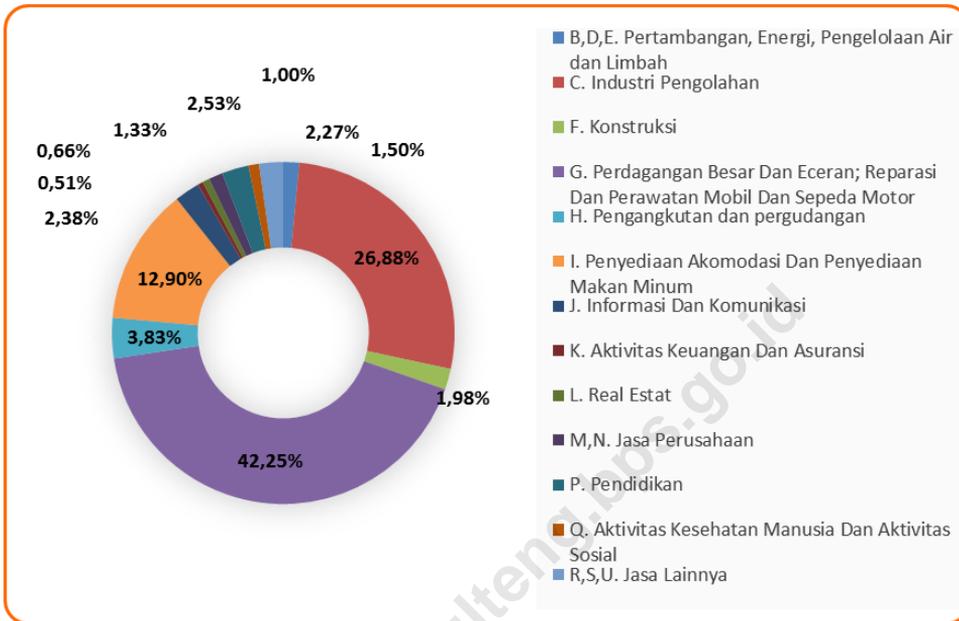
Gambar 2.6
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Jika dilihat persebaran menurut kategori lapangan usaha, maka jenis usaha yang paling diminati masyarakat Sulawesi Tengah pada tahun 2016 adalah usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Kategori G), yaitu sekitar 42 persen dari total usaha. Usaha selanjutnya yang banyak diminati adalah usaha industri pengolahan (Kategori C), yaitu sekitar 27 persen dari total usaha di Sulawesi Tengah. Usaha ketiga yang cukup banyak diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah adalah usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (Kategori I), yaitu sekitar 13 persen dari total usaha. Sedangkan usaha yang lain belum cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, masing-masing usaha tersebut hanya memberikan kontribusi di bawah 4 persen.

Gambar 2.7

Distribusi Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah, Tahun 2016

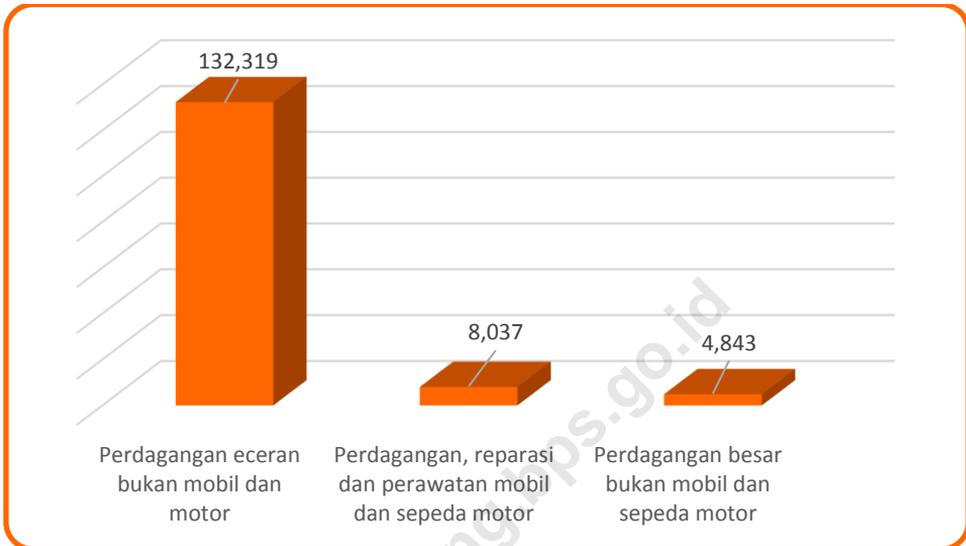


Sektor usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Kategori G) merupakan sektor usaha yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 145.199 usaha. Kategori usaha ini mencakup usaha di bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor, serta perdagangan eceran bukan mobil dan motor. Persebaran usaha di sektor usaha ini didukung oleh persebaran penduduk dan serta kondisi ekonomi penduduk, sehingga semakin banyak jumlah penduduk serta semakin banyak penduduk dengan kemampuan ekonomi lebih baik maka semakin tinggi aktivitas usaha ini di wilayah tersebut.

Sebaran usaha kategori G menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha perdagangan eceran bukan mobil dan motor, yaitu sebesar 132.319 unit usaha. Sedangkan jenis usaha perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 8.037 unit usaha. Jenis usaha perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor sebesar 4.843 unit usaha.

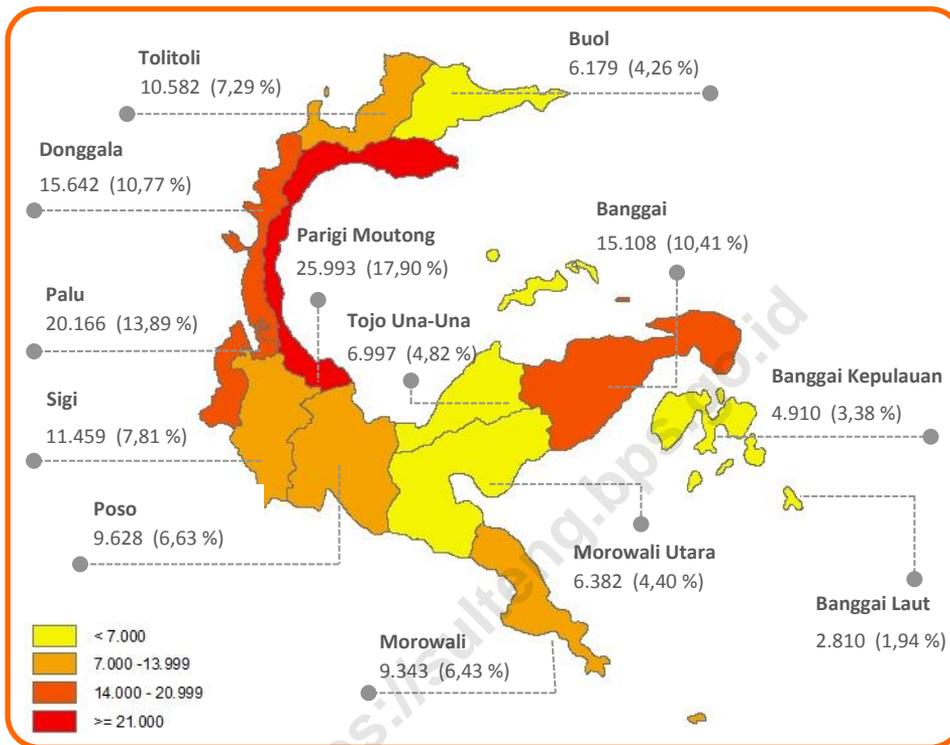
Gambar 2.8

Jumlah Usaha Kategori G menurut Golongan Pokok di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Sebaran usaha kategori G menurut kabupaten/kota, paling banyak terdapat di Parigi Moutong, yaitu mencapai 25.993 usaha atau sekitar 18 persen. Usaha dengan kategori G kedua terbanyak berada di Kota Palu, yaitu sebesar 20.166 usaha atau sekitar 14 persen. Sebaran usaha dengan kategori G juga cukup banyak dijumpai di Kabupaten Donggala dan Banggai, masing-masing mencapai 15.642 usaha atau sekitar 11 persen dan 15.108 usaha atau sekitar 10 persen dari total usaha dengan kategori G di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.9
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori G
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Tahun 2016

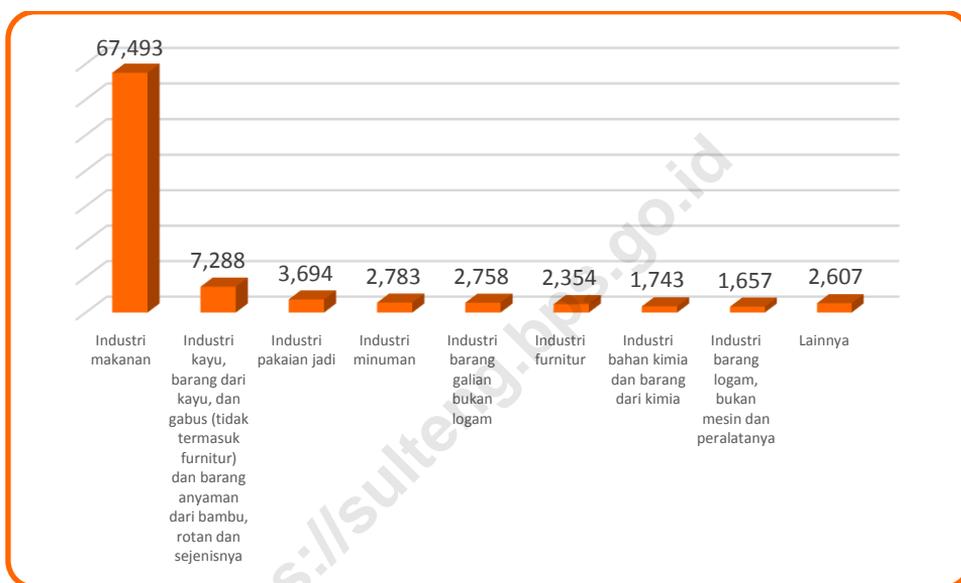


Usaha industri pengolahan (Kategori C) merupakan sektor usaha yang terbanyak kedua yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 92.377 usaha. Kategori usaha ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Yang termasuk dalam kategori usaha ini adalah industri makanan, industri minuman, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri percetakan, industri furnitur, serta berbagai industri pengolahan lainnya. Persebaran usaha di sektor usaha ini sebagian besar dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku serta kemampuan (*skills*) penduduk. Semakin tinggi ketersediaan bahan baku serta semakin tinggi kemampuan (*skills*) penduduk di suatu wilayah maka semakin tinggi juga usaha industri pengolahan di wilayah tersebut.

Sebaran usaha kategori C menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha industri makanan, yaitu sebesar 67.493 unit usaha. Sedangkan jenis usaha kategori C terbesar kedua adalah industri kayu,

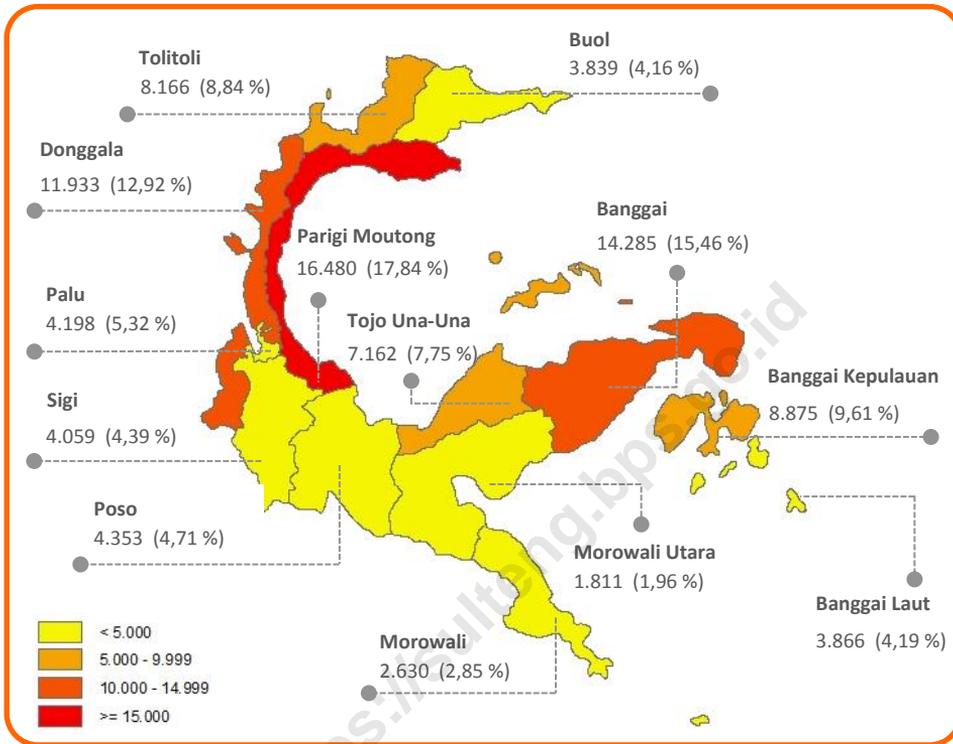
barang dari kayu, dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman bambu, rotan, dan sejenisnya, yaitu sebesar 7.288 unit usaha. Selanjutnya adalah industri pakaian jadi, sebesar 2.783 unit usaha.

Gambar 2.10
Jumlah Usaha Kategori C menurut Golongan Pokok
di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Sebaran usaha industri pengolahan menurut kabupaten/kota, paling banyak diusahakan di Parigi Moutong, yaitu mencapai 16.480 usaha atau sekitar 18 persen. Usaha industri pengolahan terbanyak kedua berada di Banggai, yaitu sebesar 14.285 usaha atau sekitar 15 persen. Sebaran usaha industri pengolahan juga cukup banyak dijumpai di Kabupaten Donggala, yaitu mencapai 11.933 usaha atau sekitar 13 persen dari total usaha industri pengolahan di Sulawesi Tengah.

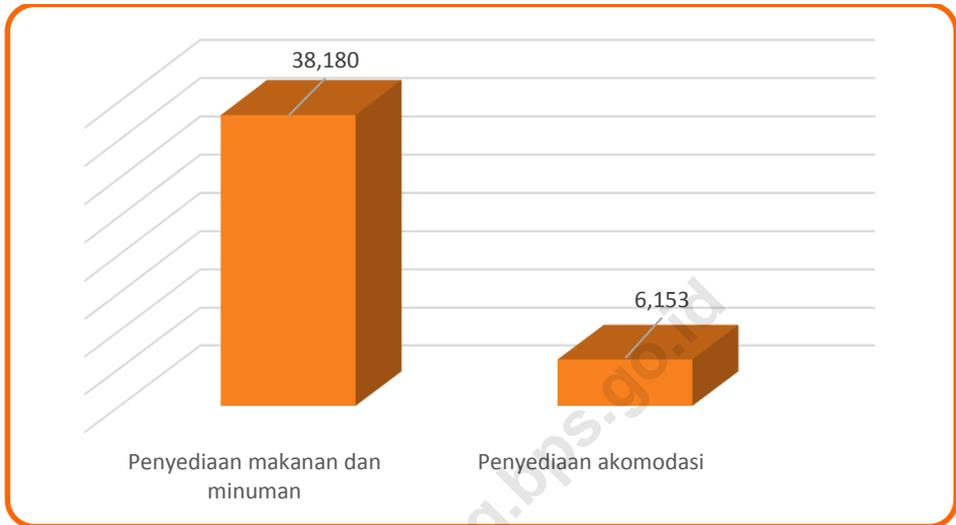
Gambar 2.11
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori C
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (kategori I) merupakan sektor usaha yang terbanyak ketiga yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 44.333 usaha. Kategori usaha ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang penyediaan akomodasi yang menyediakan fasilitas menginap komersial serta penyediaan makanan dan minuman. Persebaran usaha di sektor usaha ini terutama dipengaruhi oleh persebaran penduduk, kemampuan ekonomi penduduk, serta potensi wisata di suatu wilayah.

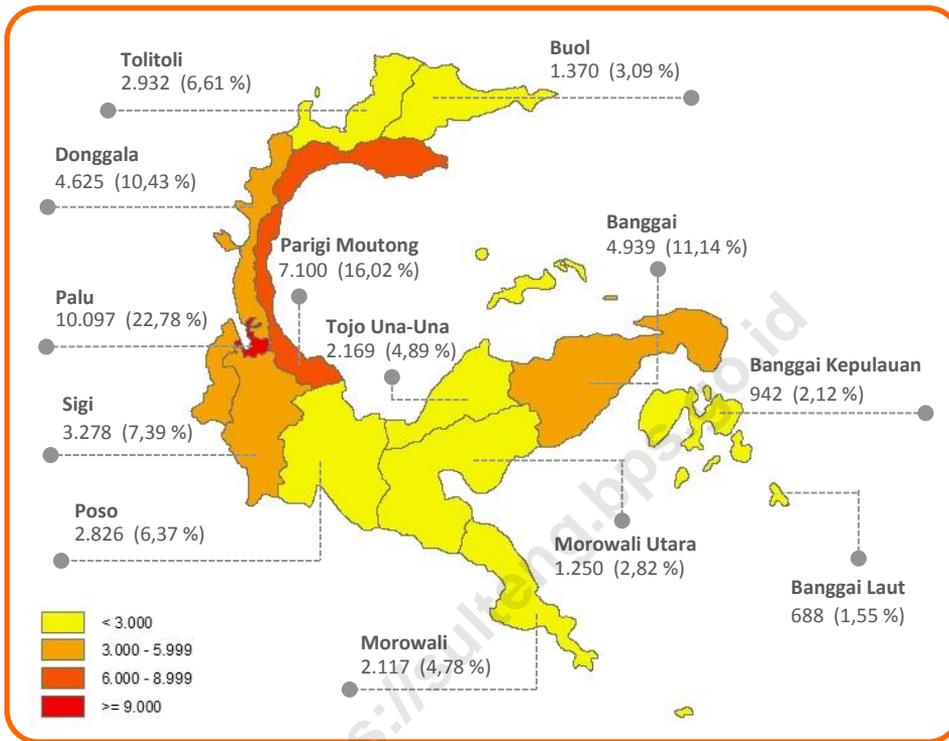
Sebaran usaha kategori I menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman, yaitu sebesar 38.180 unit usaha. Sedangkan jenis usaha penyediaan akomodasi, yaitu sebesar 6.153 unit usaha.

Gambar 2.12
Jumlah Usaha Kategori I menurut Golongan Pokok
di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Sebaran usaha kategori I menurut kabupaten/kota, paling banyak diusahakan di Palu, yaitu mencapai 10.097 usaha atau sekitar 23 persen. Usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 7.100 usaha atau sekitar 16 persen. Sebaran usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga cukup banyak dijumpai di Kabupaten Banggai dan Donggala, masing-masing mencapai 4.939 usaha (11 persen) dan 4.625 usaha (10 persen) dari total usaha dengan kategori I di Sulawesi Tengah.

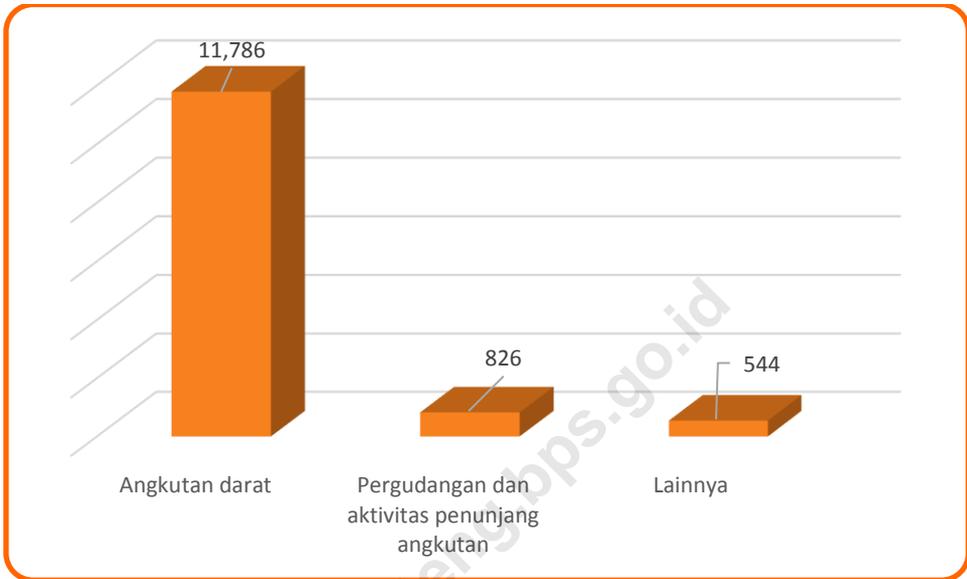
Gambar 2.13
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori I
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Usaha pengangkutan dan pergudangan (kategori H) merupakan sektor usaha yang terbanyak keempat yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 13.156 usaha. Kategori usaha ini kegiatan ekonomi di bidang angkutan darat, angkutan perairan, angkutan udara, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, serta aktivitas pos dan kurir.

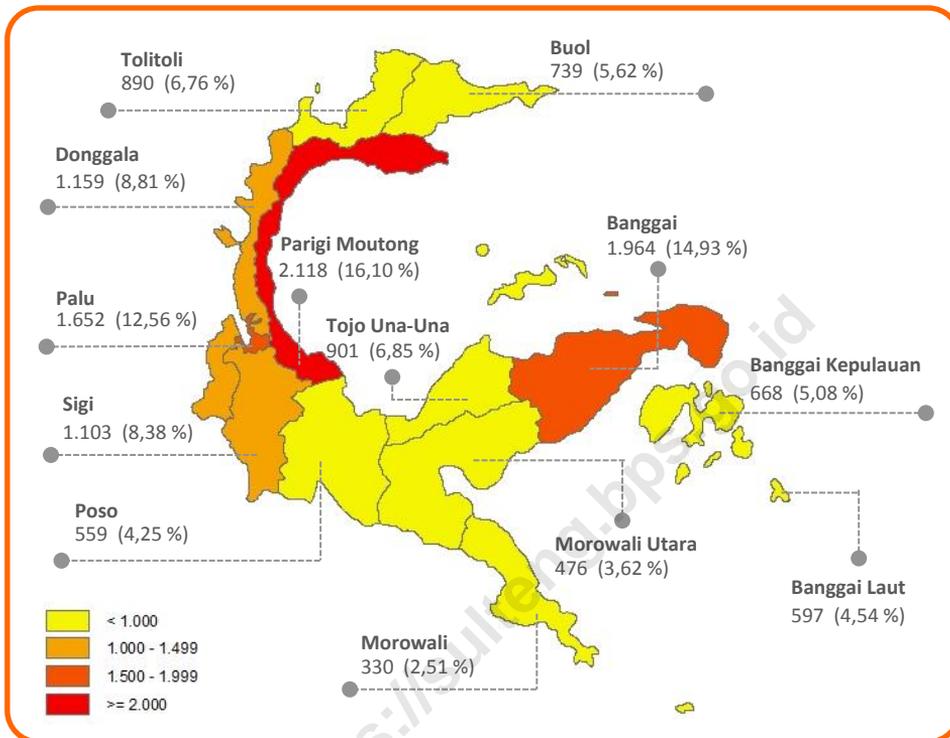
Sebaran usaha kategori H menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha angkutan darat, yaitu sebesar 11.786 unit usaha. Sedangkan jenis usaha pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan sebesar 826 unit usaha. Sedangkan jenis usaha kategori H lainnya sebesar 544 unit usaha.

Gambar 2.14
Jumlah Usaha Kategori H menurut Golongan Pokok
di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Sebaran usaha kategori H menurut kabupaten/kota, paling banyak diusahakan di Parigi Moutong, yaitu mencapai 2.118 (16 persen). Usaha pengangkutan dan pergudangan terbanyak kedua berada di Banggai, yaitu mencapai 1.964 usaha (15 persen). Sebaran usaha pengangkutan dan pergudangan juga relatif banyak dijumpai di Kota Palu, yaitu sebesar 1.652 usaha (13 persen) dari total usaha dengan kategori H di Sulawesi Tengah.

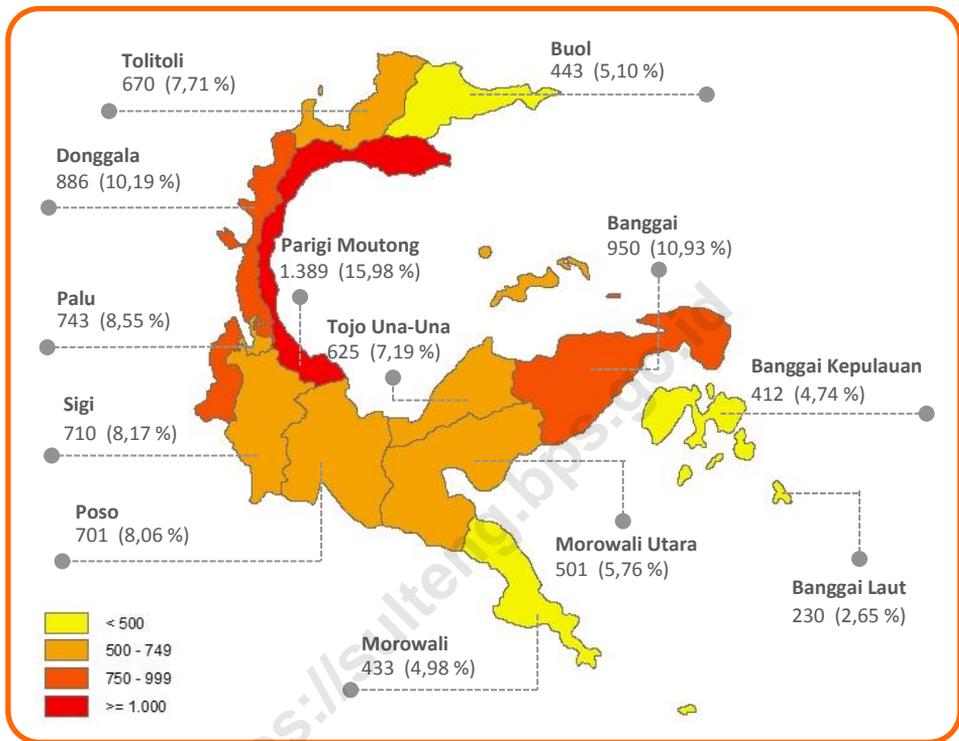
Gambar 2.15
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori H
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Usaha pendidikan (kategori P) merupakan sektor usaha yang terbanyak kelima yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu sebanyak 8.693 usaha. Kategori usaha ini mencakup usaha pendidikan dasar dan pendidikan usia dini, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan lainnya, serta kegiatan penunjang pendidikan. Persebaran usaha di sektor usaha ini sebagian besar dipengaruhi oleh persebaran penduduk usia sekolah, sehingga semakin banyak penduduk usia sekolah di suatu wilayah biasa akan semakin banyak usaha pendidikan di wilayah tersebut.

Sebaran usaha dengan kategori P paling banyak diusahakan di Parigi Moutong, yaitu mencapai 1.389 usaha atau sekitar 15,98 persen. Usaha pendidikan terbanyak kedua berada di Banggai, yaitu mencapai 950 usaha atau sekitar 11 persen. Sebaran usaha pendidikan juga cukup banyak dijumpai di Donggala, yaitu sebesar 886 usaha atau sekitar 10 persen dari total usaha dengan kategori P di Sulawesi Tengah.

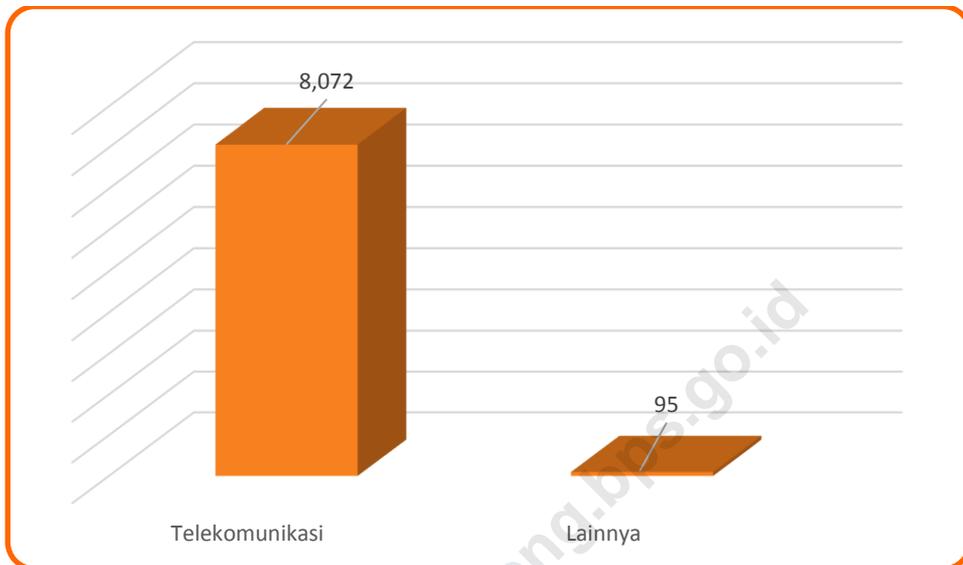
Gambar 2.16
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori P
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Usaha informasi dan komunikasi (kategori J) merupakan sektor usaha yang terbanyak keenam yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 8.167 usaha. Kategori usaha ini mencakup usaha aktivitas penerbitan, aktivitas penyiaran dan pemrograman, telekomunikasi, aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer, serta aktivitas jasa informasi. Persebaran usaha di sektor usaha ini terutama dipengaruhi oleh persebaran penduduk serta semakin tingginya kebutuhan akan jasa komunikasi.

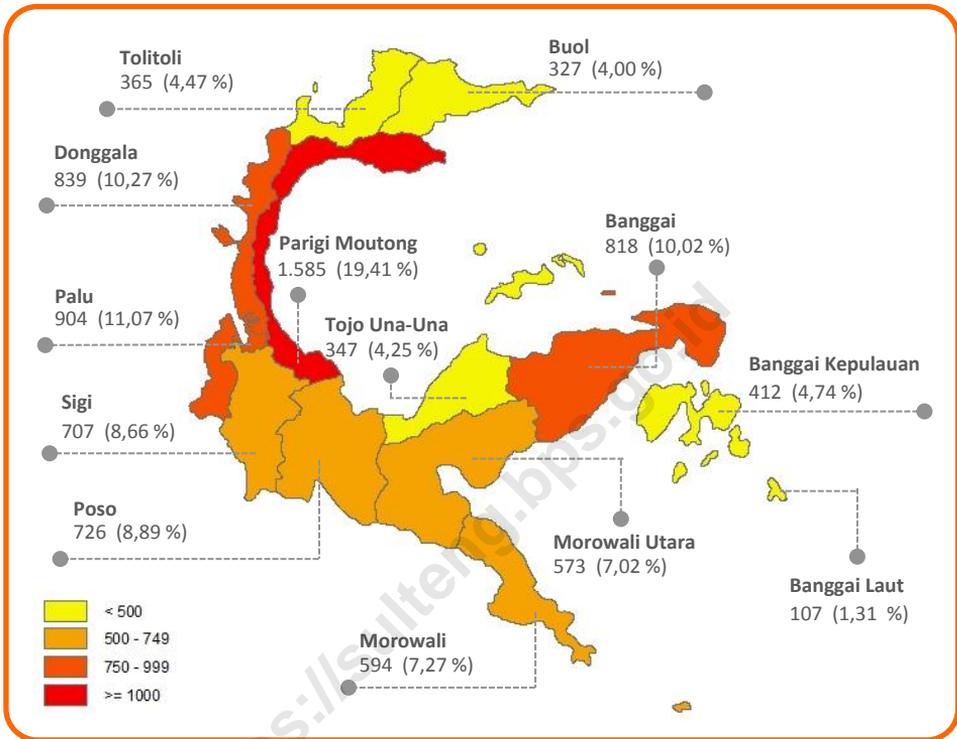
Sebaran usaha kategori J menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha telekomunikasi, yaitu sebesar 8.072 unit usaha. Sedangkan jenis usaha kategori J lainnya sebesar 95 unit usaha.

Gambar 2.17
Jumlah Usaha Kategori J menurut Golongan Pokok
di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Sebaran usaha kategori J menurut kabupaten/kota, paling banyak diusahakan di Parigi Moutong, yaitu mencapai 1.585 usaha atau sekitar 19 persen. Usaha informasi dan komunikasi terbanyak kedua berada di Palu, yaitu mencapai 904 usaha atau sekitar 11 persen. Sebaran usaha informasi dan komunikasi juga cukup banyak dijumpai di Donggala dan Banggai, masing-masing sebesar 839 usaha atau sekitar 10 persen dan 818 usaha atau sekitar 10 persen dari total usaha dengan kategori J di Sulawesi Tengah.

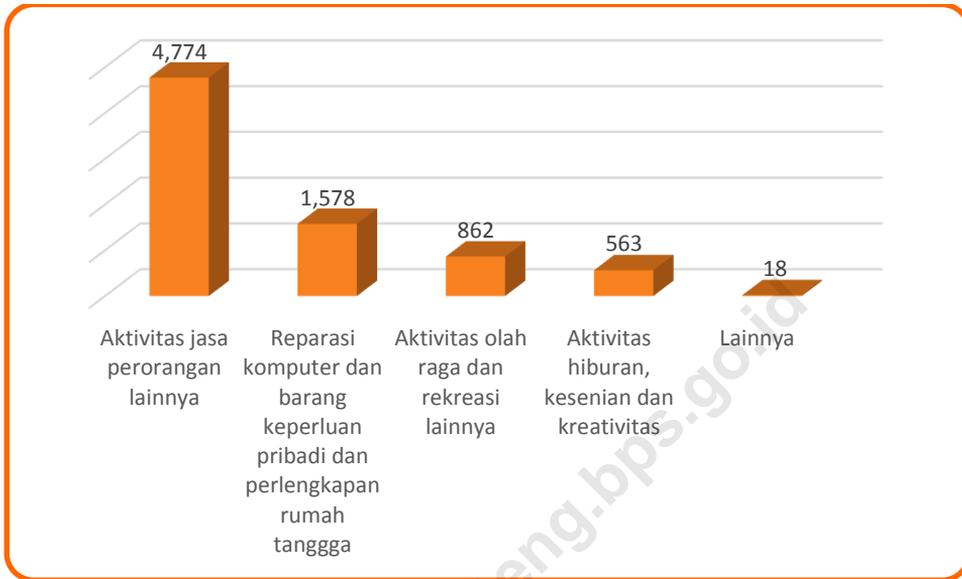
Gambar 2.18
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori J
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Usaha jasa lainnya (kategori R, S, U) merupakan sektor usaha yang terbanyak ketujuh yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 7.795 usaha. Kategori usaha ini mencakup aktivitas keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta aktivitas jasa perorangan lainnya. Persebaran usaha di sektor usaha ini sebagian besar dipengaruhi sebagian besar oleh kemampuan ekonomi penduduk, sehingga semakin tinggi kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah maka semakin tinggi pula jumlah usaha di sektor ini.

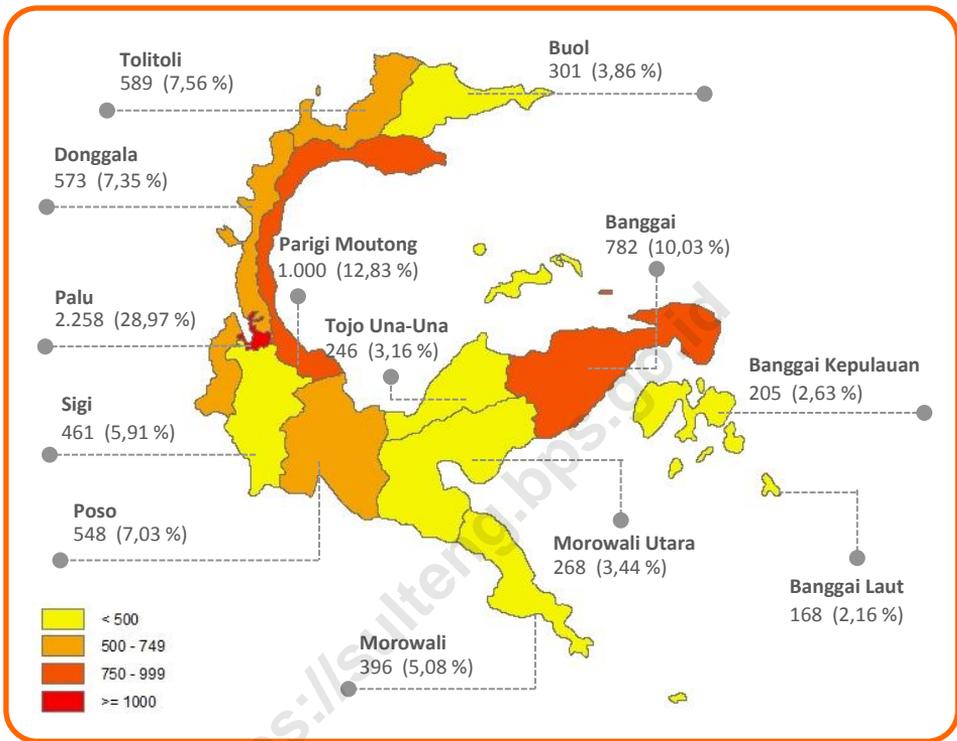
Sebaran usaha kategori R, S, U menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha aktivitas jasa perorangan lainnya, yaitu sebesar 4.774 unit usaha. Jenis usaha kategori R, S, U terbanyak kedua adalah reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, yaitu sebesar 1.578 unit usaha. Selanjutnya adalah jenis usaha aktivitas olah raga dan rekreasi lainnya, yaitu sebesar 95 unit usaha.

Gambar 2.19
Jumlah Usaha Kategori R, S, U menurut Golongan Pokok
di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Sebaran usaha Kategori R, S, U menurut kabupaten/kota, paling banyak diusahakan di Palu, yaitu mencapai 2.258 usaha atau sekitar 29 persen. Jasa lainnya terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 1.000 usaha atau sekitar 13 persen. Sebaran usaha jasa lainnya juga cukup banyak dijumpai di Banggai, yaitu sebesar 782 usaha atau sekitar 10 persen dari total usaha jasa lainnya di Sulawesi Tengah.

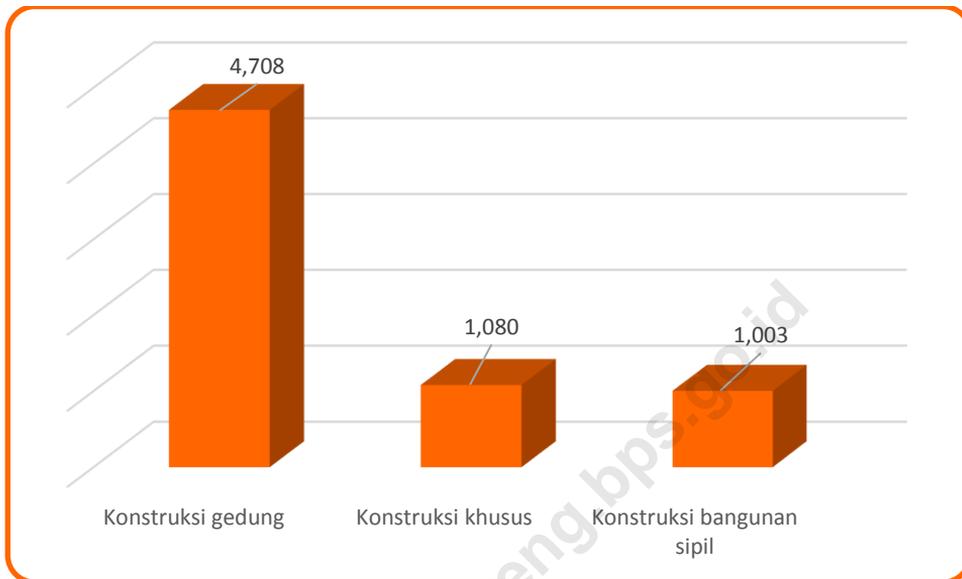
Gambar 2.20
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori R, S, U
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Usaha konstruksi (kategori F) merupakan sektor usaha yang terbanyak kedelapan yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 6.791 usaha. Kategori usaha ini mencakup aktivitas konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil (jalan, jembatan, rel, irigasi, dan lain sebagainya), serta konstruksi khusus. Persebaran usaha di sektor usaha ini terutama dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi penduduk, kemampuan ekonomi pemerintah, serta potensi ekonomi wilayah. Sehingga semakin tinggi kemampuan ekonomi penduduk, kemampuan ekonomi pemerintah, serta potensi ekonomi wilayah di suatu wilayah maka semakin tinggi pula jumlah usaha di sektor ini.

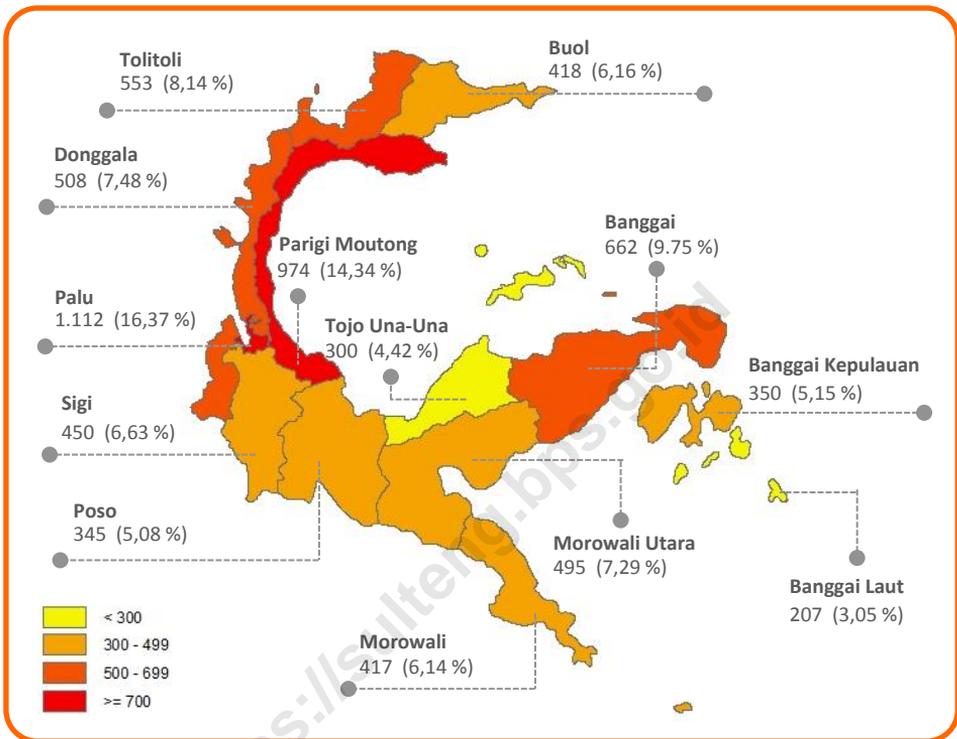
Sebaran usaha kategori F menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha konstruksi gedung, yaitu sebesar 4.708 unit usaha. Jenis usaha kategori F terbanyak kedua adalah konstruksi khusus, yaitu sebesar 1.080 unit usaha. Selanjutnya adalah jenis usaha konstruksi bangunan sipil, yaitu sebesar 1.003 unit usaha.

Gambar 2.21
Jumlah Usaha Kategori F menurut Golongan Pokok
di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Sebaran usaha kategori F menurut kabupaten/kota, paling banyak diusahakan di Palu, yaitu mencapai 1.112 usaha atau sekitar 16 persen. Usaha konstruksi terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 974 usaha atau sekitar 14 persen. Sebaran usaha konstruksi juga cukup banyak dijumpai di Banggai, yaitu mencapai 662 usaha atau sekitar 10 persen dari total usaha konstruksi di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.22
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori F
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016

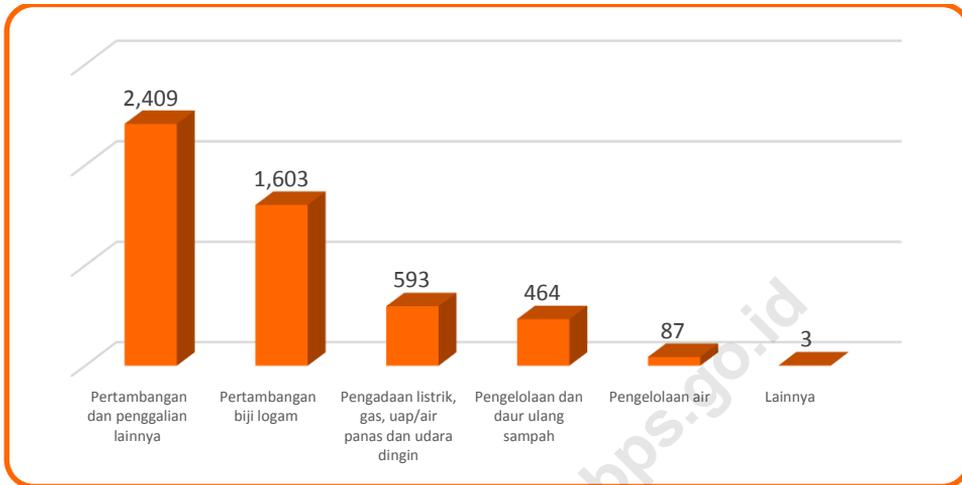


Usaha pertambangan, energi, pengelolaan air dan limbah (kategori B, D, E) merupakan sektor usaha terbanyak kesembilan yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu hanya mencapai 5.159 usaha. Persebaran usaha di sektor usaha ini terutama dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam. Sehingga semakin tinggi potensi sumber daya alam di suatu wilayah maka semakin tinggi pula jumlah usaha di sektor ini.

Sebaran usaha kategori B, D, E menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha pertambangan dan penggalian lainnya, yaitu sebesar 2.409 unit usaha. Jenis usaha kategori B, D, E terbanyak kedua adalah pertambangan biji logam, yaitu sebesar 1.603 unit usaha. Selanjutnya adalah jenis usaha pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, yaitu sebesar 593 unit usaha.

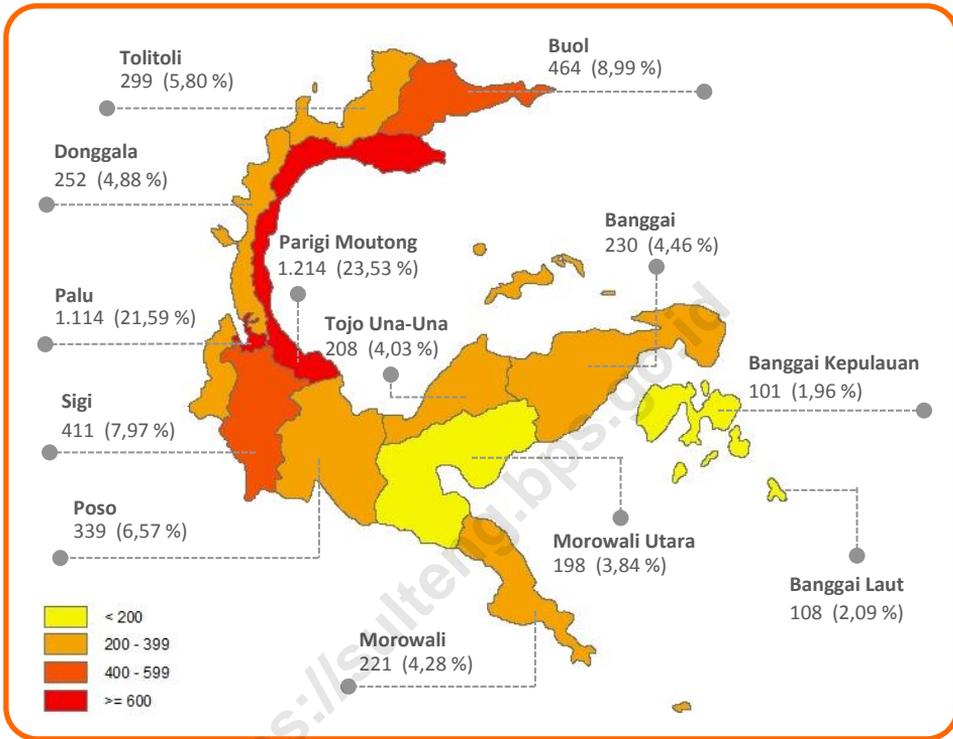
Gambar 2.23

Jumlah Usaha Kategori B, D, E menurut Golongan Pokok di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Sebaran usaha kategori B, D, E menurut kabupaten/kota paling banyak diusahakan di Parigi Moutong, yaitu mencapai 1.214 usaha atau sekitar 24 persen. Usaha pertambangan, energi, pengelolaan air dan limbah terbanyak kedua berada di Palu, yaitu mencapai 1.114 usaha atau sekitar 22 persen.

Gambar 2.24
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori B, D, E
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016

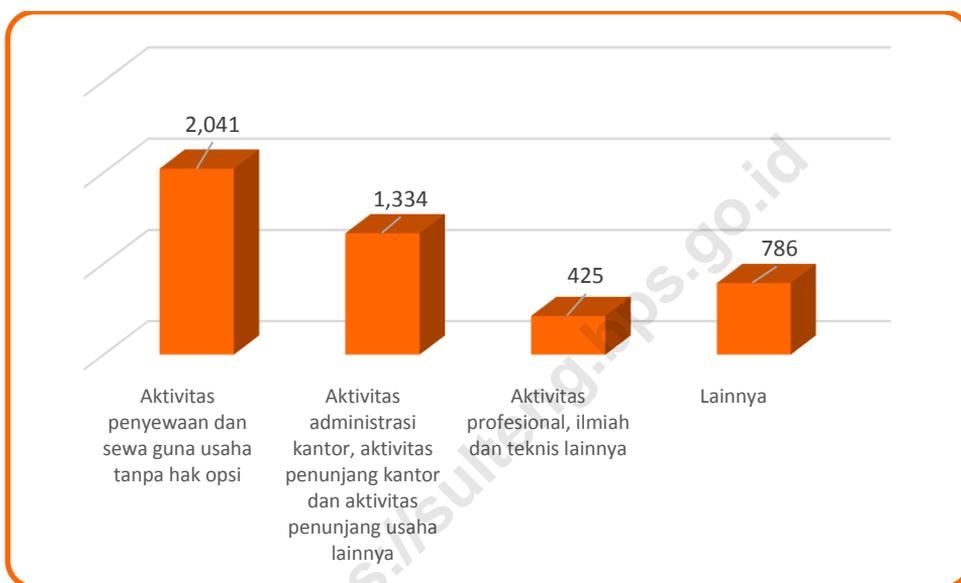


Usaha jasa perusahaan (kategori M, N) merupakan sektor usaha terbanyak kesepuluh yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu hanya mencapai 4.586 usaha. Kategori usaha ini mencakup aktivitas hukum dan akuntansi, aktivitas profesional dan teknis lainnya, aktivitas kesehatan hewan, aktivitas penyewaan, aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas agen perjalanan dan wisata, aktivitas keamanan, aktivitas administrasi kantor, serta aktivitas penunjang kantor. Persebaran usaha di sektor usaha ini terutama dipengaruhi oleh keberadaan pusat bisnis maupun perkantoran. Sehingga semakin tinggi keberadaan pusat bisnis maupun perkantoran di suatu wilayah maka semakin tinggi pula jumlah usaha di sektor ini.

Sebaran usaha kategori M, N menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, yaitu sebesar 2.041 unit usaha. Jenis usaha kategori M, N terbanyak kedua adalah Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor

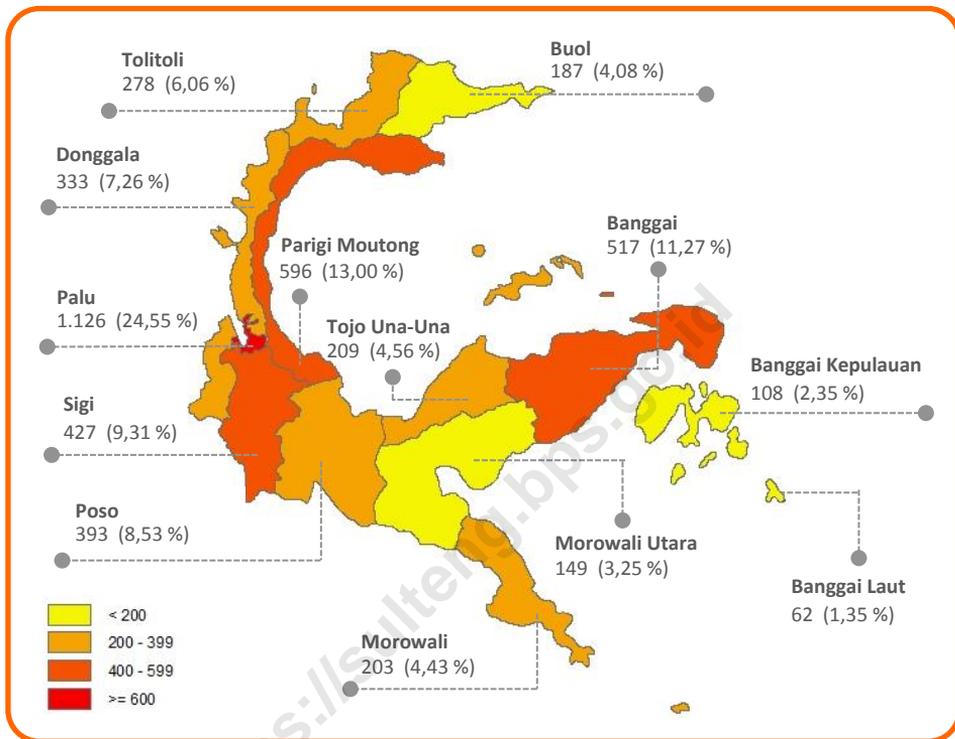
dan aktivitas penunjang usaha, yaitu sebesar 1.334 unit usaha. Selanjutnya adalah jenis usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya, yaitu sebesar 425 unit usaha.

Gambar 2.25
Jumlah Usaha Kategori M, N menurut Golongan Pokok di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Sebaran usaha kategori M, N menurut kabupaten/kota paling banyak diusahakan di Palu, yaitu mencapai 1.126 usaha atau sekitar 25 persen. Usaha jasa perusahaan terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 596 usaha atau sekitar 13 persen. Sebaran usaha jasa perusahaan juga cukup banyak dijumpai di Banggai, yaitu mencapai 517 usaha atau sekitar 11 persen dari total usaha jasa perusahaan di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.26
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori M,N
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016

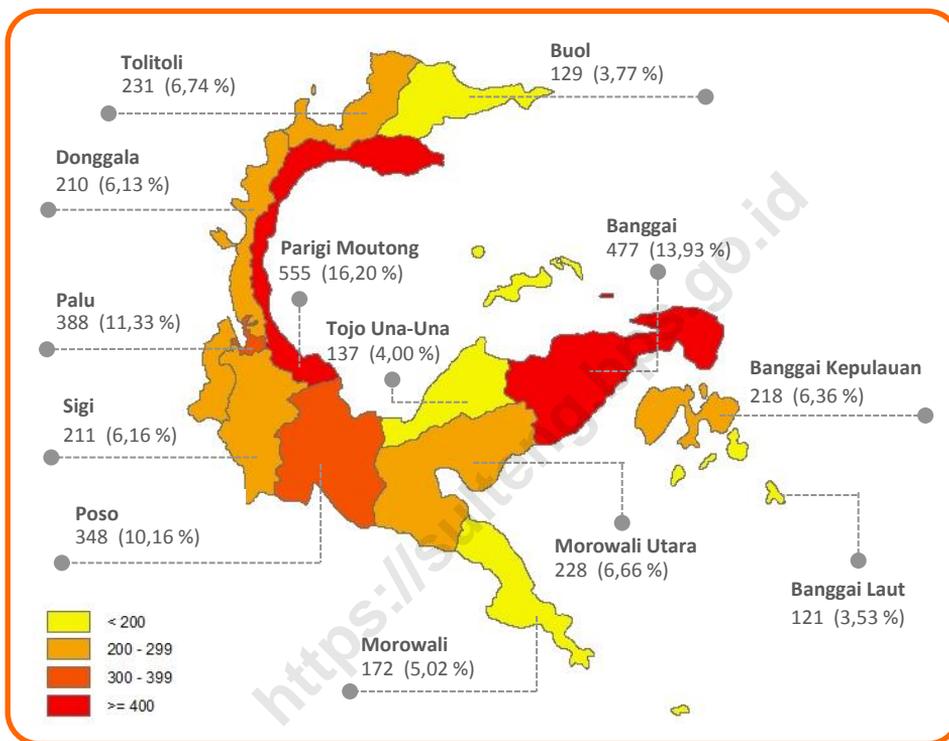


Usaha aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial (kategori Q) merupakan sektor usaha ketiga terkecil yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu hanya mencapai 3.425 usaha. Kategori usaha ini mencakup aktivitas kesehatan manusia (rumah sakit, praktek dokter, dan lain sebagainya), aktivitas sosial di dalam panti, serta aktivitas sosial di luar panti. Persebaran usaha di sektor usaha ini terutama dipengaruhi oleh persebaran penduduk serta kemampuan ekonominya. Sehingga semakin tinggi penduduk serta kemampuan ekonominya di suatu wilayah maka semakin tinggi pula jumlah usaha di sektor ini.

Sebaran usaha kategori Q menurut golongan pokok di Sulawesi Tengah, sebagian besar adalah jenis usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, yaitu sebesar 2.041 unit usaha. Jenis usaha kategori M, N terbanyak kedua adalah Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha, yaitu sebesar 1.334 unit usaha. Selanjutnya

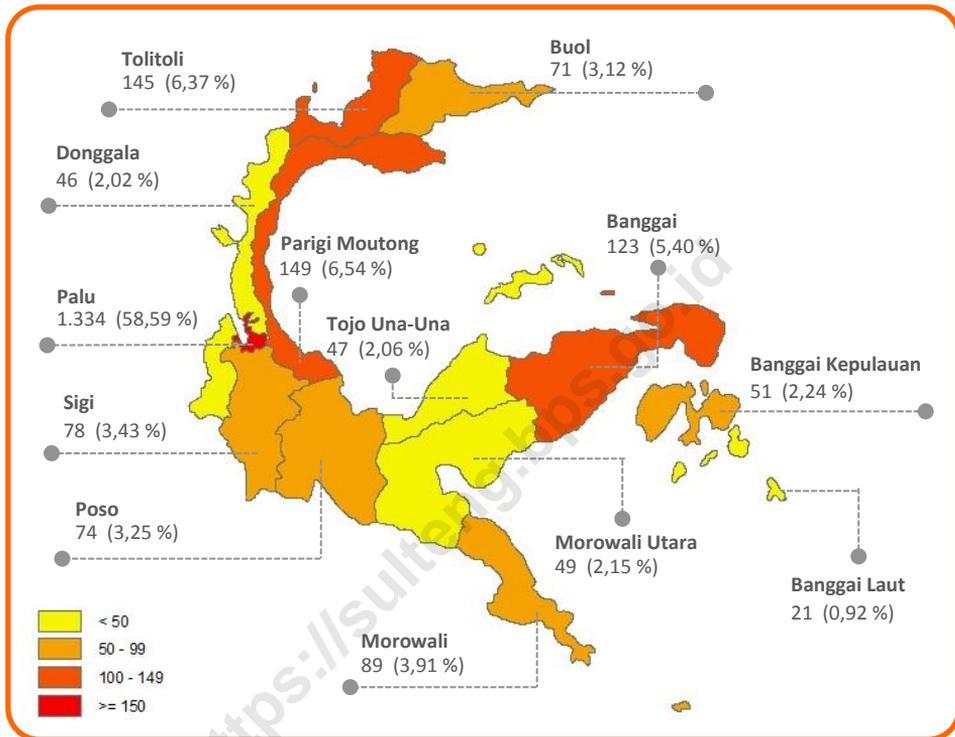
adalah jenis usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya, yaitu sebesar 425 unit usaha.

Gambar 2.27
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori Q
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Usaha real estat (kategori L) merupakan sektor usaha kedua terkecil yang diusahakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, yaitu hanya mencapai 2.277 usaha. Kategori usaha ini mencakup real estat yang dimiliki atau disewa dan kawasan pariwisata, serta real estat atas dasar balas jasa atau kontrak. Persebaran usaha di sektor usaha ini terutama dipengaruhi oleh keberadaan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Sehingga semakin besar keberadaan pusat bisnis dan pusat pemerintahan di suatu wilayah maka semakin tinggi pula jumlah usaha di sektor ini. Sebaran usaha dengan kategori ini paling banyak diusahakan di Palu, yaitu mencapai 1.334 usaha atau sekitar 59 persen. Sedangkan usaha real estat di kabupaten lainnya cukup kecil, yaitu masing-masing dibawah 7 persen dari total usaha real estat di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.28
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori L
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016

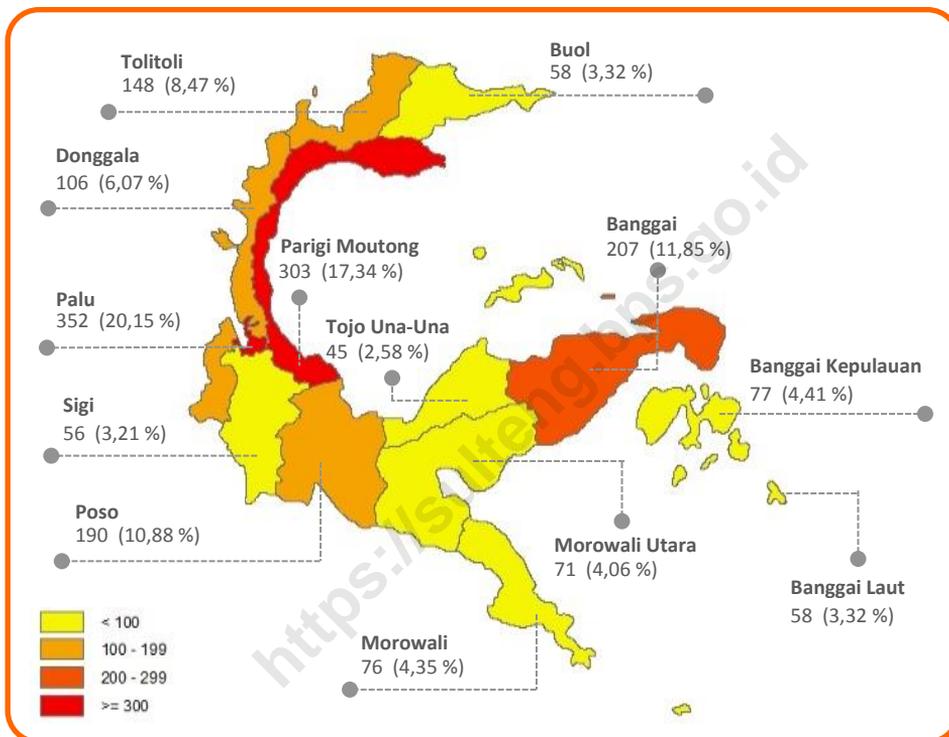


Usaha aktivitas keuangan dan asuransi (kategori K) merupakan sektor usaha paling sedikit yang diusahakan di Sulawesi Tengah, yaitu hanya mencapai 1.747 usaha. Kategori usaha ini mencakup aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, aktivitas asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib, serta aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun. Persebaran usaha di sektor usaha ini terutama dipengaruhi oleh persebaran penduduk serta kemampuan ekonominya. Sehingga semakin tinggi penduduk serta kemampuan ekonominya di suatu wilayah maka semakin tinggi pula jumlah usaha di sektor ini.

Sebaran usaha dengan kategori ini paling banyak diusahakan di Palu, yaitu mencapai 352 usaha atau sekitar 20 persen. Usaha aktivitas keuangan dan asuransi terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 303 usaha atau sekitar 17 persen. Sebaran usaha aktivitas keuangan dan asuransi juga

cukup banyak dijumpai di Banggai dan Poso, masing-masing sebesar 207 usaha atau sekitar 12 persen dan 190 usaha atau 11 persen dari total usaha jasa perusahaan di Sulawesi Tengah.

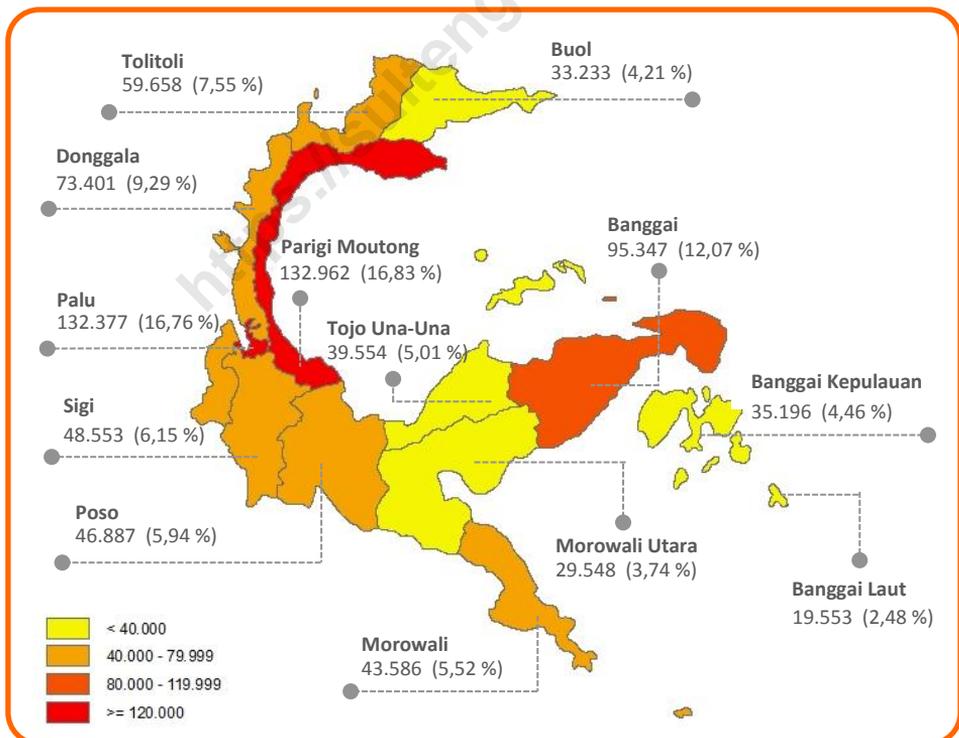
Gambar 2.29
Jumlah dan Persentase Usaha/Perusahaan Kategori K
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



C. Persebaran Tenaga Kerja

Jumlah usaha di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 yang sebesar 343.705 unit menyerap tenaga kerja sebesar 789.855 dan menyebar di 13 kabupaten/kota. Persebaran tenaga kerja yang paling banyak berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 132.962 orang atau sekitar 17 persen dari jumlah tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja terbanyak kedua ada di Kota Palu, yaitu sebesar 132.377 orang (17 persen). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai dan Kabupaten Donggala, dengan jumlah tenaga kerja masing-masing 12 persen dan 9 persen dari jumlah tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Sedangkan persebaran tenaga kerja di kabupaten lainnya sekitar 2 sampai 8 persen.

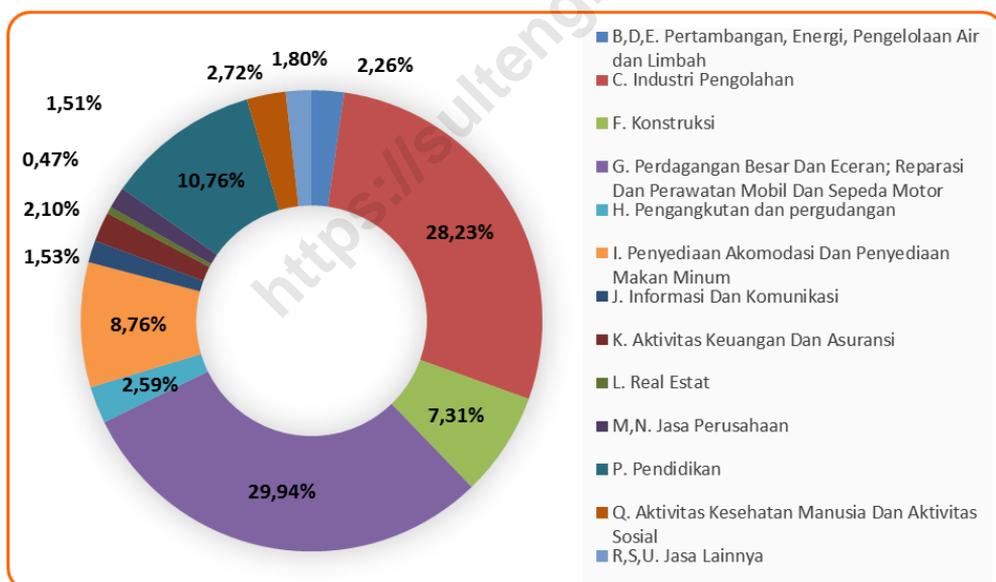
Gambar 2.30
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Jika dilihat persebaran menurut kategori lapangan usaha, maka jenis usaha di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 yang paling banyak menyerap tenaga kerja

adalah usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Kategori G), yaitu sekitar 30 persen dari total tenaga kerja. Usaha selanjutnya yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha industri pengolahan (Kategori C), yaitu sekitar 28 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha ketiga yang banyak menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah adalah usaha pendidikan (Kategori P), yaitu sekitar 11 persen dari total tenaga kerja. Usaha lain yang relatif banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, masing-masing menyerap tenaga kerja sekitar 9 persen dan 7 persen dari total tenaga kerja. Sedangkan usaha-usaha yang lain tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja, masing-masing usaha tersebut hanya memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja di bawah 3 persen.

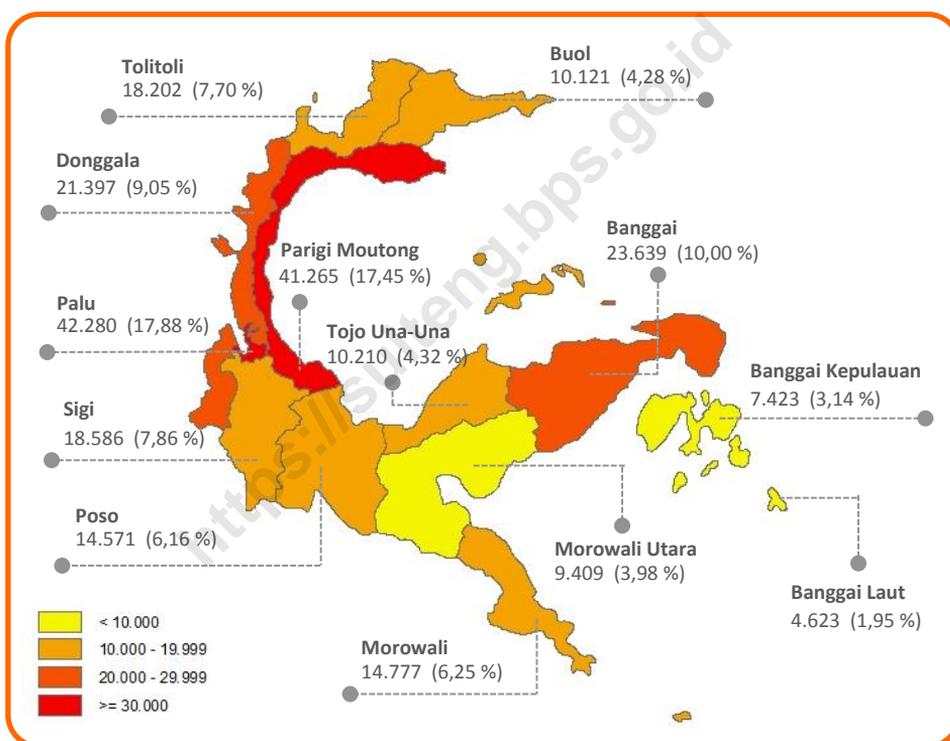
Gambar 2.31
Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah, Tahun 2016



Perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G) merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 236.503 orang atau sekitar 30 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh sektor ini berbanding lurus dengan jumlah usahanya. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 42.280 orang atau

sekitar 18 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori G terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu sebesar 41.265 orang atau sekitar 17 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 23.639 orang atau sekitar 12 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori G di Sulawesi Tengah.

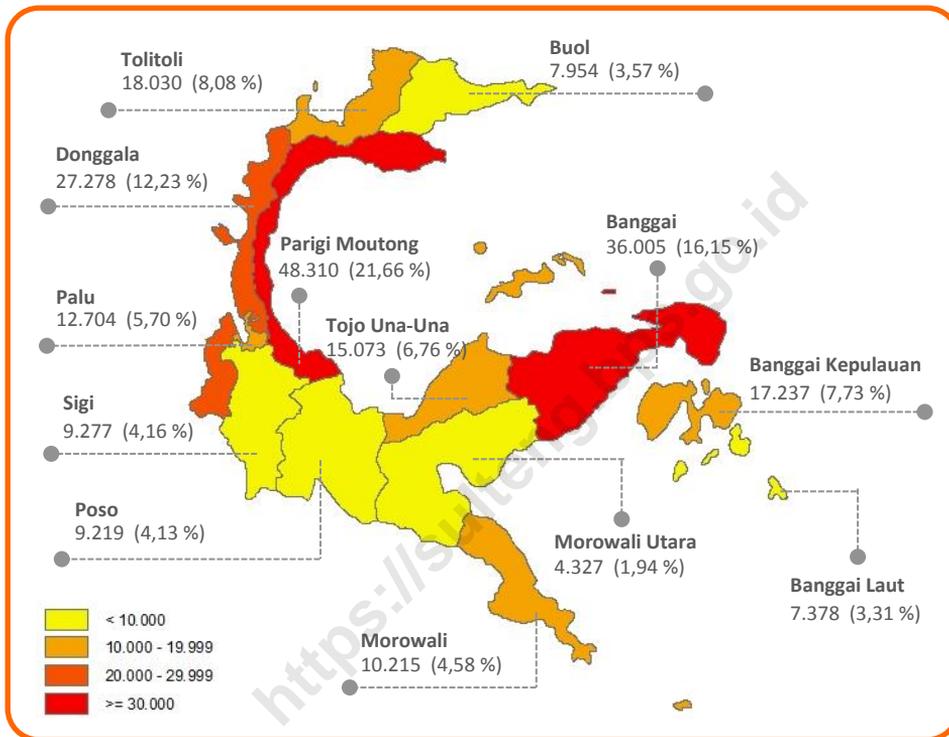
Gambar 2.32
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori G
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Industri Pengolahan (kategori C) merupakan lapangan usaha terbanyak kedua yang menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 223.007 orang atau sekitar 28 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Parigi Moutong, yaitu mencapai 48.310 orang atau sekitar 22 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja usaha kategori C terbanyak kedua berada di Banggai, yaitu 36.005 orang (16 persen). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Donggala, dengan

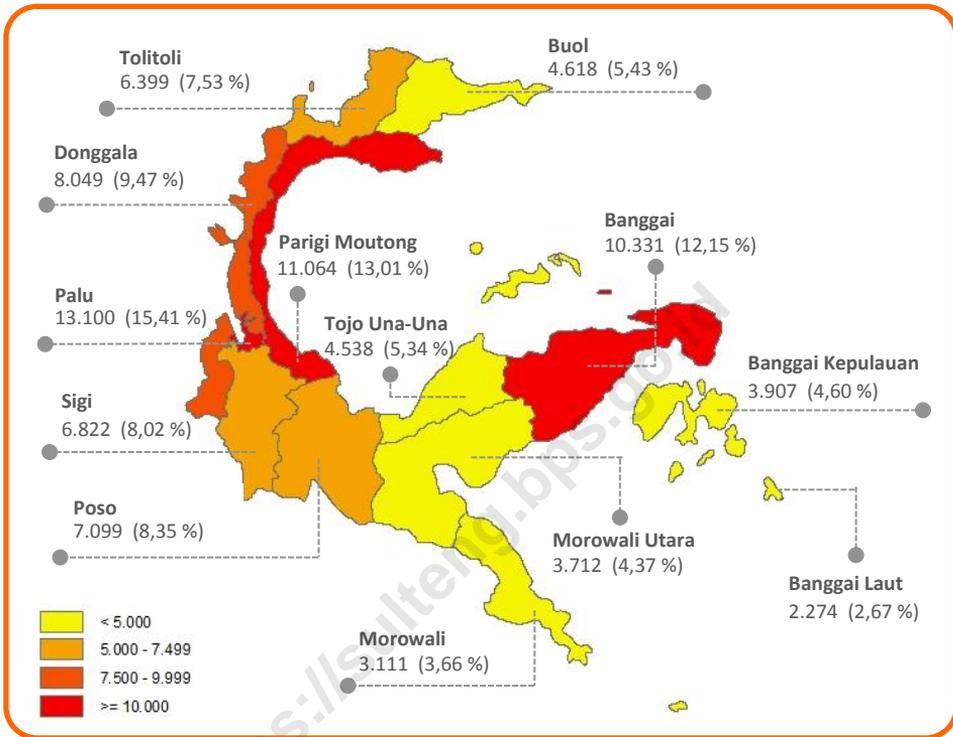
jumlah tenaga kerja sebesar 27.278 orang atau sekitar 12 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori C di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.33
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori C
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



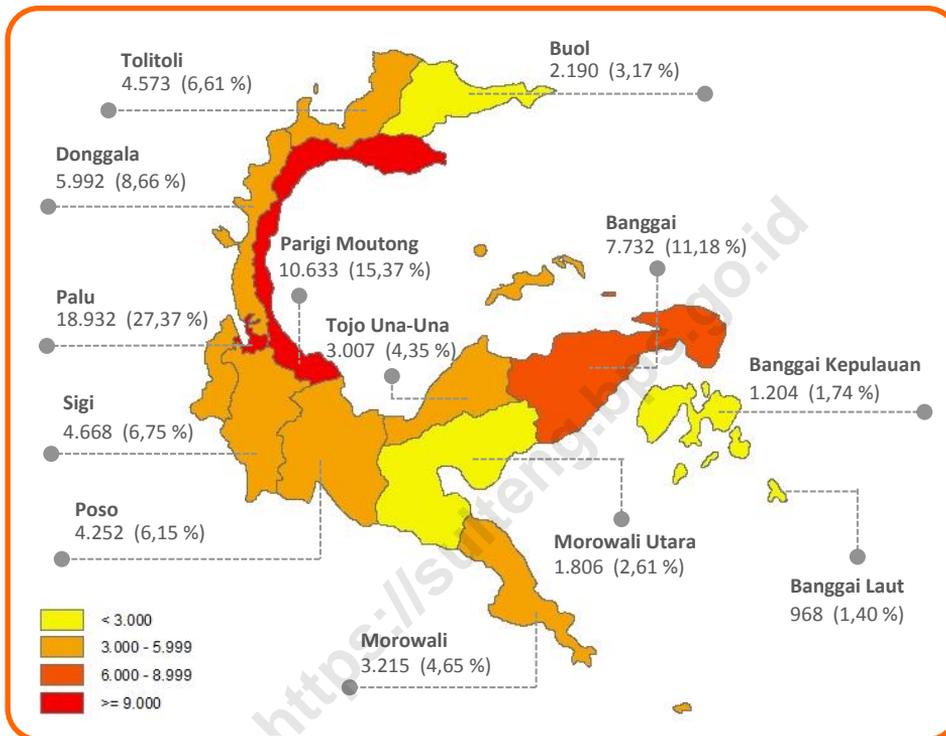
Usaha Pendidikan (kategori P) merupakan lapangan usaha terbanyak ketiga yang menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 85.024 orang atau sekitar 11 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 13.100 orang atau sekitar 15 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori P terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu sebesar 11.064 orang atau sekitar 13 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 10.331 orang atau sekitar 12 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori P di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.44
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori P
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



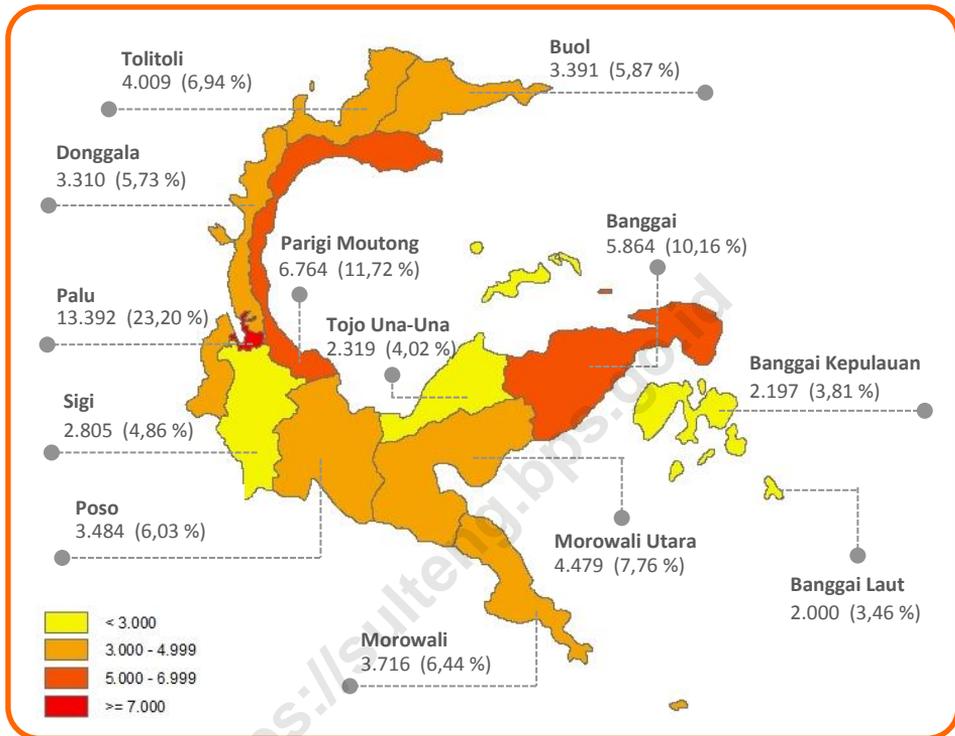
Usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (kategori I) merupakan lapangan usaha terbanyak keempat yang menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 69.172 orang atau sekitar 9 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 18.932 orang atau sekitar 27 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori I terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu sebesar 10.633 orang atau sekitar 15 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 7.732 orang atau sekitar 11 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori I di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.35
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori I
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



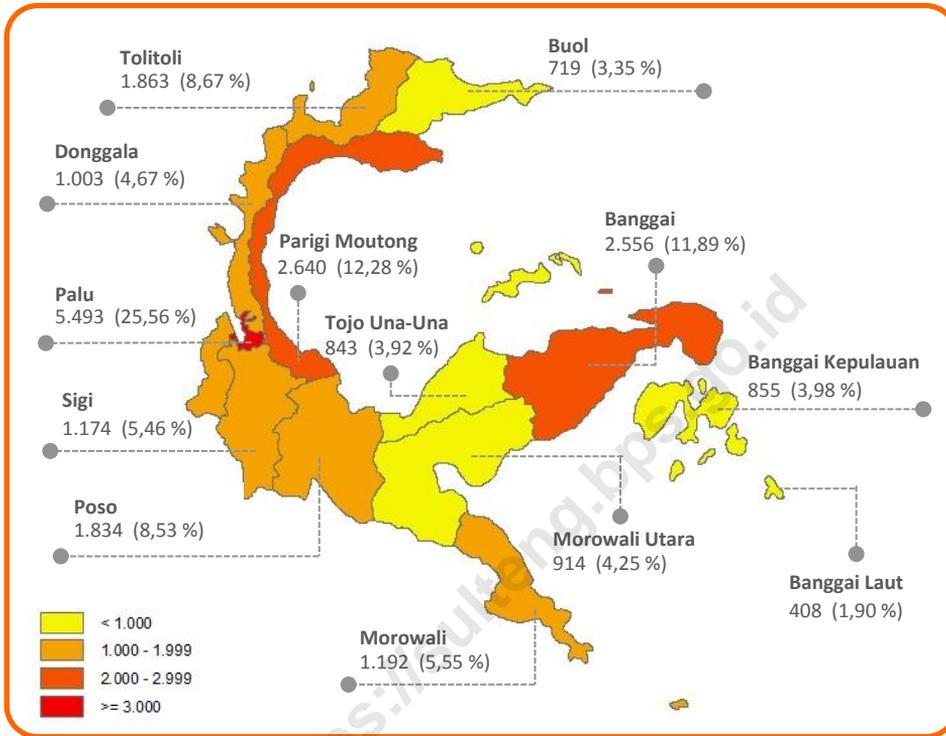
Usaha konstruksi (kategori F) merupakan lapangan usaha terbanyak kelima yang menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 57.730 orang atau sekitar 7 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 13.392 orang atau sekitar 23 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori F terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu sebesar 6.764 orang atau sekitar 12 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 5.864 orang atau sekitar 10 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori F di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.36
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori F
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



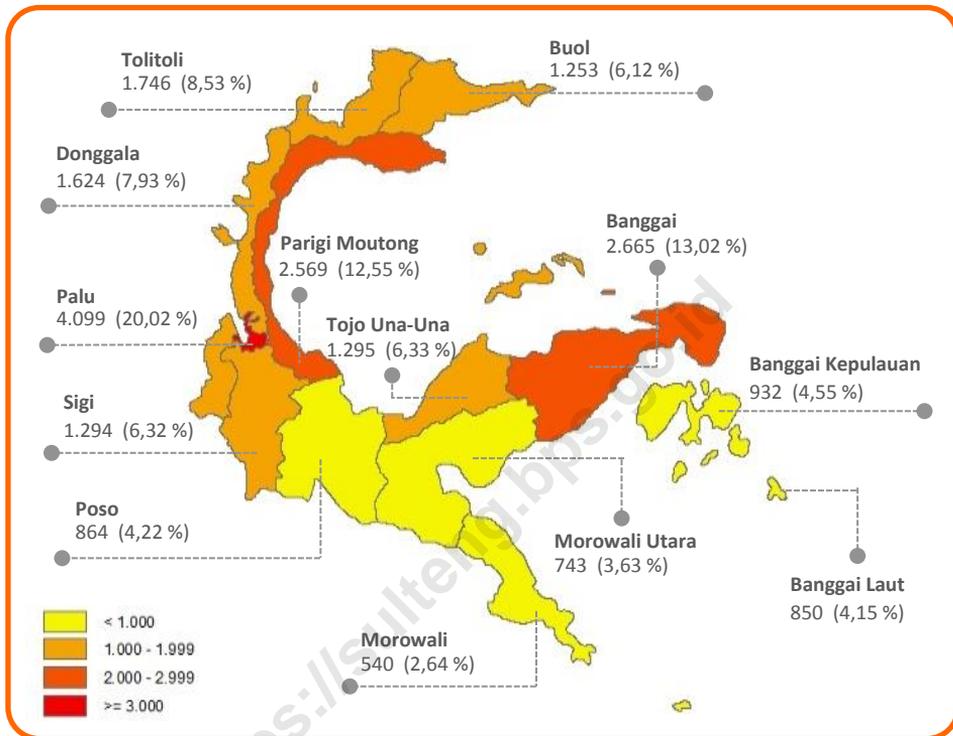
Usaha aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial (kategori Q) merupakan lapangan usaha terbanyak keenam yang menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 21.494 orang atau sekitar 3 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 5.493 orang atau sekitar 26 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori Q terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu sebesar 2.640 orang atau sekitar 12 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 2.556 orang atau sekitar 12 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori Q di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.37
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori Q
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



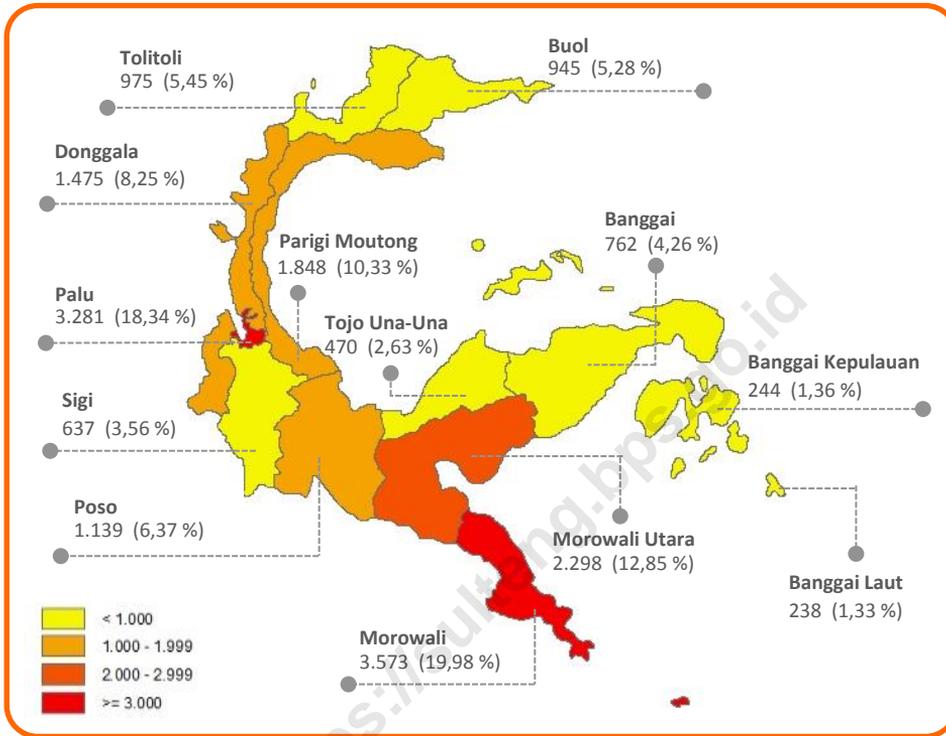
Usaha pengangkutan dan pergudangan (kategori H) merupakan lapangan usaha terbanyak ketujuh yang menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 20.474 orang atau sekitar 3 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 4.099 orang atau sekitar 20 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori H terbanyak kedua berada di Banggai, yaitu sebesar 2.665 orang atau sekitar 13 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Parigi Moutong, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 2.569 orang atau sekitar 13 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori H di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.38
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori H
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



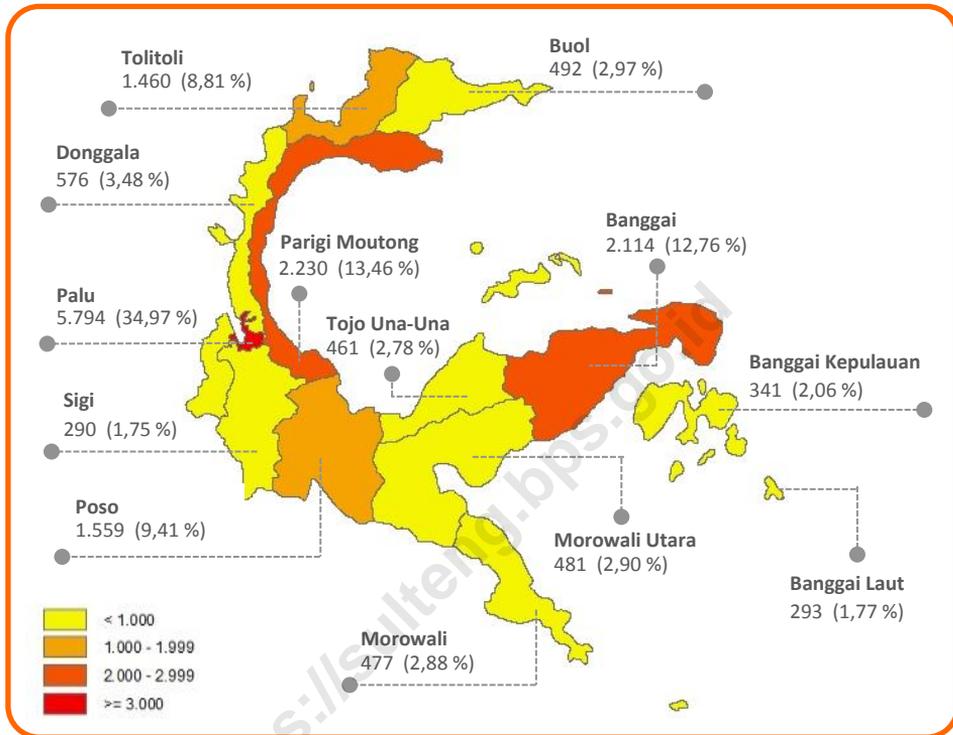
Usaha pertambangan, energi, pengelolaan air dan limbah (kategori B, D, E) merupakan lapangan usaha terbanyak kedelapan yang menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 17.885 orang atau sekitar 2 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Morowali, yaitu mencapai 3.573 orang atau sekitar 20 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori B, D, dan E terbanyak kedua berada di Palu, yaitu sebesar 3.281 orang atau sekitar 18 persen. Tenaga kerja pada kategori ini juga cukup banyak berada di Morowali Utara dan Parigi Moutong, masing-masing sebesar 2.298 orang atau sekitar 13 persen dan 1.848 orang atau sekitar 10 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori B, D, dan E di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.39
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori B, D, E
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



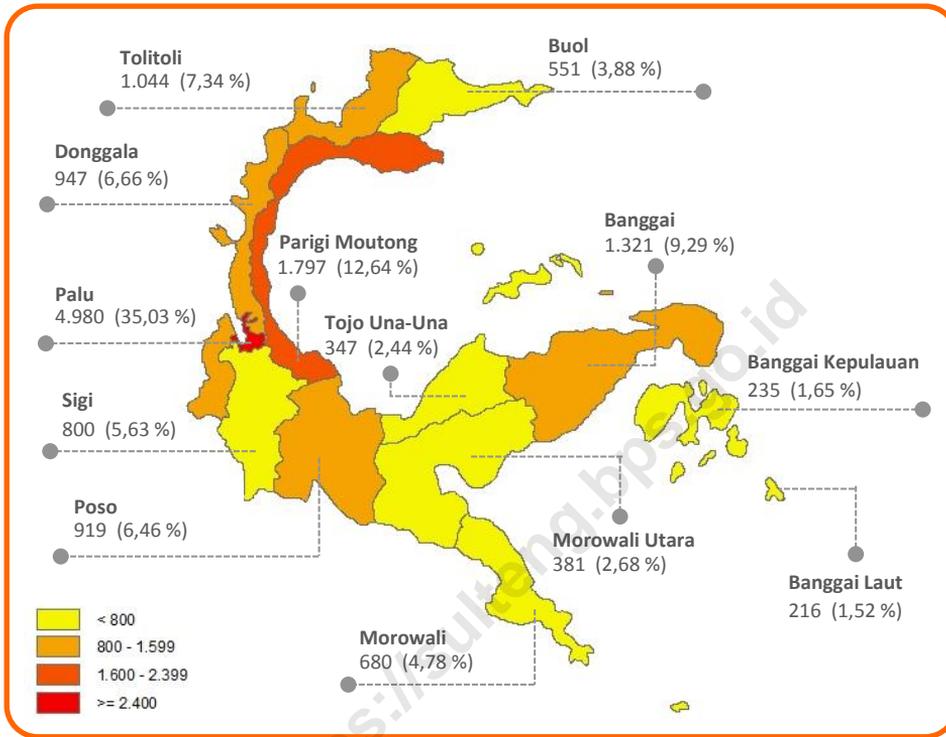
Usaha aktivitas keuangan dan asuransi (kategori K) merupakan lapangan usaha terbanyak kesembilan yang menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 16.568 orang atau sekitar 2 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 5.794 orang atau sekitar 35 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori K terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu sebesar 2.230 orang atau sekitar 13 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 2.114 orang atau sekitar 13 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori K di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.40
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori K
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



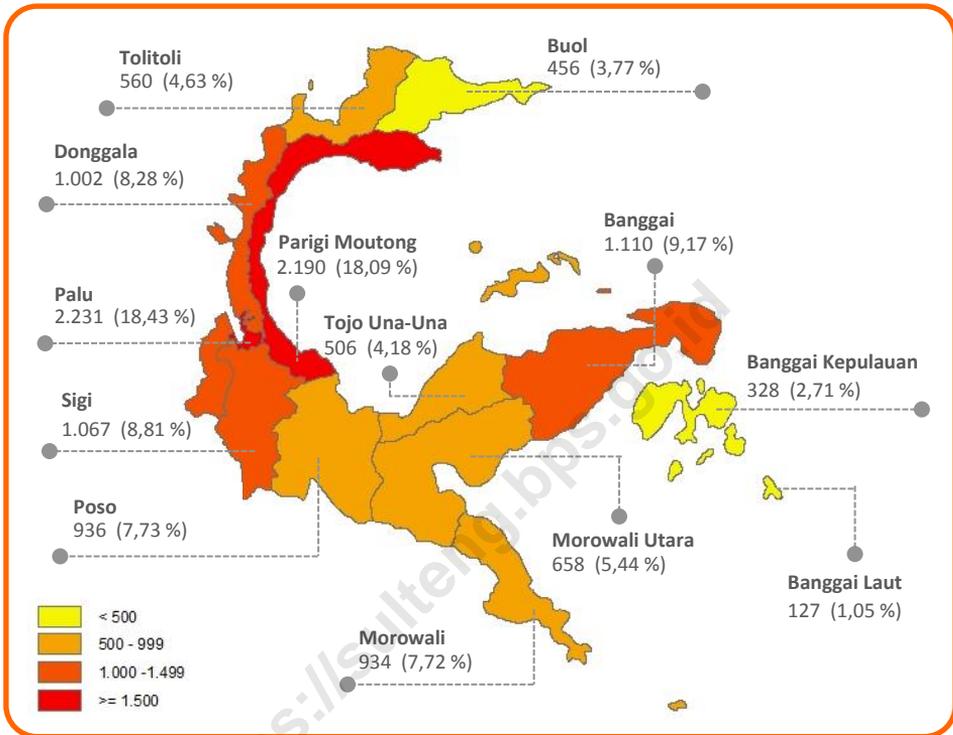
Usaha jasa lainnya (kategori R, S, U) merupakan lapangan usaha terbanyak kesembilan yang menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini menyerap tenaga kerja sebanyak 14.218 orang atau sekitar 2 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 4.980 orang atau sekitar 35 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori R, S, dan U terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu sebesar 1.797 orang atau sekitar 13 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.321 orang atau sekitar 9 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori R, S, dan U di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.41
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori R, S, U
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



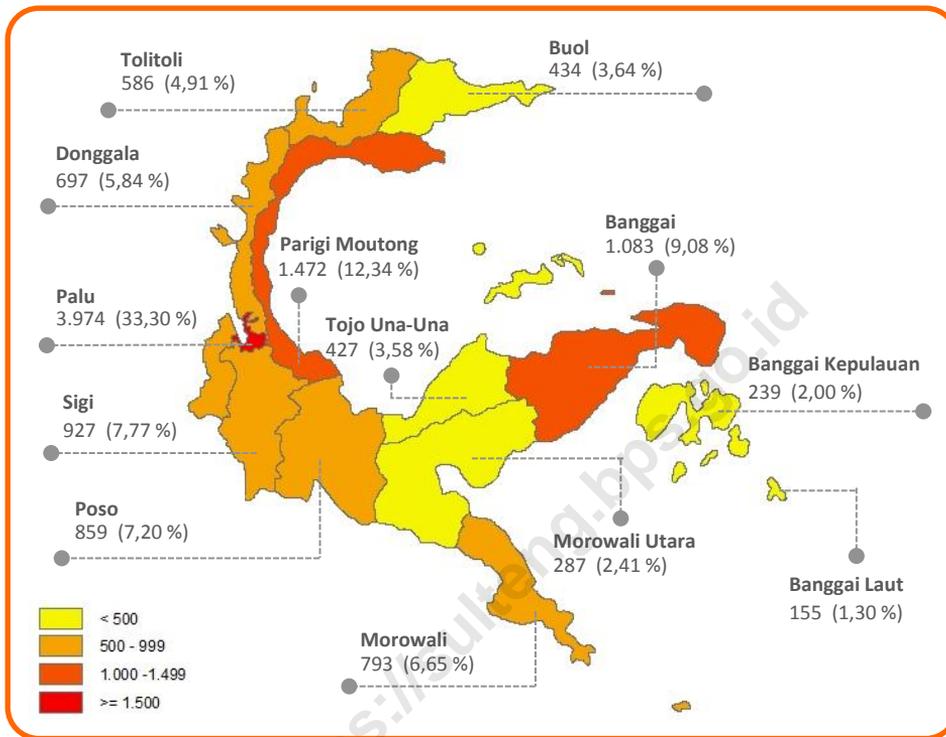
Usaha informasi dan komunikasi (kategori J) merupakan lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terkecil ketiga di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 12.105 orang atau sekitar 2 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 2.231 orang atau sekitar 18 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori J terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu sebesar 2.190 orang atau sekitar 18 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.110 orang atau sekitar 9 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori J di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.42
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori J
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



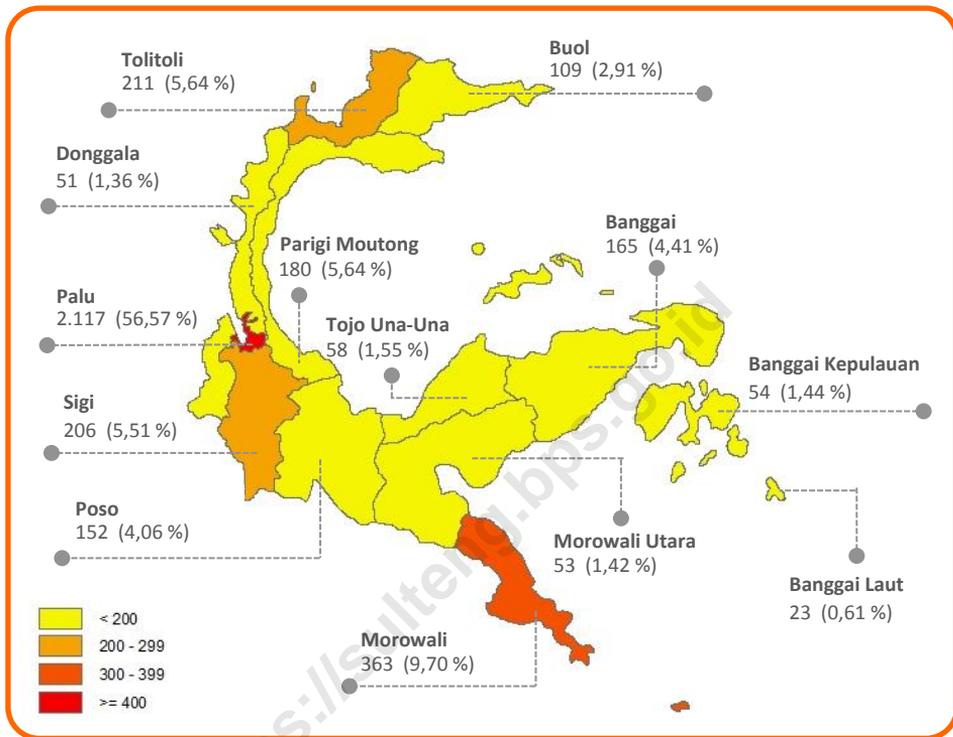
Usaha jasa perusahaan (kategori M, N) merupakan lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terkecil kedua di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 11.933 orang atau sekitar 2 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 3.974 orang atau sekitar 33 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori M dan N terbanyak kedua berada di Parigi Moutong, yaitu sebesar 1.472 orang atau sekitar 12 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.083 orang atau sekitar 9 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori M dan N di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.43
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori M, N
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Usaha real estat (kategori L) merupakan lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja paling kecil di Sulawesi Tengah. Usaha pada kategori ini hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 3.742 orang atau sekitar 0,5 persen dari total tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Persebaran tenaga kerja pada kategori ini yang paling banyak berada di Palu, yaitu mencapai 2.117 orang atau sekitar 57 persen dari total tenaga kerja pada kategori ini di Sulawesi Tengah. Jumlah tenaga kerja pada usaha kategori L terbanyak kedua berada di Morowali, yaitu sebesar 363 orang atau sekitar 10 persen dari jumlah tenaga kerja pada usaha dengan kategori M dan N di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.44
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Kategori L
menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Bab

3



Potensi Usaha

Potensi Usaha

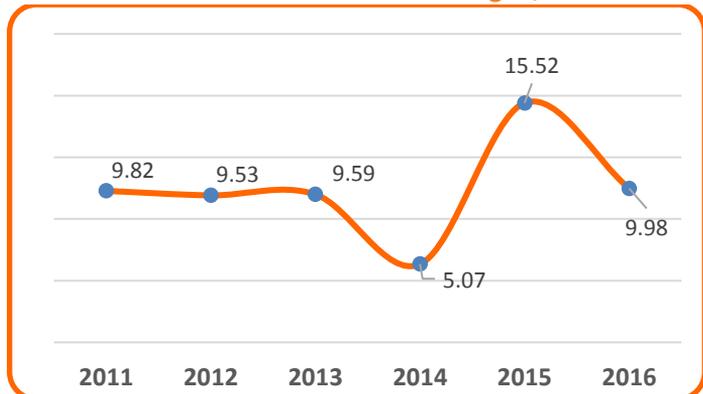
A. Penggerak Utama Perekonomian Sulawesi Tengah

Perekonomian Sulawesi Tengah beberapa tahun terakhir menunjukkan trend yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan PDRB atau pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sebagian besar unit usaha di Sulawesi Tengah. Selama 6 tahun terakhir (2011-2016) pertumbuhan ekonomi di provinsi ini dikategorikan tinggi, dengan 5 tahun diantaranya pertumbuhan ekonominya mencapai di atas 9 persen. Hal tersebut didukung dengan tingginya eksplorasi hasil tambang berupa gas alam dan biji nikel beserta dengan industri pengolahannya. Selain hal tersebut, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga merupakan keberhasilan terkait dengan pembangunan infrastruktur, kemampuan dalam menarik investor, kemampuan dalam menumbuhkan sektor industri, serta kemampuan pengusaha dalam pengelolaan usaha mereka yang berimbas pada peningkatan nilai tambah pada sebagian besar usaha di Sulawesi Tengah.

Secara kuantitas, aktivitas ekonomi sebagai penggerak utama perekonomian di Sulawesi Tengah adalah 3 usaha dengan struktur usaha G, C, I. Ketiga usaha (kategori G, C, I) tersebut menguasai sekitar 82 persen dari total usaha di Sulawesi Tengah

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah, 2011-2016



Secara kuantitas, aktivitas ekonomi sebagai penggerak utama perekonomian di Sulawesi Tengah adalah 3 usaha dengan struktur usaha G, C, I, yaitu usaha di sektor perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G) sebagai usaha terbanyak, industri pengolahan (kategori C) sebagai usaha terbanyak kedua, serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (kategori I) sebagai usaha terbanyak ketiga. Ketiga usaha (kategori G, C, I) tersebut menguasai sekitar 82 persen dari total usaha di Sulawesi Tengah, yaitusebesar 281.909 unit usaha.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota maka ketiga sektor usaha tersebut juga merupakan usaha yang dominan. Sedangkan menurut struktur usaha dari 3 aktivitas ekonomi utama tersebut maka kabupaten/kota terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kabupaten dengan struktur usaha G, C, I seperti pola di tingkat Sulawesi Tengah. Kabupaten dengan struktur ekonomi utama G, C, I adalah Kabupaten Banggai, Morowali, Poso, Donggala, Tolitoli, Buol, Parigi Moutong, Sigi, dan Morowali Utara, dengan kontribusi terhadap total usaha bervariasi antara 73 – 87 persen.

Kedua, kabupaten dengan struktur usaha C, G, I, yaitu kabupaten dengan usaha di sektor industri pengolahan (kategori C) sebagai usaha terbanyak, selanjutnya usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G) sebagai usaha terbanyak kedua, serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (kategori I) sebagai usaha terbanyak ketiga. Kabupaten dengan struktur usaha C, G, I adalah Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, dan Banggai Laut dengan kontribusi terhadap total usaha bervariasi antara 81 – 86 persen.

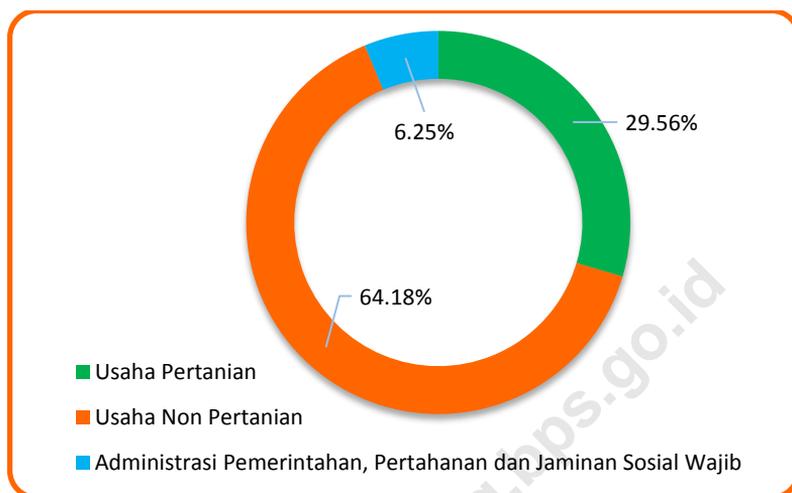
Ketiga, kabupaten dengan struktur usaha G, I, C, yaitu kabupaten dengan usaha di sektor perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G) sebagai usaha terbanyak, selanjutnya usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (kategori I) sebagai usaha terbanyak kedua, serta usaha industri pengolahan (kategori C) terbanyak ketiga. Kabupaten dengan struktur usaha G, I, C hanya Kota Palu, dengan kontribusi sekitar 76 persen terhadap total usaha.

Tabel 3.1
Struktur 3 Usaha Utama menurut
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Kode KBLI dan Urutan 3 Usaha Utama	Jumlah 3 Usaha Utama	Persentase Jumlah 3 Usaha Utama terhadap Total Usaha
1	Banggai Kepulauan	C, G, I	14 727	85,66
2	Banggai	G, C, I	34 332	83,61
3	Morowali	G, C, I	14 090	82,78
4	Poso	G, C, I	16 807	79,93
5	Donggala	G, C, I	32 200	86,76
6	Tolitoli	G, C, I	21 680	83,87
7	Buol	G, C, I	11 388	78,40
8	Parigi Moutong	G, C, I	49 573	83,38
9	Tojo Una-Una	C, G, I	16 328	84,20
10	Sigi	G, C, I	18 796	80,29
11	Banggai Laut	C, G, I	7 364	81,43
12	Morowali Utara	G, C, I	9 443	75,84
13	Palu	G, I, C	35 181	76,21
	Sulawesi Tengah	G, C, I	281 909	82,02

Sedangkan secara kualitas, maka aktivitas ekonomi sebagai penggerak utama perekonomian dapat diukur melalui nilai tambah terbesar yang dihasilkan dari usaha tersebut. Nilai tambah dari semua usaha di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 mencapai 120,23 triliun rupiah. Nilai tambah tersebut tumbuh sebesar 9,98 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya jika dinilai atas dasar harga konstan tahun 2010. Jika dilihat dari strukturnya, perekonomian Sulawesi Tengah disumbang dari usaha pertanian sebesar 35,55 triliun rupiah atau sekitar 30 persen, dari usaha nonpertanian sebesar 77,17 triliun rupiah atau sekitar 64 persen, serta sekitar 6 persen dari administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Kontribusi nilai tambah usaha nonpertanian yang sekitar 64 persen tersebut tercipta dari aktivitas ekonomi 343.705 usaha selama tahun 2016.

Gambar 3.2
Struktur Nilai Tambah menurut Usaha Pertanian, Usaha Non Pertanian, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib di Sulawesi Tengah, 2016



Nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi non pertanian di Sulawesi Tengah digerakkan oleh 4 kategori usaha yang utama, yaitu usaha konstruksi (kategori F), usaha pertambangan, energi, pengelolaan air dan limbah (Kategori B, D, E), usaha industri pengolahan (Kategori C), serta usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Kategori G). Keempat usaha tersebut memberikan nilai tambah sebesar 55,18 triliun rupiah atau sekitar 72 persen dari total nilai tambah dari usaha nonpertanian.

Usaha dengan kategori konstruksi mencatatkan nilai tambah yang paling besar selama tahun 2016, yaitu sebesar 15,48 triliun rupiah dari 6.791 usaha konstruksi. Rata-rata nilai tambah pada usaha konstruksi mencapai 2,28 miliar rupiah per usaha. Nilai tambah yang dicakup oleh usaha konstruksi adalah nilai balas jasa pekerja dan keuntungan dari usaha tersebut. Selanjutnya usaha yang menyumbang nilai tambah terbesar kedua untuk usaha nonpertanian adalah usaha pertambangan, energi, serta pengelolaan air limbah. Usaha di sektor ini menyumbang nilai tambah sebesar 14,42 triliun rupiah yang bersumber dari 5.159 usaha. Rata-rata nilai tambah di sektor ini mencapai 2,79 miliar rupiah per usaha.

Usaha industri pengolahan juga memberikan nilai tambah yang cukup besar, yaitu 14,17 triliun rupiah yang bersumber dari 92.377 usaha. Secara rata-

rata, usaha di sektor ini memberikan kontribusi nilai tambah sebesar 154 juta rupiah per usaha. Usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berkontribusi membentuk nilai tambah sebesar 11 triliun rupiah yang berasal dari 145.199 usaha. Rata-rata nilai tambah pada usaha dengan kategori ini hanya mencapai 75,8 juta rupiah. Nilai tambah pada usaha ini berasal dari nilai balas jasa pekerja serta keuntungan usaha di sektor ini.

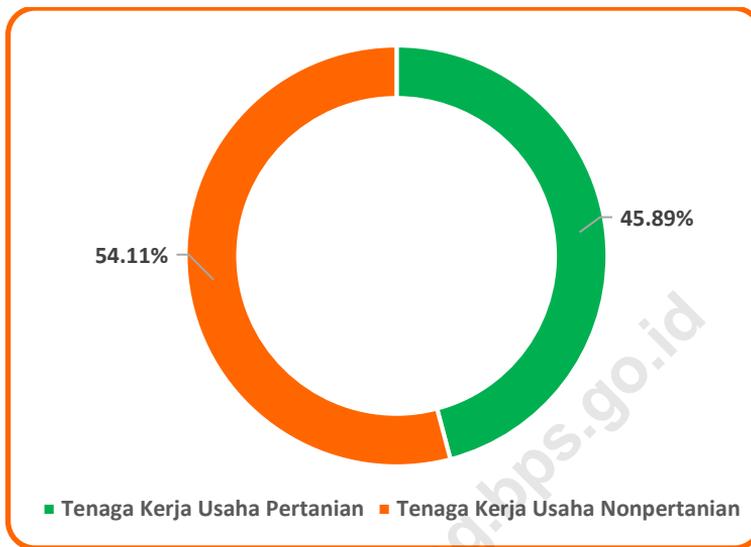
Tabel 3.2
Nilai Tambah Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha Non Pertanian di Sulawesi Tengah, ahun 2016

Kategori Lapangan Usaha	Jumlah Usaha	Nilai Tambah (Miliar rupiah)	Distribusi (persen)	Rata-rata Nilai Tambah per usaha (Juta rupiah)
B,D,E	5 159	14 420,47	18,69	2.795,2
C	92 377	14 269,30	18,49	154,5
F	6 791	15 479,34	20,06	2.279,4
G	145 199	11 008,80	14,27	75,8
H	13 156	4 666,05	6,05	354,7
I	44 333	636,75	0,83	14,4
J	8 167	3 823,84	4,96	468,2
K	1 747	2 845,35	3,69	1.628,7
L	2 277	2 233,96	2,89	981,1
M,N	4 586	310,84	0,40	67,8
P	8 693	4 750,82	6,16	546,5
Q	3 425	1 632,87	2,12	476,8
R,S,U	7 795	1 090,90	1,41	139,9
Usaha Non Pertanian	343 705	77 169,28	100,00	224,5

B. Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2016, jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah mencapai 1,5 juta orang. Dari total angkatan kerja tersebut sekitar 97 persen terserap bekerja pada berbagai lapangan usaha. Sebagian besar tenaga kerja di Sulawesi Tengah bekerja pada sektor nonpertanian yaitu sekitar 46 persen, dan selebihnya sekitar 54 persen bekerja pada berbagai lapangan usaha di sektor non pertanian.

Gambar 3.3
Struktur Tenaga Kerja menurut Usaha Pertanian dan Usaha Non Pertanian di Sulawesi Tengah, Agustus 2016



Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Sulawesi Tengah pada usaha nonpertanian berjumlah 789.855 orang yang bekerja pada 343.705 usaha. Dengan kata lain rata-rata setiap usaha hanya mampu menyerap sekitar 2 – 3 orang tenaga kerja. Jika dilihat menurut lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja pada masing-masing kategori cukup bervariasi antara 1 – 10 tenaga kerja per unit usaha. Unit usaha pada kategori pendidikan (Kategori P), aktivitas keuangan dan asuransi (kategori K), konstruksi (Kategori F), serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial (Kategori Q) mempunyai rata-rata penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi, yaitu antara 6 – 10 tenaga kerja per unit usaha.

Usaha pada kategori pendidikan merupakan usaha yang memiliki rata-rata penyerapan tenaga kerja paling tinggi, yaitu antara 9 – 10 tenaga kerja per unit usaha. Usaha pada kategori pendidikan ini kebanyakan adalah sekolah dari jenjang pra sekolah sampai perguruan tinggi. Kebutuhan tenaga kerja pendidik biasanya disesuaikan berdasarkan jumlah kelas atau jumlah mata pelajaran, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja pada usaha di kategori ini cukup besar. Selanjutnya usaha aktivitas keuangan dan asuransi adalah usaha dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja tertinggi kedua, yaitu antara 9 – 10 tenaga kerja per unit usaha. Usaha pada kategori ini seperti halnya usaha perbankan, usaha

asuransi, pegadaian, usaha pembiayaan (*leasing*) yang memang cukup banyak membutuhkan tenaga kerja dalam aktivitasnya.

Tabel 3.3
Jumlah Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, dan Rata-rata Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah, Tahun 2016

Kategori Lapangan Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Tenaga Kerja
B,D,E	5 159	17 885	3,47
C	92 377	223 007	2,41
F	6 791	57 730	8,50
G	145 199	236 503	1,63
H	13 156	20 474	1,56
I	44 333	69 172	1,56
J	8 167	12 105	1,48
K	1 747	16 568	9,48
L	2 277	3 742	1,64
M,N	4 586	11 933	2,60
P	8 693	85 024	9,78
Q	3 425	21 494	6,28
R,S,U	7 795	14 218	1,82
Total	343 705	789 855	2,30

Usaha lainnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha konstruksi. Penyerapan tenaga kerja pada kategori ini mencapai 8 – 9 tenaga kerja per unit usaha. Usaha konstruksi mencakup aktivitas membangun konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil (jalan, jembatan, rel, irigasi, dan lain sebagainya), serta konstruksi khusus yang cukup banyak membutuhkan tenaga kerja dalam kegiatannya. Usaha lain yang juga cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial. Usaha dengan kategori ini mampu menyerap tenaga kerja antara 6 – 7 orang per unit usaha. Usaha pada kategori ini mencakup aktivitas pelayanan kesehatan manusia (rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter, dan lain sebagainya), aktivitas sosial di dalam panti, serta aktivitas sosial di luar panti yang juga membutuhkan tenaga kerja relatif banyak.

Penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah utamanya diserap oleh usaha dengan struktur tenaga kerja G, C, P, yaitu penyerapan tenaga kerja terbanyak

pada usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G), selanjutnya usaha industri pengolahan (kategori C) sebagai usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua, serta penyerapan tenaga kerja terbanyak ketiga pada usaha di sektor pendidikan (kategori P). Ketiga jenis usaha (kategori G, C, P) tersebut menyerap sekitar 69 persen dari total tenaga kerja yang berusaha di sektor usaha non pertanian di Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 544.534 orang tenaga kerja.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota maka ketiga kategori usaha utama yang menyerap tenaga kerja cukup bervariasi. Terdapat 4 kelompok struktur dari 3 aktivitas ekonomi utama yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Pertama, kabupaten dengan struktur tenaga kerja C, G, P, yaitu penyerapan tenaga kerja terbanyak pada usaha industri pengolahan (kategori C), selanjutnya usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G) sebagai usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua, serta penyerapan tenaga kerja terbanyak ketiga pada usaha di sektor pendidikan (kategori P). Kabupaten dengan struktur tenaga kerja C, G, P adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, dan Banggai Laut.

Kedua, kabupaten dengan struktur tenaga kerja G, C, P, yaitu penyerapan tenaga kerja terbanyak pada usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G), selanjutnya usaha industri pengolahan (kategori C) sebagai usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua, serta penyerapan tenaga kerja terbanyak ketiga pada usaha di sektor pendidikan (kategori P). Kabupaten dengan struktur tenaga kerja G, C, P adalah Poso, Tolitoli, Buol, Sigi, dan Morowali Utara.

Ketiga, kabupaten dengan struktur tenaga kerja G, C, F, yaitu penyerapan tenaga kerja terbanyak pada usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G), selanjutnya usaha industri pengolahan (kategori C) sebagai usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua, serta penyerapan tenaga kerja terbanyak ketiga pada usaha di sektor konstruksi (kategori F). Kabupaten dengan struktur tenaga kerja G, C, F hanya kabupaten Morowali.

Keempat, kabupaten dengan struktur tenaga kerja G, F, P, yaitu penyerapan tenaga kerja terbanyak pada usaha perdagangan besar dan eceran serta usaha reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (kategori G),

selanjutnya usaha konstruksi (kategori F) sebagai usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua, serta penyerapan tenaga kerja terbanyak ketiga pada usaha di sektor pendidikan (kategori P). Kabupaten dengan struktur tenaga kerja G, F, P hanya Kota Palu. Kontribusi tenaga kerja G, F, P di Kota Palu mencapai sekitar 52 persen dari tenaga kerja usaha non pertanian.

Tabel 3.3
Tiga Lapangan usaha yang Menyerap Tenaga Kerja
Terbanyak Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tengah, Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Kode Lapangan Usaha yang Banyak Menyerap Tenaga Kerja	Tenaga Kerja yang Diserap	
			Jumlah	Persentase
1	Banggai Kepulauan	C, G, P	28 567	81,17
2	Banggai	C, G, P	69 975	73,39
3	Morowali	G, C, F	28 708	65,87
4	Poso	G, C, P	30 889	65,88
5	Donggala	C, G, P	56 724	77,28
6	Tolitoli	G, C, P	42 631	71,46
7	Buol	G, C, P	22 693	68,28
8	Parigi Moutong	C, G, P	100 639	75,69
9	Tojo Una-Una	C, G, P	29 821	75,39
10	Sigi	G, C, P	34 685	71,44
11	Banggai Laut	C, G, P	14 275	73,01
12	Morowali Utara	G, C, P	17 448	59,05
13	Palu	G, F, P	68 772	51,95
	Sulawesi Tengah	G, C, P	544 534	68,94

C. Potensi Ekonomi Sulawesi Tengah

Dalam rangka pengembangan wilayah berbasis ekonomi maka diperlukan pemetaan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Sehingga keunggulan komparatif antar wilayah menjadi menarik untuk dikaji, agar pemetaan potensi suatu kegiatan ekonomi di suatu wilayah menjadi lebih jelas. Dengan menakar potensi ekonomi di suatu wilayah merupakan langkah awal untuk mendapatkan produk yang dapat bersaing sekaligus akan meningkatkan pendapatan wilayah dan penduduknya.

Untuk mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah terdapat tiga metode, yaitu:

1. *Regional Account (Income - Expenditure) Approach* yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada sektor di suatu wilayah.
2. *Input - Output Approach* yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.
3. *Economic Base Approach* yaitu dengan mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sektor unggulan, sektor potensi, dan sektor bukan unggulan.

Hasil Sensus Ekonomi 2016 mampu menakar potensi ekonomi tersebut berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan tenaga kerja di luar sektor pertanian. Pengukuran potensi ekonomi yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan pendekatan *Economic Base Approach*. Teori ini didasarkan pada perkembangan peran sektor ekonomi, baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah.

Konsep dasar *economic base* terletak pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan ekspor di wilayah tersebut, sehingga mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah. Sektor-sektor yang kinerja ekspornya baik dan tumbuh pesat dikategorikan sebagai sektor unggulan (*base activities/sectors*). Analisis dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah dapat menggunakan metode *Location Quotient (LQ)* dan Tipologi Klassen. Dengan menggunakan metode *LQ* terhadap tenaga kerja per sektor maka dapat menggambarkan keunggulan komparatif untuk penyerapan tenaga kerja antar wilayah. Dengan menggunakan metode *LQ* terhadap nilai tambah bruto yang dihasilkan per sektor maka dapat dilihat keunggulan komparatif tentang nilai tambah yang dihasilkan per sektor antar wilayah. Sedangkan dengan tipologi Klassen maka dapat dilihat potensi ekonomi dengan pendekatan pertumbuhan nilai tambah bruto beserta kontribusinya terhadap perekonomian di suatu wilayah.

Dengan menerapkan kedua metode tersebut dalam pengukuran potensi keunggulan sektoral antar wilayah, maka didapatkan kelompok struktur perekonomian sebagai berikut:

- a. Sektor Unggulan, yaitu sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam menghasilkan nilai tambah bruto, serta memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dan mempunyai pertumbuhan yang pesat.
- b. Sektor Potensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan (Potensi 1), yaitu sektor yang memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan nilai tambah bruto, serta memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dan mempunyai pertumbuhan yang pesat.
- c. Sektor Potensi dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi, dan pertumbuhan (Potensi 2), yaitu sektor yang memiliki keunggulan komparatif dalam penyerapan tenaga kerja serta memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dan mempunyai pertumbuhan yang pesat.

Berdasarkan hasil pemetaan yang termasuk potensi ekonomi menurut kategori usaha dan kelompok struktur perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah
 - Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Morowali.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Banggai.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Morowali Utara.
2. Industri Pengolahan
 - Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Banggai.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Morowali.
3. Konstruksi
 - Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Morowali Utara.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Poso.

4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Poso, Tolitoli, Parigi Moutong, dan Sigi.
5. Pengangkutan dan Pergudangan
 - Sektor ini menjadi sektor unggulan di Tolitoli, Buol, dan Kota Palu.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Poso.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Banggai Laut.
6. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
 - Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Poso dan Kota Palu.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Tolitoli, Parigi Moutong, Tojo Una-Una.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Sigi.
7. Informasi dan Komunikasi
 - Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kota Palu.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Poso
8. Aktivitas Keuangan dan Asuransi
 - Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Poso, dan Tolitoli.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sigi, dan Banggai Laut.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi, dan pertumbuhan di Kota Palu.
9. Real Estat
 - Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kota Palu.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sigi, dan Banggai Laut.
 - Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Tolitoli.

10. Jasa Perusahaan

- Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kota Palu.

11. Pendidikan

- Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Poso, Buol, Tojo Una-Una, Sigi, dan Banggai Laut.
- Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Tolitoli, dan Kota Palu.

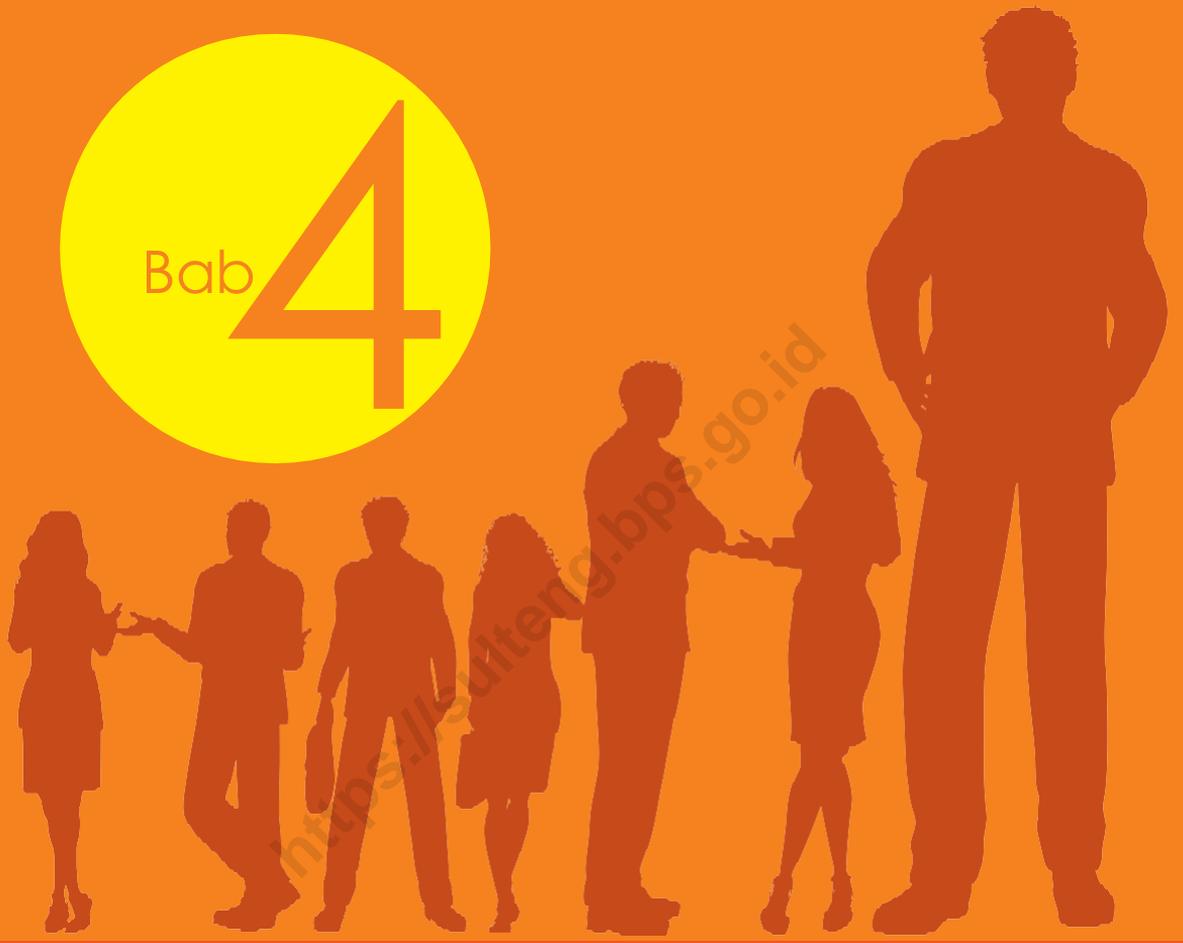
12. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial

- Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Poso, Tolitoli, dan Kota Palu.
- Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Buol, Tojo Una-Una, Sigi, dan Banggai Laut.

13. Jasa Lainnya

- Sektor ini menjadi sektor unggulan di Kabupaten Poso.
- Sektor ini menjadi sektor yang berpotensi dari sisi pembentukan nilai tambah, kontribusi, dan pertumbuhan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Parigi Moutong, dan Banggai Laut.

Bab **4**



Karakteristik Usaha

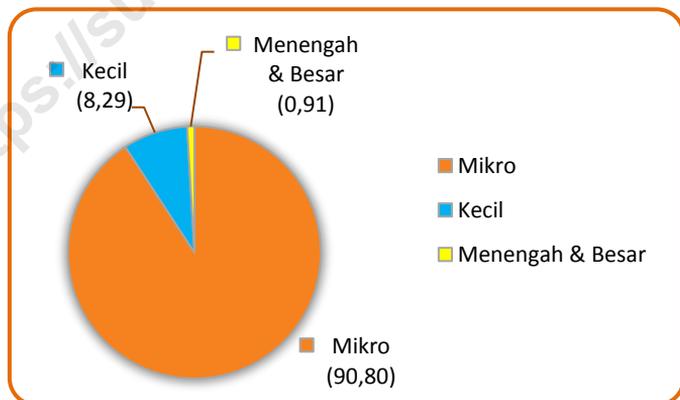
Karakteristik Usaha

A. Potensi Usaha Mikro Kecil dalam Perekonomian

Berdasarkan skala usaha, jumlah usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah sangat didominasi oleh usaha skala mikro. Dari 343.705 usaha/perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah pada tahun 2016, sebanyak 90,80 persen merupakan usaha berskala mikro dan 8,29 persen berskala kecil, sedangkan sisanya 0,91 persen berskala menengah dan besar. Apabila dijumlah, sebanyak 99,09 persen usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Gambar 4.1

Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha di Sulawesi Tengah 2016



Potensi UMK yang sangat besar ini sewajarnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung perekonomian di Sulawesi Tengah. UMK merupakan usaha yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nilai tambah yang dihasilkan oleh UMK ini langsung dinikmati oleh masyarakat sehingga perkembangannya berimbas pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan skala usaha, jumlah usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah sangat didominasi oleh usaha skala mikro. Sebanyak 90,80 persen jumlah usaha/perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah merupakan usaha berskala mikro dan 8,29 persen berskala kecil, sedangkan sisanya 0,91 persen berskala menengah dan besar. Apabila dijumlah, sebanyak 99,09 persen usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Pengembangan UMK yang optimal selain berimbas pada kondisi perekonomian, juga akan mendukung perbaikan kondisi sosial di Sulawesi Tengah. Jumlah UMK yang sangat besar diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Tengah. Selain itu, UMK juga diharapkan dapat memberikan kontribusi

UMK juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan masalah sosial lainnya selain kemiskinan dan pengangguran, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, pembangunan yang tidak merata, dan masalah urbanisasi.

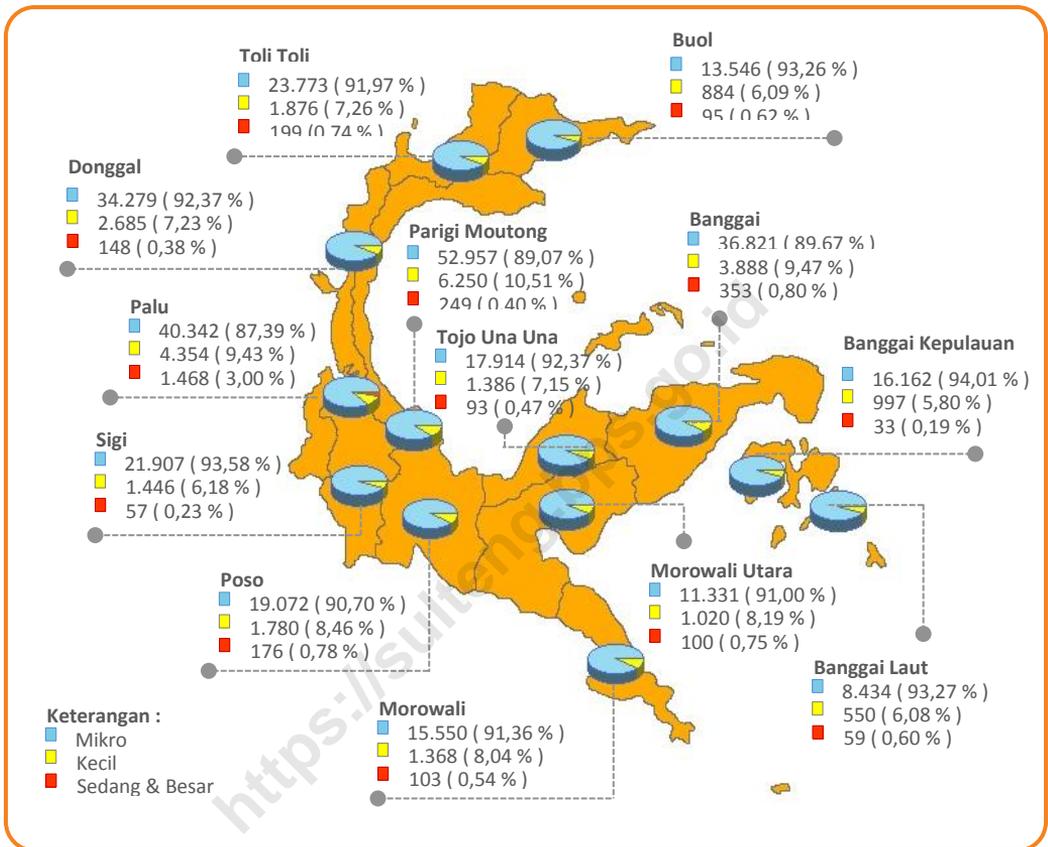
positif terhadap upaya penanggulangan masalah sosial lainnya selain kemiskinan dan pengangguran, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, pembangunan yang tidak merata, dan masalah urbanisasi.

Dari sisi perekonomian global, UMK juga terbukti lebih tahan terhadap guncangan krisis. Hal ini sudah terbukti di Indonesia ketika terjadi krisis pada periode 1997-1998 dan 2008-2009, UMK mampu berdiri kokoh. Pentingnya peran UMK tidak hanya berarti bagi perekonomian di perkotaan, akan tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perdesaan. UMK dapat memberikan pelayanan ekonomi secara meluas, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional (Bank Indonesia, 2015).

Kabupaten Parigi Moutong sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Tengah memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan perekonomian melalui UMK. Dari total 340.572 UMK yang ada di Sulawesi Tengah, sebesar 17,38 persen diantaranya berada di Kabupaten Parigi Moutong. Pada tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi kabupaten ini sebesar 5,57 persen, menempati posisi kesepuluh dari 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah. Padahal dari sisi jumlah usaha, kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah usaha terbanyak di Sulawesi Tengah. Secara tidak langsung, kondisi ini menggambarkan masih rendahnya produktivitas usaha yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan potensi 59 ribu unit UMK yang ada di kabupaten ini, diharapkan terus didorong produktivitasnya untuk mendorong perekonomian Kabupaten Parigi Moutong.

Gambar 4.2

Jumlah & Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha & Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah 2016



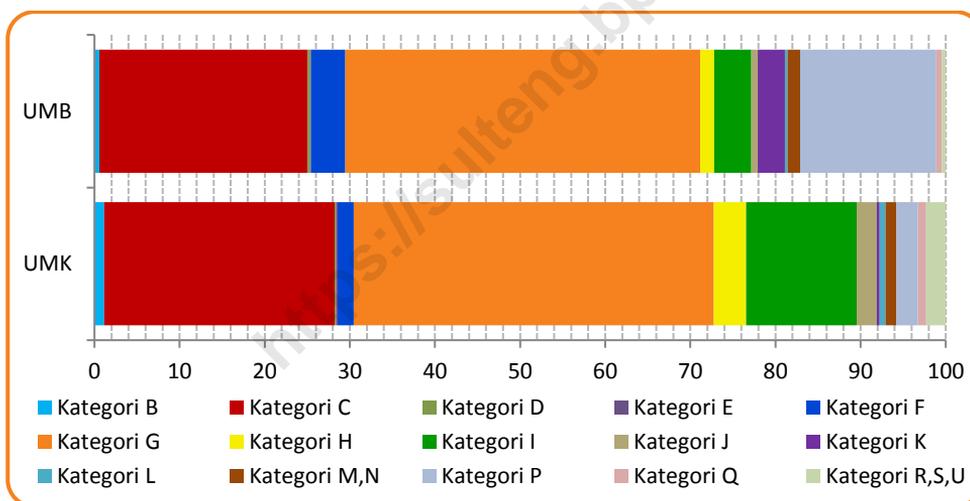
Sementara itu, jumlah Usaha Menengah Besar (UMB) di Sulawesi Tengah sebanyak 3.133 unit usaha/perusahaan dimana 1.468 unit diantaranya berada di Kota Palu atau sekitar 46,86 persen, hampir setengah dari jumlah UMB yang ada. Jumlah UMB yang hanya terfokus di Kota Palu dengan infrastruktur paling mendukung dibandingkan wilayah lain di Sulawesi Tengah ini menunjukkan adanya disparitas kondisi bisnis di Sulawesi Tengah. Masalah disparitas kondisi bisnis ini harus ditanggulangi untuk mendongkrak perekonomian wilayah-wilayah lain yang masih tertinggal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat dan mengidentifikasi keunggulan komparatif masing-masing wilayah agar kualitas daya saing dapat terjaga.

memperkuat dan mengidentifikasi keunggulan komparatif masing-masing wilayah agar kualitas daya saing dapat terjaga. Pembangunan berbasis sumber daya ekonomi lokal perlu digiatkan.

Dari sebanyak 3.133 UMB yang ada, tercatat lebih dari sepertiga atau 1.062 unit usaha/perusahaan bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Tidak hanya itu, dari sisi UMK juga menunjukkan kondisi yang sama. Sebanyak 144.137 unit usaha/perusahaan bergerak pada lapangan usaha tersebut dari total 340.572 UMK di Sulawesi Tengah. Hal ini karena lapangan usaha ini merupakan kategori usaha yang paling banyak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat selaku konsumen.

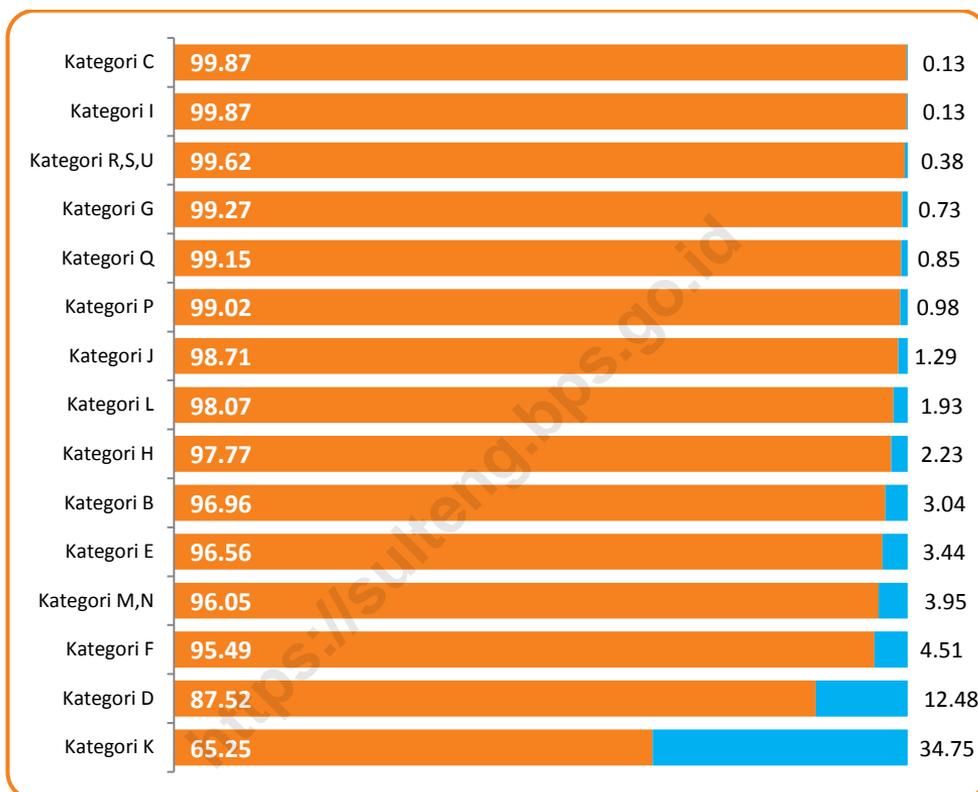
Gambar 4.3
Persentase UMK & UMB Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah 2016



Di masing-masing lapangan usaha, industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan dominasi UMK tertinggi. Industri pengolahan merupakan salah satu kontributor terbesar dalam perekonomian Sulawesi Tengah dimana industri pengolahan yang banyak berkontribusi merupakan UMB. Dalam PDRB Sulawesi Tengah, industri pengolahan menempati posisi ketiga dalam perekonomian dengan sumbangan nilai tambah sekitar 11,87 persen pada tahun 2016. UMB industri pengolahan yang hanya 0,13 persen dari total industri pengolahan yang ada telah mampu menjadi penopang perekonomian di Sulawesi Tengah. Apabila UMK industri pengolahan terus dikembangkan, maka perekonomian Sulawesi Tengah akan

berpotensi tumbuh semakin kuat. Begitu pula dengan lapangan usaha yang lain, terutama yang strategis dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah.

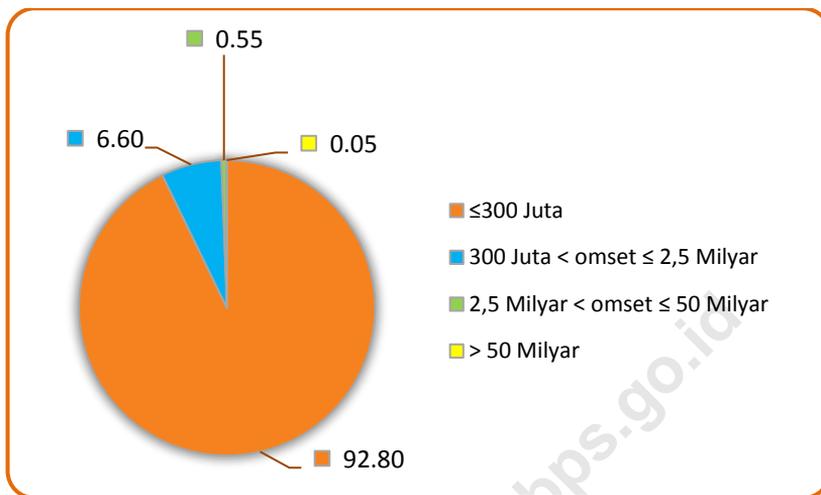
Gambar 4.4
Persentase UMK di setiap Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah 2016



B. Skala Omset

Melihat besarnya jumlah UMK dibandingkan dengan UMB, maka secara otomatis sebagian besar usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah masih memiliki nilai omset yang rendah. Dari 343 ribu jumlah usaha/perusahaan, 92,80 persen atau sebanyak 319 ribu usaha/perusahaan memiliki omset kurang dari atau sama dengan Rp300 juta per tahun.

Gambar 4.5
Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Nilai Omset di Sulawesi Tengah 2016



Seperti yang telah diketahui bahwa 99,09 persen usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah merupakan UMK dimana omset yang dihasilkan masih rendah. Meningkatkan omset UMK memang tidak mudah, banyak faktor yang mempengaruhi omset masing-masing usaha baik faktor eksternal maupun internal usaha/perusahaan itu sendiri. Namun, pengembangan UMK ini memang harus terus dilakukan mengingat era keterbukaan ekonomi menuntut para pengusaha untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan perekonomian global.

Besarnya potensi UMK di Sulawesi Tengah ini menuntut semua kalangan terkait, tidak hanya pelaku usaha, akan tetapi juga pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait pengembangan UMK ini. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan *skills* bagi pelaku usaha termasuk *skills* manajemen usaha, kemudahan akses finansial, dan beberapa masalah lain masih sering menjadi kendala pengembangan UMK.

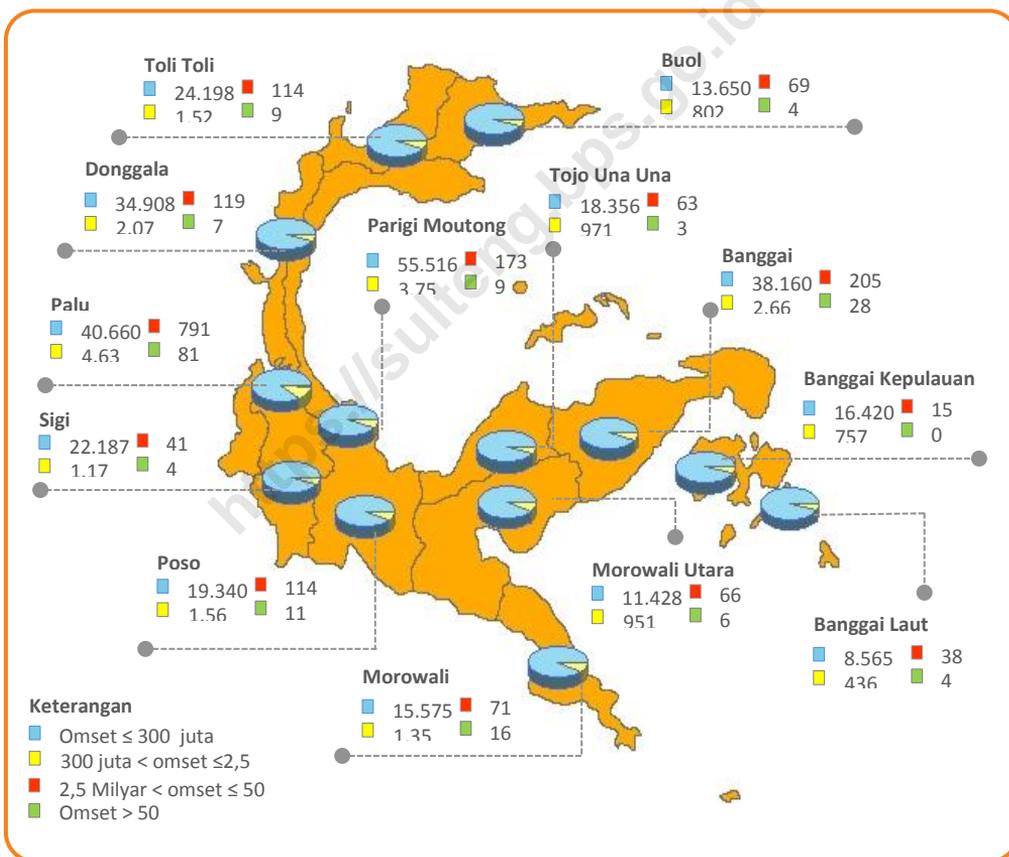
pengembangan UMK ini memang harus terus dilakukan mengingat era keterbukaan ekonomi menuntut para pengusaha untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan perekonomian global.

Persebaran usaha/perusahaan berdasarkan omset ini akan mengikuti persebaran UMK dan UMB yang ada. Seperti yang diketahui pada Gambar 4.2 bahwa jumlah UMB terbesar berada di Kota Palu dan jumlah UMK terbesar

berada di Kabupaten Parigi Moutong. Hal yang sama berlaku pada persebaran usaha/perusahaan menurut omset di Sulawesi Tengah ini.

Usaha/perusahaan dengan omset kurang dari sama dengan Rp300 juta per tahun paling banyak berada di Kabupaten Parigi Moutong karena banyaknya UMK di kabupaten tersebut, sedangkan usaha/perusahaan dengan omset di atas Rp50 Milyar paling banyak berada di Kota Palu sebagai pusat perekonomian Sulawesi Tengah (Gambar 4.5).

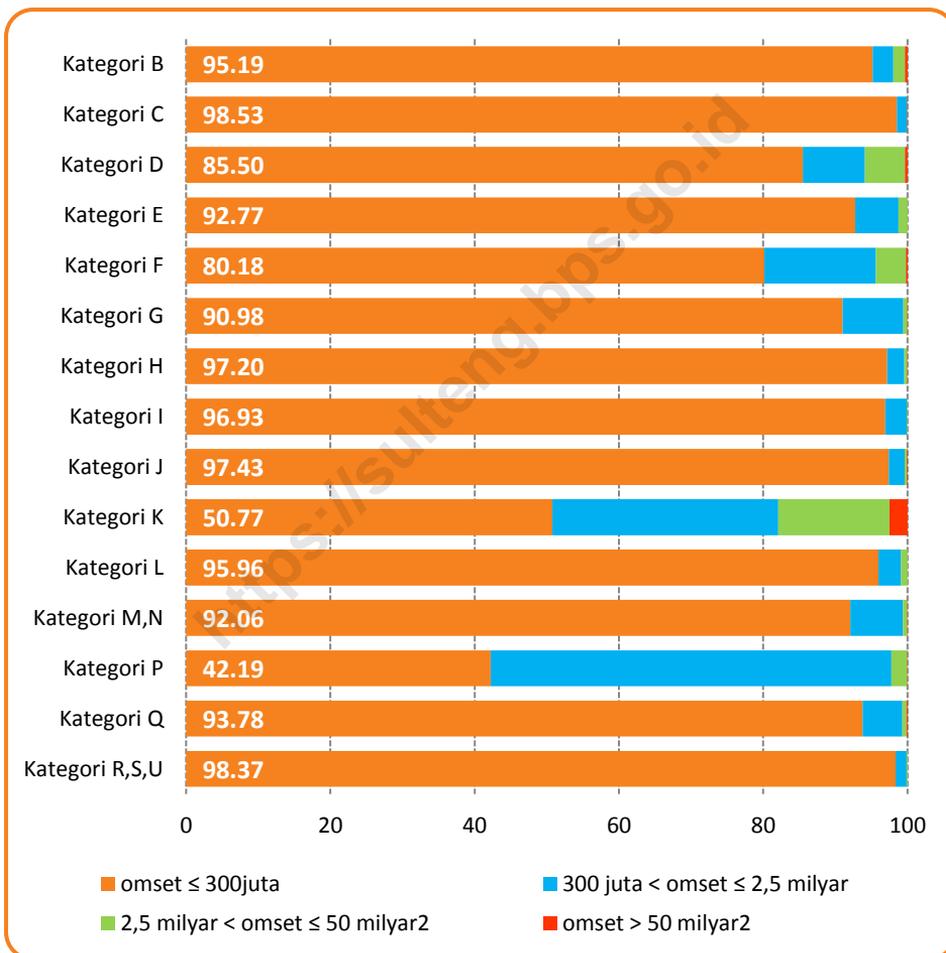
Gambar 4.6
Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Nilai Omset di Sulawesi Tengah 2016



Jika dirinci menurut lapangan usaha, industri pengolahan memiliki persentase usaha/perusahaan dengan omset kurang dari sama dengan Rp300 juta per tahun sekitar 98,53 persen, tertinggi dibandingkan lapangan usaha yang lain. Pola ini juga hampir sama dengan pola usaha/perusahaan menurut skala usaha karena skala usaha salah satunya didasarkan oleh omset yang diraih suatu

usaha/perusahaan. Sementara itu, persentase usaha dengan omset di atas Rp50 milyar per tahun tertinggi berada pada lapangan usaha aktivitas keuangan dan asuransi. Lapangan usaha ini pula yang memiliki skala UMB dengan persentase tertinggi dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain.

Gambar 4.7
Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Nilai Omset di Sulawesi Tengah 2016

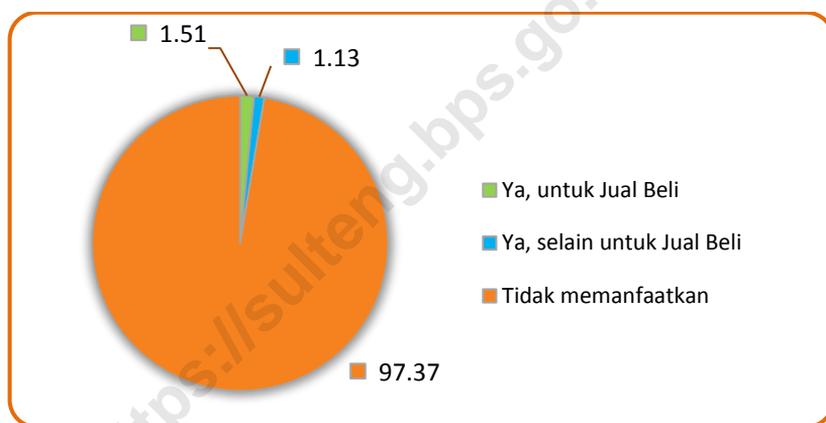


C. Pemanfaatan Internet Masih Minim

Beberapa tahun terakhir, bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, berkembang cukup pesat. Kegiatan bisnis yang dilakukan secara *online* sering disebut sebagai *e-business*. Salah satu bagian dari *e-bussines* yang paling banyak dikenal oleh masyarakat yaitu *e-commerce*.

Secara umum, *e-commerce* dapat dipahami sebagai jual beli barang atau jasa melalui jaringan internet. Perkembangan *e-commerce* di dunia, termasuk Indonesia, sangat pesat. Tidak hanya dilakukan di kalangan usaha besar, akan tetapi para pelaku UMK juga turut menjamah *e-commerce* ini. Menurut Ketua Indonesian E-commerce Association (IDEA), Aulia Erysyah Marinto, pertumbuhan transaksi *e-commerce* di Indonesia tahun 2017 mencapai 30-50% dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2020 pasar *e-commerce* Indonesia diperkirakan mencapai USD130 Miliar (Kominfo, 2017).

Gambar 4.8
Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Penggunaan Internet
di Sulawesi Tengah 2016



Sebanyak 9.056 usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah tahun 2016 atau sekitar 2,63 persen telah menggunakan internet. Dibandingkan dengan kondisi nasional secara umum, persentase usaha/perusahaan yang telah memanfaatkan internet di Sulawesi Tengah masih tergolong rendah.

Dari 343.705 usaha/perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah pada tahun 2016, sebanyak 9.056 usaha/perusahaan atau sekitar 2,63 persen yang telah menggunakan internet.

Dari sisi penggunaan, sebanyak 5.173 usaha/perusahaan telah menggunakan internet untuk transaksi jual beli, sedangkan sisanya 3.883 usaha/perusahaan menggunakan selain untuk jual beli.

Secara umum, bisnis *online* di Sulawesi Tengah belum banyak menyentuh perekonomian Sulawesi Tengah. Kondisi masyarakat Sulawesi Tengah sebagian besar belum tersentuh

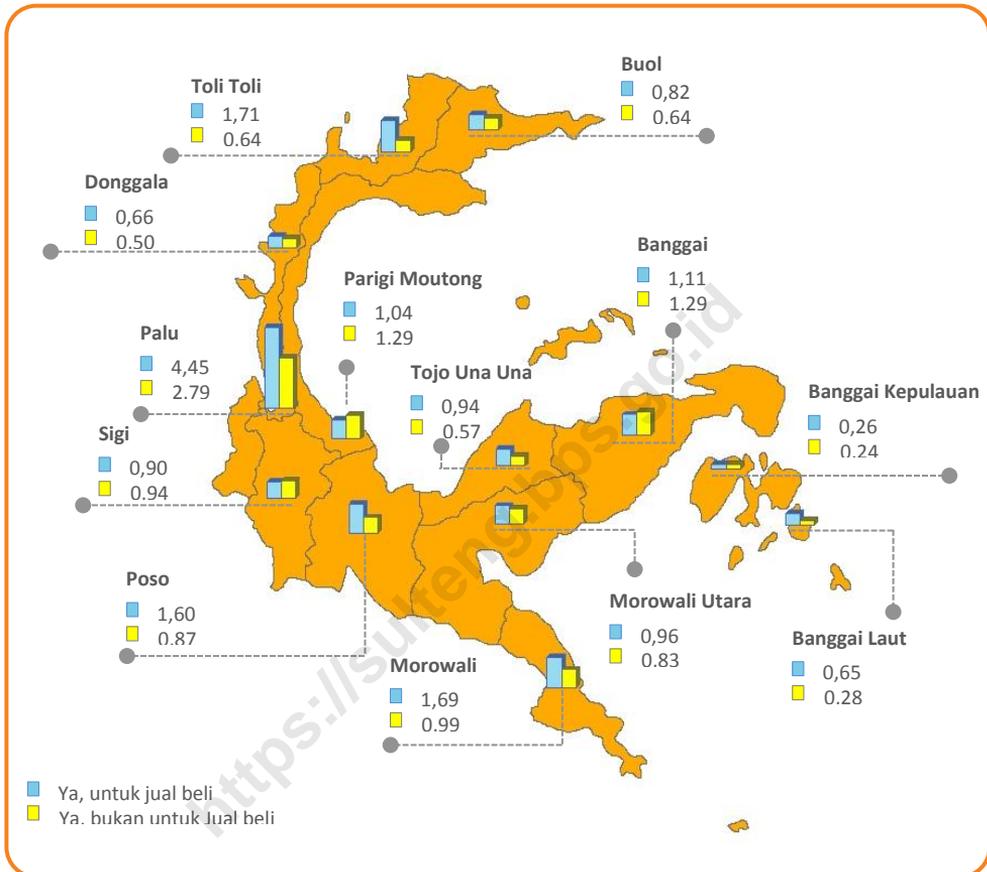
teknologi informasi dan komunikasi. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2016, persentase penduduk usia lima tahun ke atas pengguna internet di Sulawesi Tengah 2016 masih sebesar 17,80 persen. Transaksi *online* saat ini masih hanya dijangkau oleh masyarakat perkotaan kelas menengah ke atas, selebihnya masih mengandalkan transaksi *offline*.

Keterjangkauan teknologi di Sulawesi Tengah masih tergolong rendah. Dari angka Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) tahun 2015 Sulawesi Tengah masih menempati peringkat 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Adapun sub indeks yang menyebabkan rendahnya angka IP-TIK Sulawesi Tengah yaitu dari sisi penggunaan yang dinilai dari persentase penduduk pengguna internet yang masih tertinggal dengan provinsi lain. Selama masih minimnya penggunaan internet di Sulawesi Tengah, bisnis *online* tidak akan banyak dijangkau oleh pelaku usaha di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, persentase usaha/perusahaan pengguna internet didominasi Kota Palu. Sebesar 7,24 persen dari seluruh usaha/perusahaan di Kota Palu telah menggunakan internet. Sebaliknya, kabupaten dengan persentase usaha/perusahaan pengguna internet paling rendah yaitu Banggai Kepulauan, hanya 0,50 persen dari jumlah usaha/perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Sebagai ibukota provinsi, Kota Palu memiliki akses internet yang lebih luas dan merata dibandingkan dengan kabupaten lain. Sebagian besar wilayah di Kota Palu telah dijangkau oleh internet, sedangkan kabupaten lain masih banyak wilayah terutama di daerah perdesaan yang belum terjangkau oleh internet. Kemudahan menjangkau internet di Kota Palu ini terlihat dari sisi pengguna internet di Kota Palu yang jauh lebih banyak dibandingkan daerah lainnya. Lebih dari 45 persen penduduk usia lima tahun ke atas di Kota Palu telah mengakses internet, sedangkan kabupaten lain masih kurang dari 20 persen (SUSENAS, 2016).

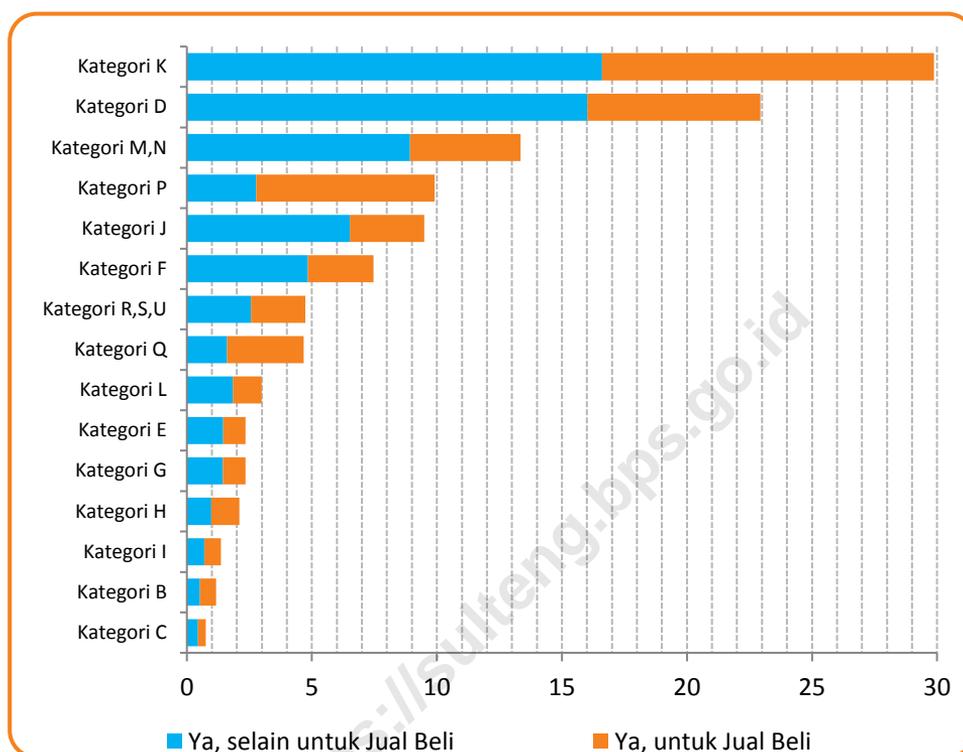
Berdasarkan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, persentase usaha/perusahaan pengguna internet didominasi Kota Palu.

Gambar 4.9
Persentase Usaha/Perusahaan yang Menggunakan Internet Menurut
Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Internet kini menjadi salah satu fasilitas andalan dalam berbisnis. Pentingnya internet tidak hanya memudahkan dalam hal administrasi atau komunikasi. Dengan adanya internet, jangkauan transaksi penjualan dapat ke seluruh wilayah Indonesia bahkan seluruh dunia. Luas dan mudahnya jangkauan internet untuk berbisnis ini merupakan peluang yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha. Selain usaha besar, internet juga sangat membantu UMK dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu, pemerataan akses internet ini sangat perlu untuk diusahakan. Dengan ditingkatkannya akses internet di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah, diharapkan wilayah pemasaran produksi barang dan jasa dari Sulawesi Tengah juga akan meningkat yang berujung pada peningkatan ekonomi Sulawesi Tengah secara umum.

Gambar 4.10
Persentase Usaha/Perusahaan yang Menggunakan Internet Menurut
Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah, 2016



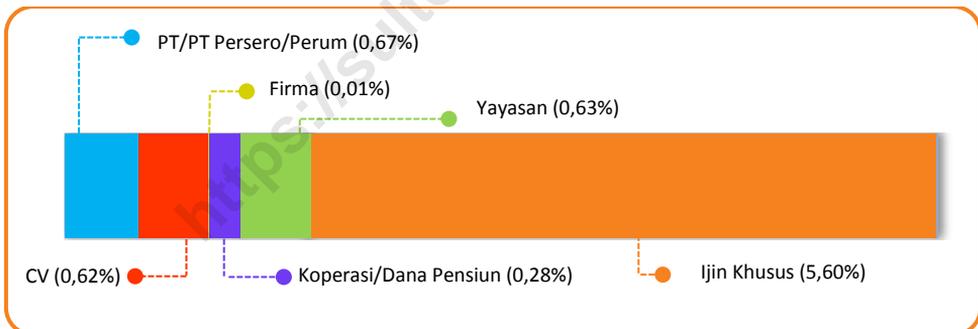
Sejauh ini, lapangan usaha yang paling banyak memanfaatkan media internet yaitu aktivitas keuangan dan asuransi. Dari 1.747 usaha/perusahaan yang bergerak pada lapangan usaha aktivitas keuangan dan asuransi, sebesar 29,88 persen telah menggunakan internet. Pemanfaatan internet dalam dunia perbankan saat ini sangat luas. Selain dalam hal administrasi dan komunikasi dalam manajemen perbankan itu sendiri, pemanfaatan internet ini juga merambah pada pelayanan konsumen, seperti transaksi melalui *internet banking*. *Internet banking* ini memudahkan nasabah melakukan transaksi online selama 24 jam. Pelayanan *internet banking* ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah sehingga dapat melakukan transaksi dimana pun dan kapanpun secara *online*. Semakin diminatinya transaksi *online* ini, sebagian besar perbankan berlomba-lomba memberikan fasilitas internet ini kepada nasabah dengan berbagai fitur yang sangat memudahkan nasabah.

D. Status Badan Usaha

Dari hasil Sensus Ekonomi 2016 diketahui bahwa usaha/perusahaan yang memiliki badan usaha hanya sekitar 26 ribu dari 343 ribu usaha/perusahaan yang ada, atau hanya sekitar 7,82 persen, sedangkan 92,18 persen sisanya merupakan usaha/perusahaan tidak berbadan usaha. Adapun jumlah usaha yang merupakan PT/PT Persero/Perum sebanyak 2.288 unit, CV 2.132 unit, firma 32 unit, koperasi/dana pensiun 964 unit, yayasan 2.176 unit, ijin khusus 19.244 unt, dan perwakilan perusahaan/lembaga asing 46 unit.

Semakin diminatinya transaksi online ini, sebagian besar perbankan berlomba-lomba memberikan fasilitas internet ini kepada nasabah dengan berbagi fitur yang sangat memudahkan nasabah.

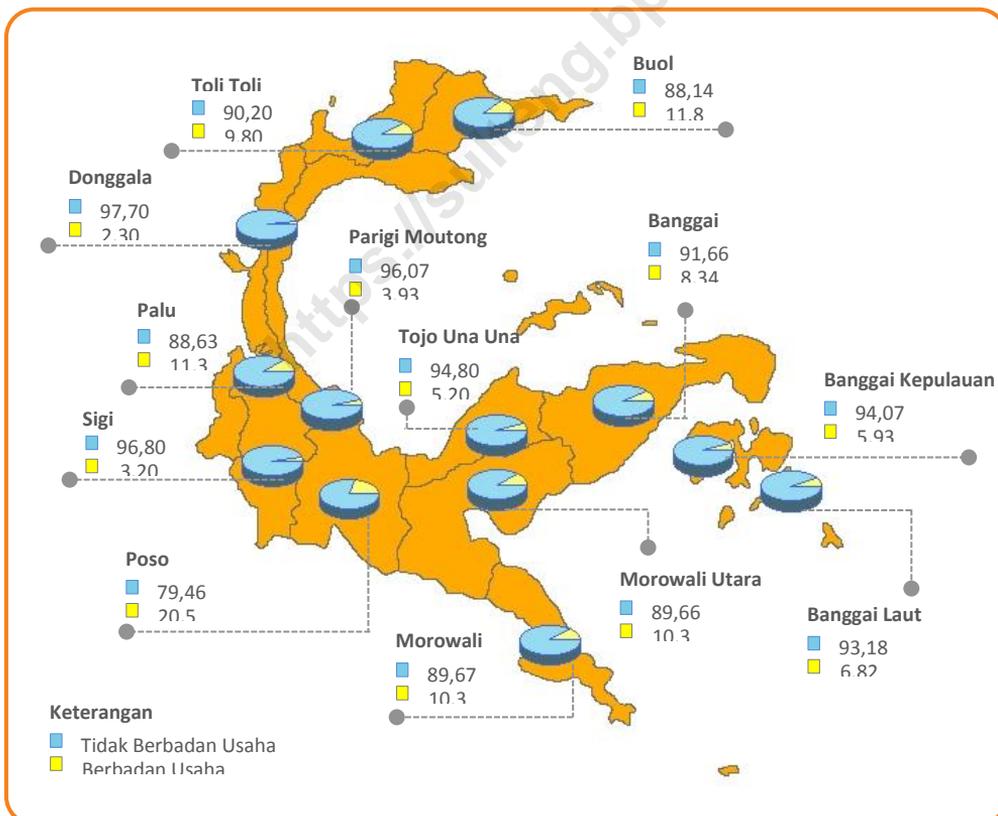
Gambar 4.11
Persentase Usaha/Perusahaan yang Berbadan Usaha di Sulawesi Tengah 2016



Dari persentase UMK yang sangat mendominasi usaha/perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah dan persentase usaha/perusahaan yang berbadan hukum juga masih minim, secara tidak langsung menggambarkan bahwa salah satu karakteristik usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan UMK yang masih belum berbadan usaha.

Persentase usaha/perusahaan berbadan usaha tertinggi di masing-masing kabupaten/kota dicapai oleh Kabupaten Poso. Di daerah ini, setidaknya terdapat 20,54 persen usaha/perusahaan berbadan usaha dari 21 ribu usaha/perusahaan yang ada di sana. Sebaliknya, persentase terendah yaitu Kabupaten Donggala, hanya 2,30 persen.

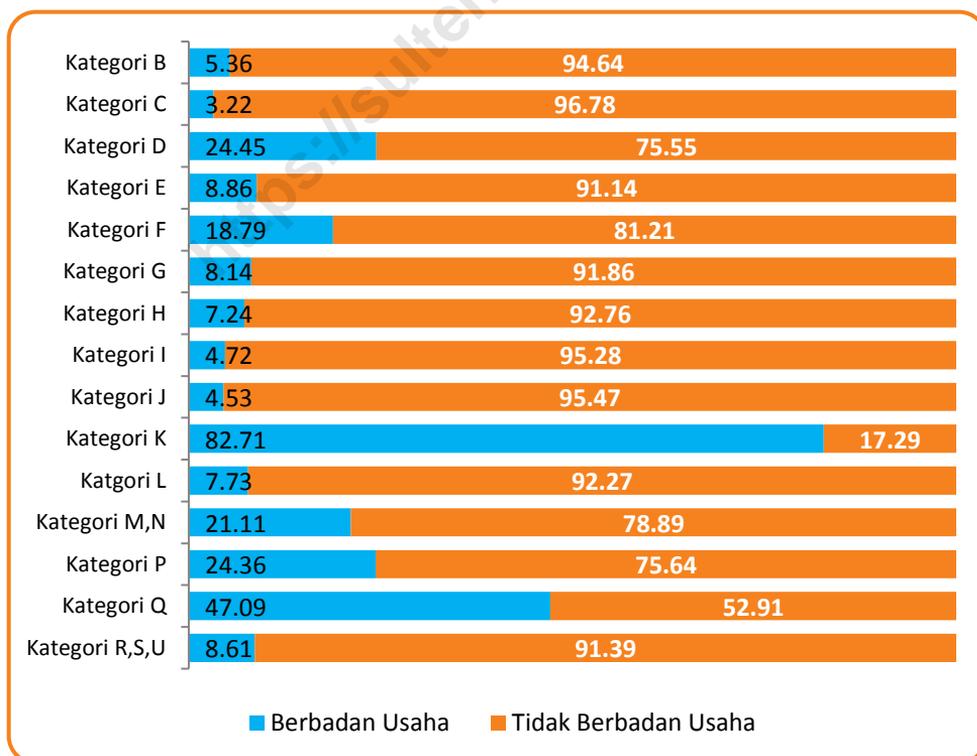
Gambar 4.12
Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Status Badan Usaha dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah 2016



Berdasarkan status badan usaha, jumlah usaha yang memiliki badan usaha dapat dikatakan sangat minim. Hanya sebagian kecil usaha/perusahaan yang memiliki badan usaha. Tidak banyak pelaku usaha, terutama UMK, yang

menyadari pentingnya badan usaha bagi usaha yang sedang dijalankan. Sebagian besar usaha/perusahaan memang dapat berjalan meskipun tanpa memiliki badan usaha. Namun apabila pelaku usaha memiliki rencana pengembangan usaha menjadi usaha yang besar, maka kepemilikan badan usaha sangat diperlukan. Badan usaha sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha. Kepemilikan badan usaha dapat mempermudah usaha untuk memperoleh bantuan modal dari lembaga keuangan dan juga sebagai sarana perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Sebagian besar konsumen lebih memilih bertransaksi dengan usaha/perusahaan yang berbadan usaha dibandingkan yang tidak berbadan usaha, sehingga status badan usaha ini juga menjadi salah satu faktor untuk menarik minat konsumen. Dengan berbadan usaha, peluang bagi usaha/perusahaan untuk berkembang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak berbadan usaha.

Gambar 4.13
Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Status Badan Usaha dan Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah 2016



Ditinjau di masing-masing lapangan usaha, tampak bahwa aktivitas keuangan dan asuransi merupakan lapangan usaha dengan persentase badan usaha tertinggi, jauh dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain. Hal ini dikarenakan untuk membuka usaha lembaga keuangan memang diwajibkan untuk berbadan hukum. Tidak hanya lembaga keuangan berskala besar, bahkan kewajiban berbadan hukum untuk usaha keuangan berskala mikro juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mulai berlaku awal tahun 2015 lalu.

Lembaga keuangan merupakan salah satu lapangan usaha yang sangat berperan penting dalam jalannya perekonomian secara umum. Sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana, konsumen lembaga keuangan tidak hanya rumah tangga, akan tetapi juga pemerintah dan pelaku usaha. Kondisi perekonomian sektor keuangan dapat mempengaruhi perekonomian secara umum. Oleh karena itu, status badan usaha sangat diperlukan sebagai jaminan kepastian kepada konsumen dan juga bagi pelaku usaha itu sendiri.

E. Jaringan Usaha

Karakteristik lain yang dikumpulkan dalam listing Sensus Ekonomi 2016 yaitu tentang jaringan usaha. Seiring berkembang dan terbukanya peluang bisnis secara global, pelaku usaha semakin mudah untuk mengembangkan jaringan usaha dari satu jenis usaha menjadi beberapa jenis usaha atau dari satu unit menjadi beberapa unit usaha.

Dalam dunia bisnis saat ini, tidak menutup kemungkinan sekumpulan perusahaan yang tersebar di berbagai tempat merupakan satu *group* yang terkendali dalam satu kepemilikan.

Semakin luas jaringan suatu usaha menunjukkan semakin besar dan berkembangnya usaha tersebut. Mengembangkan jaringan usaha/perusahaan ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan produksi yang kemudian akan meningkatkan pendapatan usaha/perusahaan secara umum.

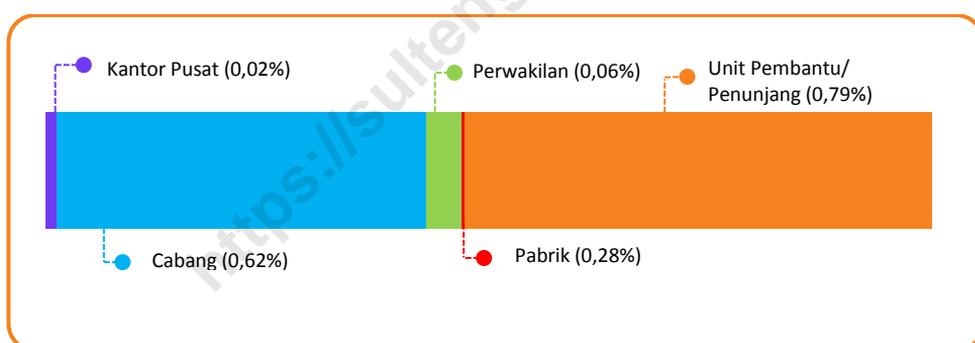
Berkembangnya suatu usaha menjadi suatu *group* perusahaan yang besar memang memberikan dampak yang positif melalui sumbangsuhnya terhadap perekonomian secara umum. Namun, menjalarnya satu jaringan usaha yang

Seiring berkembang dan terbukanya peluang bisnis secara global, pelaku usaha semakin mudah untuk mengembangkan jaringan usaha dari satu jenis usaha menjadi beberapa jenis usaha atau dari satu unit menjadi beberapa unit usaha.

semakin luas juga perlu dikontrol agar jangan sampai terjadi monopoli pasar di suatu wilayah. Monopoli usaha ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketimpangan antar pelaku usaha. Selain itu, monopoli pasar juga dapat mengganggu kestabilan harga pasar.

Jumlah usaha di Sulawesi Tengah yang merupakan usaha tunggal sebanyak 338.543 usaha/perusahaan dan 5.162 usaha/perusahaan atau sekitar 1,50 persen bukan merupakan usaha tunggal. Usaha non tunggal ini terdiri dari kantor pusat 67 unit, cabang 2.148 unit, perwakilan 210 unit, pabrik 17 unit, dan unit pembantu/penunjang 2.720 unit. Tidak semua usaha non tunggal berkantor pusat di Sulawesi Tengah. Sebagian usaha non tunggal seperti kantor cabang atau kantor perwakilan merupakan unit perpanjangan tangan dari usaha yang terpusat di luar Sulawesi Tengah.

Gambar 4.14
Persentase Usaha/Perusahaan dengan Jaringan Usaha Non Tunggal di Sulawesi Tengah 2016

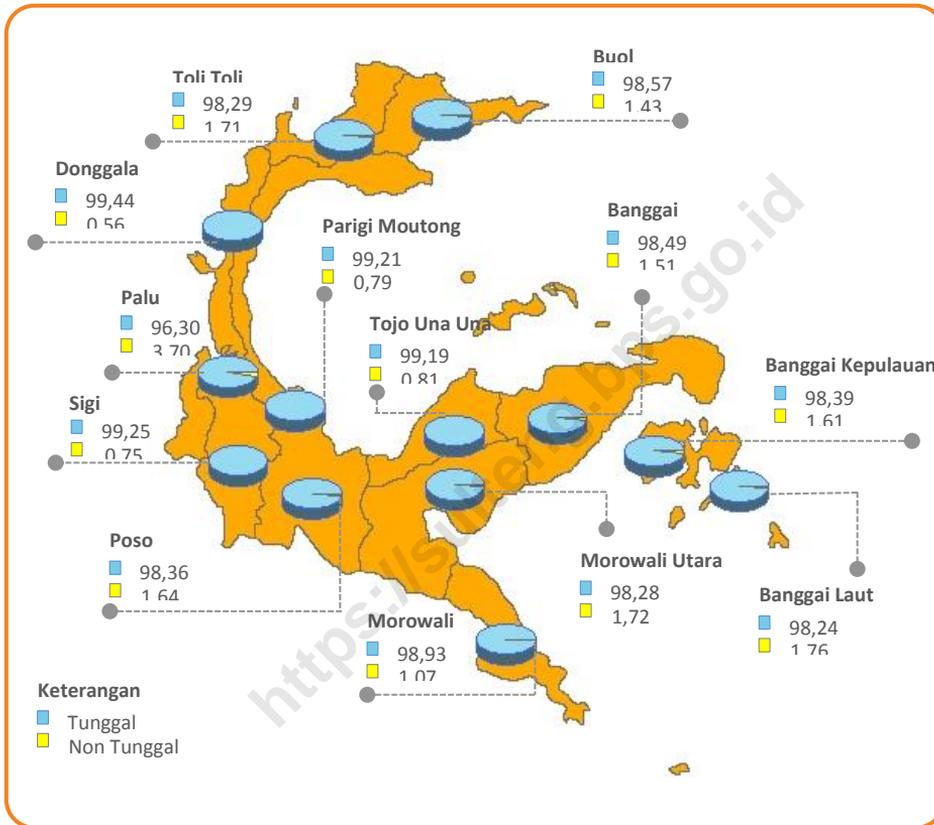


Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebagian besar usaha/perusahaan di Sulawesi Tengah merupakan UMK, sehingga mayoritas jaringan usahanya yaitu usaha tunggal. UMK biasanya hanya dikelola sendiri secara sederhana atau bahkan hanya berupa usaha rumah tangga, belum dikembangkan menjadi usaha yang memiliki jaringan di beberapa tempat.

Dilihat dari persebarannya, wilayah yang memiliki persentase usaha/perusahaan tunggal tertinggi yaitu Kabupaten Donggala sebesar 99,44 persen. Sementara itu, Kota Palu sebagai pusat perekonomian Sulawesi Tengah, usaha/perusahaan non tunggal sebagian besar ada di sana. Di Kota Palu, terdapat 1.706 unit usaha/perusahaan yang bukan merupakan perusahaan

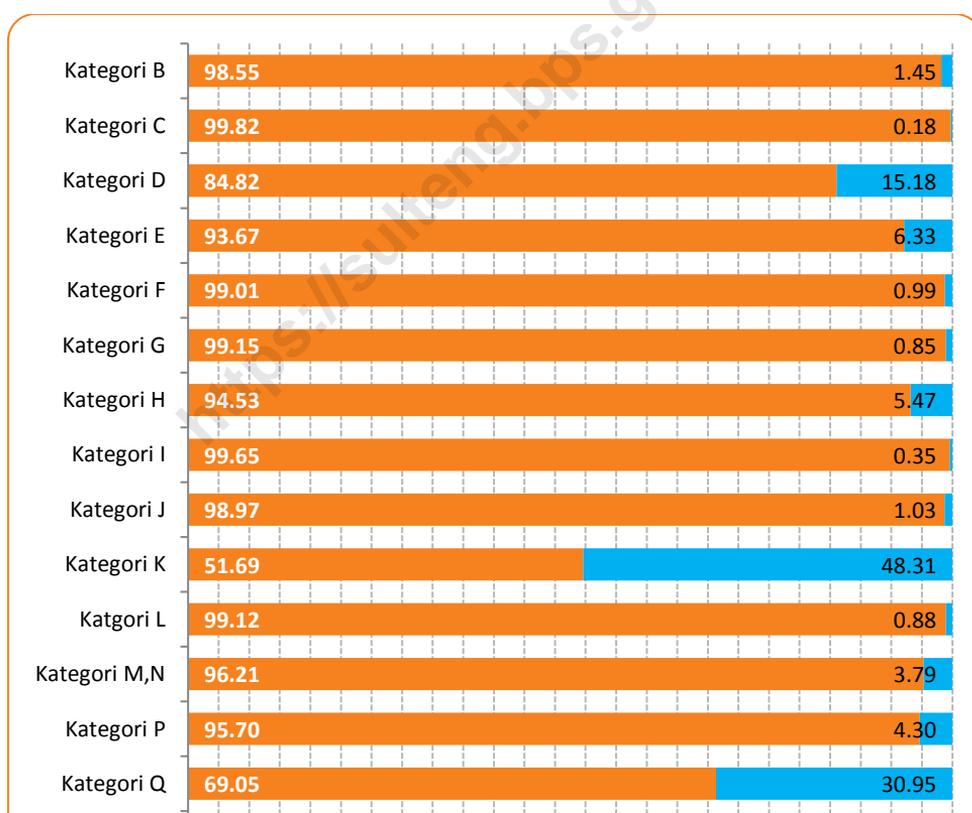
tunggal yang terdiri dari 53 unit kantor pusat, 850 unit cabang, 61 unit perwakilan, 7 pabrik, dan 735 unit pembantu/penunjang.

Gambar 4.11
Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Status Jaringan Usaha dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah 2016



Persentase usaha berdasarkan jaringan usaha di masing-masing jenis lapangan usaha juga tidak jauh berbeda dengan pola skala usaha. Industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makanan minuman menjadi lapangan usaha dengan persentase jaringan usaha tunggal tertinggi, sama halnya dengan pola skala usaha. Kedua lapangan usaha ini menjadi lapangan usaha dengan persentase UMK tertinggi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa UMK biasanya hanya dikelola sendiri secara sederhana atau bahkan hanya berupa usaha rumah tangga, belum dikembangkan menjadi usaha yang memiliki jaringan di beberapa tempat.

Gambar 4.12
Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Status Jaringan Usaha dan Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah 2016



Bab 5

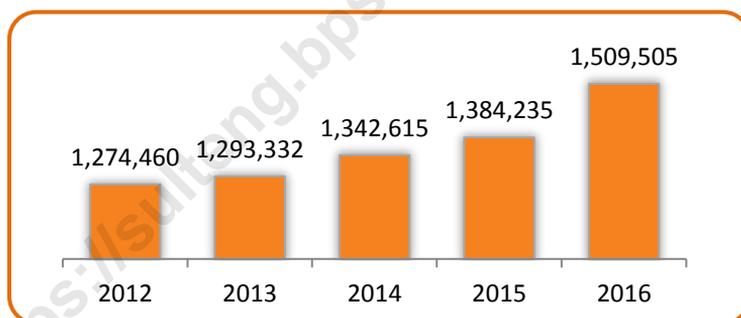


Produktivitas Tenaga Kerja

A. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor produksi yang turut andil dalam kegiatan ekonomi. Dari sisi ketersediaan SDM, jumlah angkatan kerja Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Gambar 5.1
Jumlah Angkatan Kerja di Sulawesi Tengah 2012-2016



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 – 2016

Peningkatan jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun didukung oleh bonus demografi yang diprediksikan akan mulai dinikmati oleh Sulawesi Tengah pada tahun 2017. Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah sebanyak 1,51 juta jiwa (periode Agustus). Selama periode 2012-2016, jumlah angkatan kerja rata-rata tumbuh 4,61 persen per tahun.

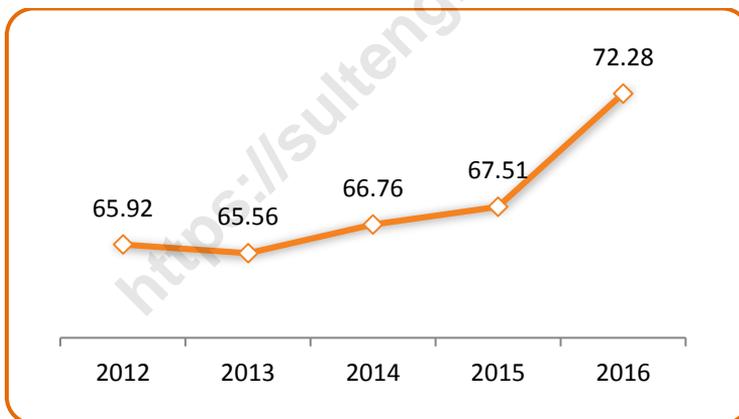
Angkatan kerja yang terus tumbuh ini menjadi salah satu modal pembangunan sehingga harus terserap dalam kegiatan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja ini diharapkan dapat mendorong perekonomian di Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja di Sulawesi Tengah sebanyak 1,51 juta jiwa (periode Agustus). Selama periode 2012-2016, jumlah angkatan kerja rata-rata tumbuh 4,61 persen per tahun.

Semakin tinggi nilai TPAK berarti pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian semakin meningkat.

Tidak hanya dari sisi jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Tengah sepanjang periode 2012-2016 juga menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. TPAK Sulawesi Tengah pada tahun 2016 sebesar 72,28 (periode Agustus). Artinya, 72,28 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sisanya, 26,12 persen bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Semakin tinggi nilai TPAK berarti pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian semakin meningkat.

Gambar 5.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Tengah, 2012 – 2016 (Agustus)



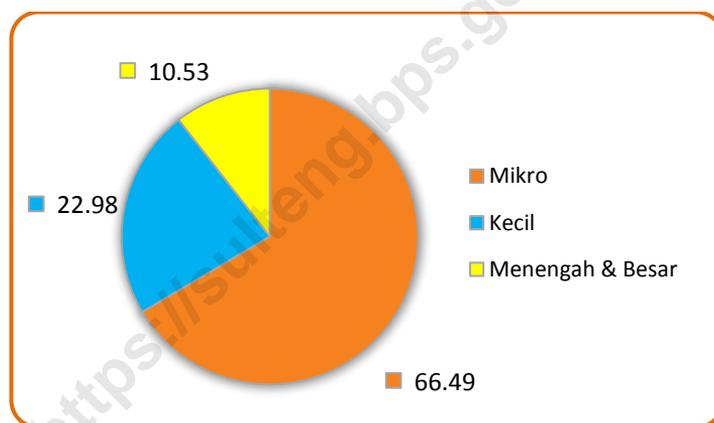
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 – 2016

TPAK di Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah karena meningkatnya TPAK ini tentu saja diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap faktor produksi, khususnya tenaga kerja. Oleh sebab itu, lapangan usaha yang memadai harus disediakan agar tidak terjadi beban sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.

B. UMK sebagai Penyerap Tenaga Kerja Utama

Berdasarkan hasil SE2016, jumlah tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Tengah sebagian besar terserap di UMK. Dengan jumlah UMK yang sebanyak 340 ribu unit usaha/perusahaan menyerap sekitar 706 ribu tenaga kerja atau sebesar 89,47 persen dari total tenaga kerja di sektor non pertanian di Sulawesi Tengah. Sisanya, terserap dalam UMB sebesar 10,53 persen (Gambar 5.3). Besarnya jumlah UMK dan tenaga kerja yang berada di dalamnya, menggambarkan UMK sebagai sumber utama pendapatan para pekerja Sulawesi Tengah.

Gambar 5.3
Persentase Tenaga Kerja Non Pertanian Menurut Skala Usaha di Sulawesi Tengah, 2016

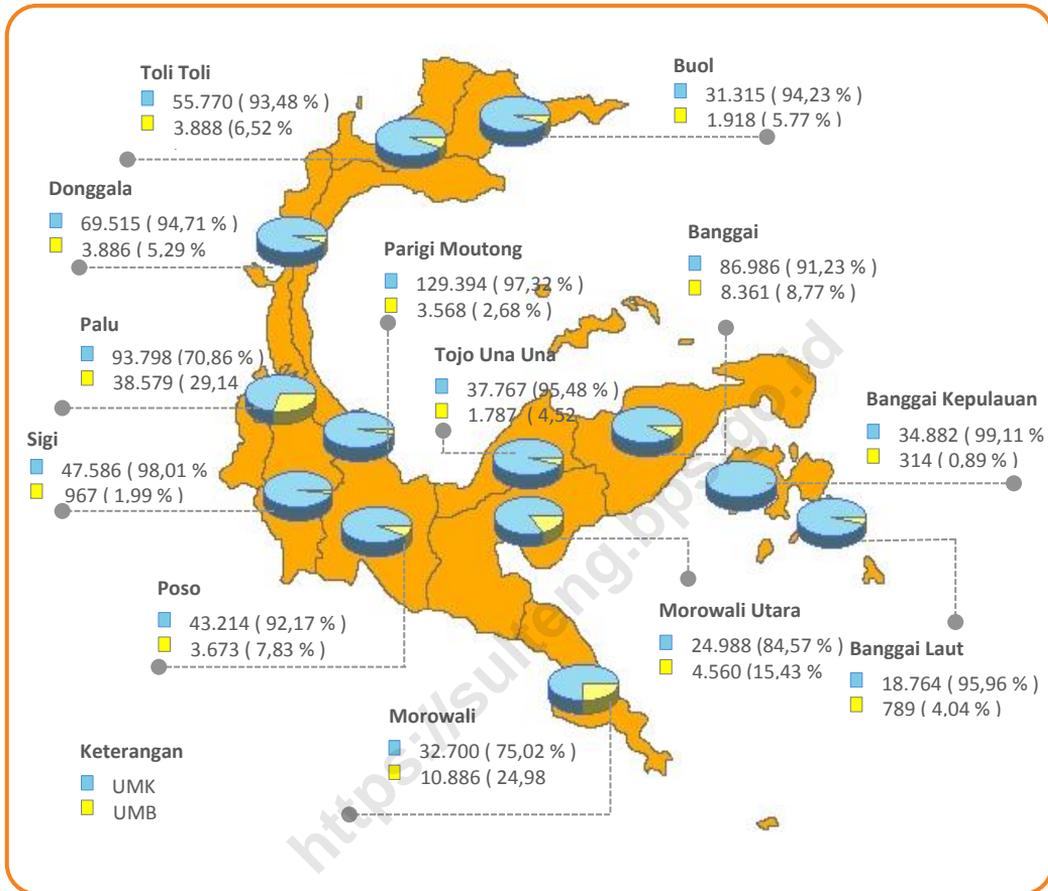


Dilihat persebarannya di masing-masing kabupaten/kota, pola tenaga kerja akan mengikuti pola persebaran usaha yang ada. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Parigi Moutong sebagai wilayah dengan jumlah UMK terbanyak di Sulawesi Tengah, menyerap 129 ribu tenaga kerja, 18,31 persen dari total tenaga kerja UMK di Sulawesi Tengah, atau 97,32 persen dari total tenaga kerja di Kabupaten Parigi Moutong itu sendiri.

Hal yang sama juga berlaku dengan Kota Palu. Dengan jumlah UMB terbesar di Sulawesi Tengah, Kota Palu mampu menyerap 38 ribu tenaga kerja UMB, sekitar 46,38 persen dari total tenaga kerja UMB di Sulawesi Tengah atau 29,14 persen dari total tenaga kerja di Kota Palu.

Gambar 5.4

Jumlah & Persentase Tenaga Kerja Non Pertanian Menurut Skala Usaha di Sulawesi Tengah, 2016

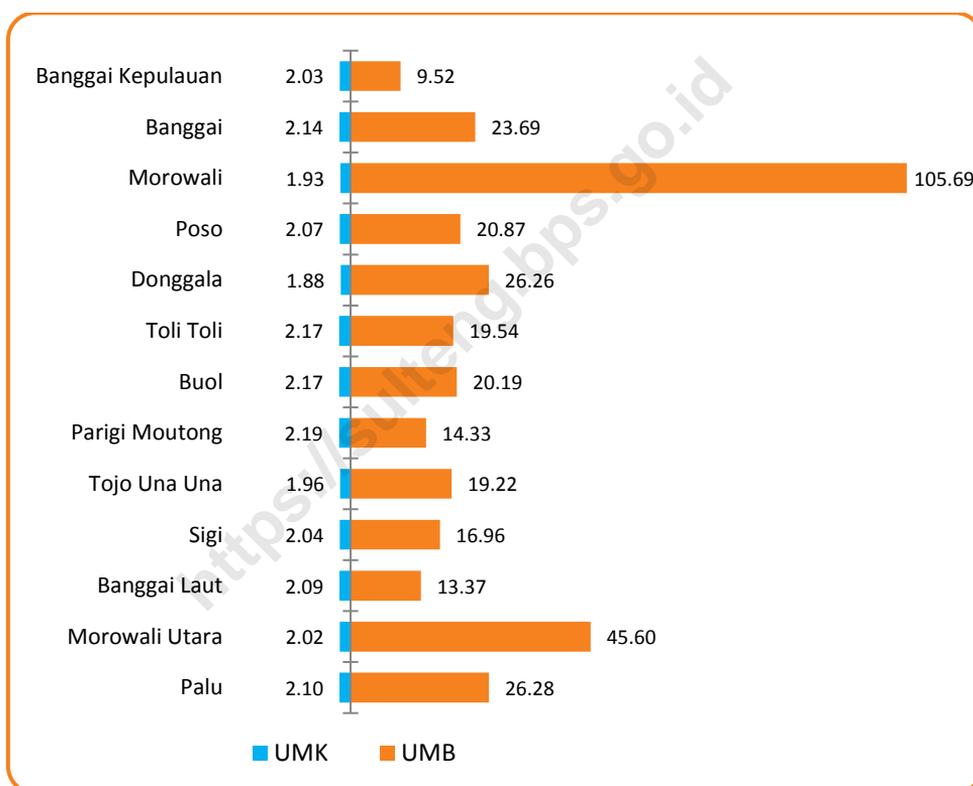


Selain melihat persebaran jumlah tenaga kerja, hal lainnya yang perlu dicermati yaitu penyerapannya di masing-masing usaha/perusahaan yang berbeda-beda. Semakin besar produksi yang dihasilkan cenderung semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan.

Penyerapan tenaga kerja UMK di Sulawesi Tengah 2016 rata-rata 2,07 orang/usaha yang berarti setiap satu UMK di Sulawesi Tengah menyerap 2-3 orang tenaga kerja. UMK sebagai unit usaha yang kecil, secara umum merupakan usaha mandiri dimana tenaga kerja hanya terdiri dari pemilik dan mempekerjakan satu sampai dua orang pekerja atau bahkan hanya pekerja keluarga. Rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UMK di Sulawesi Tengah secara umum tidak memiliki perbedaan yang signifikan antar kabupaten/kota.

Selanjutnya, dengan omset yang pada umumnya lebih besar, UMB mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan UMK. Secara umum, penyerapan tenaga setiap satu UMB di Sulawesi Tengah sebesar 26,55 per usaha/perusahaan. Artinya, setiap satu UMB rata-rata mempekerjakan 26 hingga 27 orang tenaga kerja.

Gambar 5.5
Penyerapan Tenaga Kerja Setiap Usaha/Perusahaan
Menurut Skala Usaha di Sulawesi Tengah, 2016



Berbeda dengan penyerapan tenaga pada UMK yang besarnya antar wilayah tidak jauh berbeda, dalam UMB justru menunjukkan pola yang lebih beragam. Rata-rata penyerapan tenaga kerja pada UMB paling rendah tercatat di Kabupaten Banggai Kepulauan yang sebesar 9,52 orang per usaha, sedangkan angka tertinggi berada di Kabupaten Morowali yang sebesar 105,69 orang per usaha dan Morowali Utara sebesar 45,60 orang/per usaha.

Besarnya penyerapan tenaga di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara terutama didorong oleh adanya kawasan industri yang ada di Morowali dimana terdapat beberapa industri besar yang beroperasi di sana. Begitu pula dengan Morowali Utara dimana terdapat industri besar pengolahan biji nikel yang menyerap banyak tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan besar tersebut merupakan perusahaan yang mendominasi UMB di Morowali dan Morowali Utara sehingga rata-rata penyerapan tenaga kerja UMB di kedua wilayah tersebut sangat tinggi.

Angka daya tampung tenaga kerja di setiap UMK dan UMB dapat menjadi bahan kebijakan dalam memperhitungkan berapa banyak UMK yang masih perlu untuk dikembangkan dan berapa banyak UMB yang perlu dibangun untuk menyerap angkatan kerja yang masih belum tertampung dalam perekonomian.

Dengan mengetahui pola penyerapan tenaga kerja di masing-masing UMK dan UMB, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang masih menganggur. Angka daya tampung tenaga kerja di setiap UMK dan UMB dapat menjadi bahan kebijakan dalam memperhitungkan berapa banyak UMK yang masih perlu untuk dikembangkan dan berapa banyak UMB yang perlu dibangun untuk menyerap angkatan kerja yang masih belum tertampung dalam perekonomian.

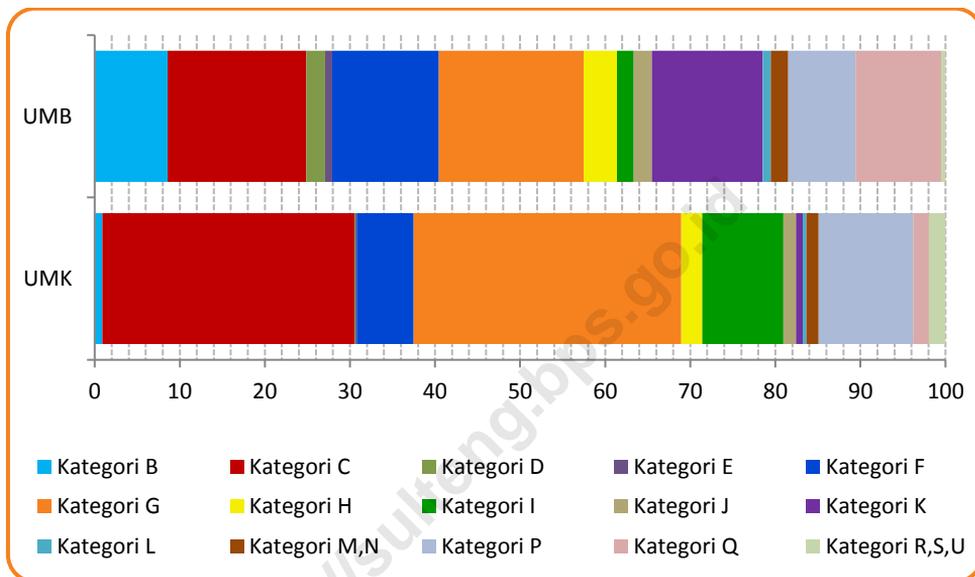
Apabila dilihat persebaran tenaga kerja di setiap lapangan usaha, tidak akan jauh berbeda dengan pola jumlah usaha yang ada. Baik UMK maupun UMB, dari sisi jumlah usaha sebagian besar merupakan kategori perdagangan dan industri pengolahan, sehingga persebaran tenaga kerja pun akan terkonsentrasi di kedua lapangan usaha tersebut (Gambar 4.6).

Jumlah UMB lapangan usaha perdagangan yang banyaknya 41,69 persen dari total UMB yang ada, menyerap tenaga kerja sebanyak 17,01 persen dari total tenaga kerja UMB yang ada di Sulawesi Tengah. Sementara itu, UMB industri pengolahan yang jumlahnya sebanyak 24,43 persen dari total UMB yang ada menyerap 16,32 persen tenaga kerja UMB.

Pada kelompok UMK, kategori perdagangan yang persentase jumlah usahanya mencapai 42,32 persen mempekerjakan tenaga sebanyak 31,46 persen tenaga kerja dari seluruh pekerja UMK. Kategori terbesar kedua, industri

pengolahan kelompok UMK yang jumlah usahanya sebesar 27,09 persen menampung tenaga kerja 29,64 persen dari total pekerja UMK.

Gambar 5.6
Persentase Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah, 2016

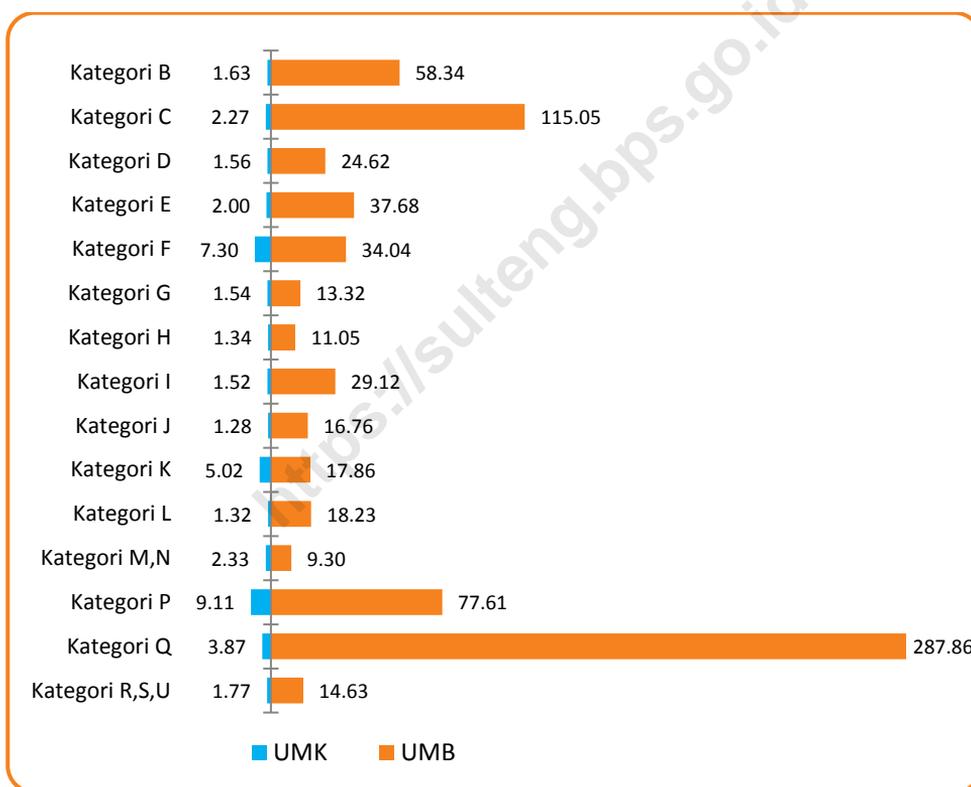


Perbedaan persentase jumlah usaha dengan tenaga kerja dikarenakan setiap lapangan usaha memiliki daya serap yang berbeda. Terdapat kategori usaha yang lebih padat karya sehingga daya tampung tenaga kerja lebih besar. Salah satunya yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Persentase jumlah usaha kategori ini pada kelompok UMB hanya 0,58 persen dari total UMB yang ada, akan tetapi mampu menyerap tenaga kerja sebesar 8,56 persen dari seluruh tenaga kerja UMB. Sebaliknya, terdapat pula lapangan usaha dengan daya serap tenaga kerja rendah, sehingga jumlah usaha yang besar tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang besar pula. Contohnya yaitu jasa pendidikan. Dengan jumlah usaha UMB kategori ini sebesar 15,98 persen, tenaga kerja yang ada hanya 7,93 persen dari total tenaga kerja pada kelompok UMB.

Penyerapan tenaga kerja pada kelompok UMK terendah yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi (1,28). Jenis usaha informasi dan komunikasi yang berskala UMK ini biasanya merupakan penjual pulsa dimana sebagian usaha ini dilakukan secara mandiri, tidak mempekerjakan orang lain selain pemilik. Sebaliknya, UMK dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu jasa

pendidikan (9,11). Lapangan usaha ini yang dalam skala kecil sekalipun, biasanya masih terstruktur dan memiliki tenaga kerja yang sebagian besar adalah guru. Lain halnya dengan UMK, dalam skala UMB lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terendah di setiap usaha/perusahaan yaitu jasa profesional dan jasa perusahaan yang hanya 9,30 orang per usaha atau perusahaan dan tertinggi yaitu aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial mencapai 287,86 orang per usaha/perusahaan.

Gambar 5.7
Penyerapan Tenaga Kerja Setiap Usaha/Perusahaan
Menurut Skala Usaha di Sulawesi Tengah, 2016



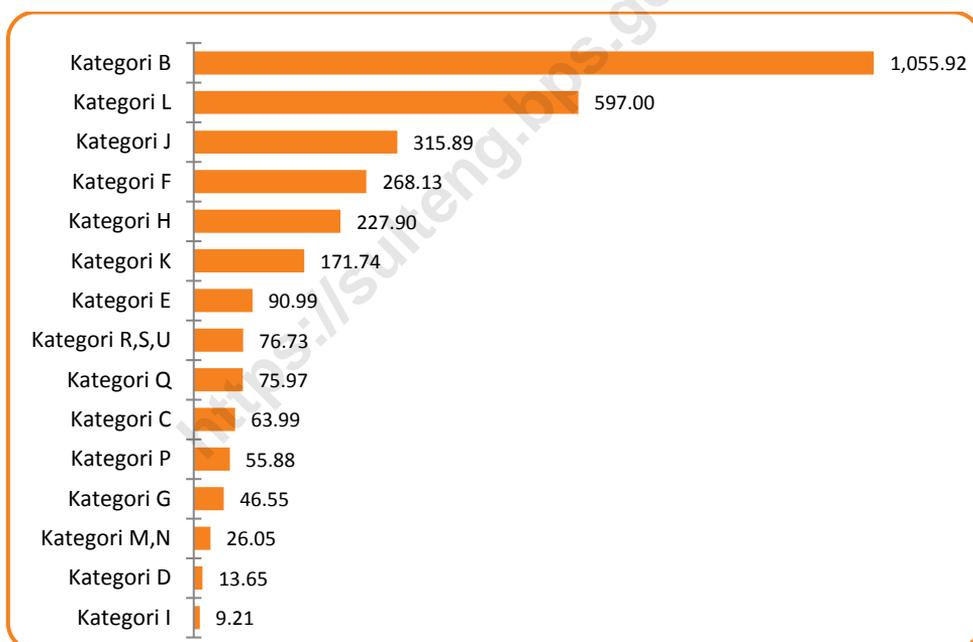
C. Produktivitas Tenaga Kerja

Pembahasan tenaga kerja tidak hanya terfokus pada jumlah, akan tetapi harus diimbangi dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan, belum tentu menjamin

produktivitas akan semakin meningkat. Semakin tinggi produktivitas suatu usaha, semakin efisien penyerapan tenaga kerja dalam usaha tersebut.

Dalam tatanan perekonomian suatu wilayah, produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu analisis ekonomi yang sangat penting selain analisis produktivitas modal. Produktivitas tenaga kerja dapat menjadi ukuran yang dinamis dari pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan standar hidup dalam perekonomian. Ukuran ini dapat menjelaskan pondasi yang diperlukan baik untuk pembangunan ekonomi maupun sosial (OECD, 2008).

Gambar 5.8
Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Tengah, 2016 (Juta rupiah/orang/tahun)

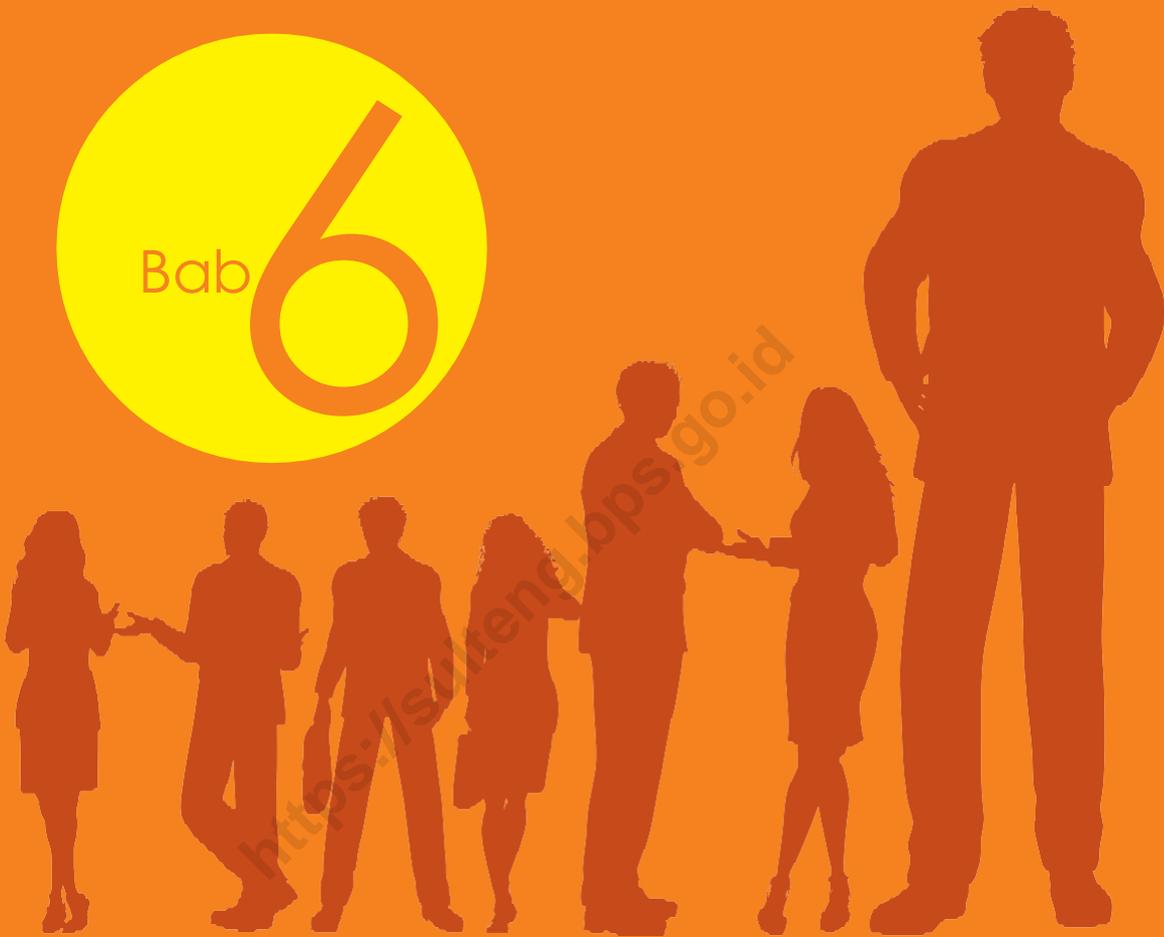


Data tenaga kerja berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 yang dibandingkan dengan output melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan produktivitas tenaga kerja di Sulawesi Tengah tertinggi tercatat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian, mencapai satu miliar per orang per tahun. Dalam struktur perekonomian Sulawesi Tengah, pertambangan dan penggalian ini

..tenaga kerja pertambangan penggalian ini mayoritas bekerja pada usaha/perusahaan skala UMB dimana output yang dihasilkan sangat tinggi.

merupakan salah satu penyumbang nilai tambah tertinggi ketiga setelah konstruksi dan industri pengolahan, yaitu sebesar 18,43 persen (di luar kategori A dan O). Sementara itu, dari sisi jumlah tenaga kerja pada lapangan usaha ini hanya 1,71 persen dari total tenaga yang ada (di luar kategori A, O, T). Adapun persentase tenaga kerja pada kelompok UMB pertambangan penggalian ini mencapai 52,85 persen dari total tenaga kerja yang terserap pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian ini. Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan tenaga kerja pertambangan dan penggalian ini mayoritas bekerja pada usaha/perusahaan skala UMB dimana output yang dihasilkan sangat tinggi.

Sebaliknya, lapangan usaha dengan produktivitas terendah yaitu penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp9,21 juta per orang per tahun. Output lapangan usaha ini menyumbang 0,82 persen dari total PDRB Sulawesi Tengah 2016 (di luar kategori A dan O). Sementara dari sisi tenaga kerja, persentase tenaga kerja lapangan usaha ini sebesar 8,76 persen dari total tenaga kerja yang ada (di luar kategori A, O, T). Selain itu, tenaga kerja pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum ini sebagian besar terserap dalam kelompok UMK, yaitu 97,60 persen dari total tenaga kerja pada lapangan usaha ini. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan nilai output yang rendah, akan tetapi penyerapan tenaga cukup banyak dimana sebagian besar terserap dalam kelompok UMK yang nilai outputnya masih rendah.



Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Jumlah usaha nonpertanian yang ada di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah usaha pada tahun 2006 yaitu sebesar 77,5 persen. Berdasarkan skala usaha, pada tahun 2016 usaha non pertanian di Sulawesi Tengah mayoritas merupakan usaha mikro kecil. Kondisi ini terjadi disemua kabupaten/kota dan semua sektor lapangan usaha non pertanian. Berdasarkan persebaran usaha, sektor yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Sulawesi Tengah adalah sektor "Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor","Industri Pengolahan" dan sektor " Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum". Jumlah usaha tertinggi untuk UMK dan UMB berada di sektor yang sama yaitu sektor "Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor".
2. Dari sisi jumlah tenaga kerja, penambahan jumlah tenaga kerja dari tahun 2006 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat besar yaitu sebesar 107 persen. Berbeda dengan jumlah usaha, ada tiga sektor lapangan usaha yang jumlah tenaga kerja usaha mikro kecil lebih sedikit dari usaha menengah besar. Ketiga sektor lapangan usaha tersebut yaitu :

Dengan semakin meningkatnya penduduk usia kerja dan angkatan kerja maka pemerintah daerah diharapkan menciptakan perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang berbasis pada penciptaan lapangan kerja

sektor "Pertambangan dan Penggalian", "Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin" dan sektor "Aktivitas Keuangan dan Asuransi". Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja tertinggi berada di sektor "Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor", "Industri Pengolahan", dan sektor "Pendidikan".

3. Mayoritas usaha mikro kecil belum mempunyai badan Usaha dan belum memanfaatkan media internet baik untuk penjualan maupun bukan untuk penjualan. Kondisi ini memperkecil peluang bagi peningkatan usaha mikro kecil. Dengan memanfaatkan internet maka peluang promosi usaha akan terbuka lebar sehingga peluang untuk peningkatan omset pendapatan akan lebih besar. Begitu pula dengan status badan usaha akan mempermudah dalam proses pengajuan kredit untuk melakukan ekspansi usaha. Dalam hal pencatatan keuangan, 95 persen lebih usaha nonpertanian di Sulawesi Tengah tidak mempunyai catatan laporan keuangan.
4. Berdasarkan pemetaan analisis Tipologi Klassen dan Location Quotient (LQ) dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Kota Palu merupakan daerah yang mempunyai sektor unggulan paling banyak di Sulawesi Tengah dengan jumlah 6 sektor unggulan. Daerah dengan jumlah sektor unggulan terbanyak berikutnya adalah Kabupaten Poso dengan jumlah 5 sektor unggulan. Sedangkan daerah yang tidak mempunyai sektor unggulan sama sekali yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.
 - b. Kategori Pendidikan (kategori P) merupakan sektor usaha yang paling banyak menjadi unggulan di daerah dengan jumlah enam kabupaten yang mempunyai unggulan disektor ini. Sedangkan sektor yang menjadi unggulan hanya di satu daerah saja yaitu Industri Pengolahan (kategori C), Pertambangan (kategori B), Jasa Lainnya (kategori R,S,U), Konstruksi (kategori F), Informasi dan Komunikasi (kategori J), Real Estat (kategori L) dan Jasa Perusahaan (kategori M,N)
 - c. Sektor usaha yang menjadi unggulan di dua daerah yaitu Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) dan Aktivitas Keuangan dan Asuransi (kategori K). Sedangkan sektor yang menjadi unggulan di tiga daerah yaitu Pengangkutan dan Pergudangan (kategori H), Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (kategori Q).

5. Pada tahun 2016, tingkat penyerapan tenaga kerja UMK di Sulawesi Tengah sebesar 2,07 orang/usaha yang berarti setiap satu UMK di Sulawesi Tengah menyerap 2-3 orang tenaga kerja. Sedangkan untuk UMB, tingkat penyerapan tenaga kerja setiap satu UMB di Sulawesi Tengah sebesar 26,55 per usaha/perusahaan. Artinya, setiap satu UMB rata-rata mempekerjakan 26 hingga 27 orang tenaga kerja. Merupakan hal yang wajar jika penyerapan tenaga kerja UMB lebih besar dari UMK karena dari sisi modal dan kompleksitas usaha UMB jauh lebih besar dari UMK.
6. Terjadi ketimpangan yang sangat tinggi dari produktivitas tenaga kerja menurut lapangan usaha nonpertanian. Sektor lapangan usaha yang mempunyai produktivitas tertinggi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dengan produktivitas mencapai satu miliar per orang per tahun. Tingginya produktivitas disektor ini didorong oleh usaha pertambangan besar yang ada di Morowali dan Banggai. Sebaliknya, lapangan usaha dengan produktivitas terendah yaitu penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp9,21 juta per orang per tahun.
7. Usaha mikro kecil merupakan wajah sesungguhnya dari perekonomian masyarakat Sulawesi Tengah diluar sektor pertanian. Dengan jumlah usaha UMK dan tenaga kerja UMK yang sedemikian besar maka sudah sewajarnya UMK mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi Sulawesi Tengah.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat kami sampaikan usulan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dengan semakin meningkatnya penduduk usia kerja dan angkatan kerja maka pemerintah daerah diharapkan menciptakan perencanaan dan kebijakan-kebijakan yang berbasis pada penciptaan lapangan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang terjadi jika tidak diimbangi oleh lapangan kerja yang tersedia akan membawa dampak negatif pada pembangunan dan kerawanan sosial masyarakat.

2. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu memberikan perhatian yang lebih pada sektor-sektor yang menjadi unggulan dimasing-masing wilayah.
3. Pemerintah daerah perlu juga memperhatikan sektor-sektor yang potensial karena pada umumnya sektor potensial berpotensi dalam penyerapan tenaga kerja.
4. Untuk meningkatkan daya saing UMK pemerintah daerah diharapkan lebih memfasilitasi dan mempermudah pelaku usaha UMK dalam hal pembentukan badan hukum usaha. Selain itu juga dipermudah dalam proses pengajuan kredit untuk ekspansi usaha.
5. Untuk meningkatkan nilai plus UMK pemerintah daerah bisa memberikan pelatihan pemanfaatan media internet untuk mempromosikan usaha sehingga bisa memperbesar peluang peningkatan pendapatan. Selain itu para pelaku usaha bisa didorong dan dibantu untuk bergabung dalam beberapa situs e-commerce yang ada di Indonesia bahkan lebih jauh e-commerce level internasional.
6. Untuk mendukung eksistensi UMK di Sulawesi Tengah pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi dan memberikan bantuan dalam mengikuti pameran atau festival baik didalam maupun diluar wilayah Sulawesi Tengah sehingga produk-produk UMK dapat lebih dikenal luas.
7. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pelatihan pencatatan keuangan pelaku usaha terutama usaha kecil. Dengan adanya pencatatan keuangan yang baik maka akan lebih memudahkan dalam penghitungan laba rugi usaha. Sehingga para pelaku usaha bisa mengukur kemampuan dengan lebih baik jika ingin mengembangkan usaha.

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Sensus Ekonomi 2016 Analisis hasil Listing – Potensi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2016. *BRS: Agustus 2016: Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Tengah Sebesar 3,29 Persen*. Palu: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah 2012-2016*. Palu: BPS
- Bank Indonesia.2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: BI
- Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD). 2008. *Labour productivity Indicators – Comparison of Two OECD Databases Productivity Differentials & The Balassa Samuelson Effect (Jurnal)*



Lampiran

Lampiran 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar

No	KATEGORI	Rincian SE2016-L2						
		Badan Usaha	Kode KBLI	Kualifikasi/ Tenaga kerja	Nilai produksi/ Penjualan/ pendapatan setahun			
					Mikro	Kecil	Menengah	Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	B	1.PT/PTPersero/Perum 2. CV			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 3-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
2	C			Tenaga Kerja 1-4 = mikro 5-19 = kecil 20-99 = menengah ≥ 100 = besar				
3	D	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
4	E	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
5	F			Perorangan = Mikro K1, K2, K3 = Kecil M1, M2 = Menengah B1, B2 = Besar				
		1.PT/PT Persero/Perum =Menengah Kode 2-7= Kecil 8.Tdk Berbadan Usaha=Mikro						
6	G	1.PT/PT Persero/Perum	4730147111 47191		-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
7	H	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M

Lampiran 1. Lanjutan

No	KA TE GO RI	Rincian SE2016-L2						
		Badan Usaha	Kode KBLI	Kualifikasi/ Tenaga kerja	Nilai produksi/ Penjualan/ pendapatan setahun			
					Mikro	Kecil	Menengah	Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	I	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
		1.PT/PT Persero/Perum		Hotel Bintang 1,2,3,4,5	-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
9	J	1.PT/PT Persero/Perum	59111 59121 59131 60101 60201 60202 61100 61200 61300 61921 61922 61923 61924 61925 61991 61992 61993 63911 63912		-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
10	K	1.PT/PT Persero/Perum 7.Perwakilan Perusahaan/ Lembaga Asing	65301 65302		-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2,3,4,5,6,8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
11	L	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
12	M	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
13	N	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
14	P	1.PT/PT Persero/Perum					≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2,3,4,5,6,8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
			85111 85112 85131 85210 85230		≤ 300 Jt	> 300 Jt	-	-
			85311 85312 85321 85322		-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar

Lampiran 1. Lanjutan

No	KATEGORI	Rincian SE2016-L2						
		Badan Usaha	Kode KBLI	Kualifikasi/ Tenaga kerja	Nilai produksi/ Penjualan/ pendapatan setahun			
					Mikro	Kecil	Menengah	Besar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Q	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
16	R	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M
17	S	1.PT/PT Persero/Perum			-	-	≤ 50 M	> 50 M Besar
		Kode 2-8			≤ 300 Jt	300 Jt < X ≤ 2,5 M	2,5 M < X ≤ 50 M	> 50 M

Lampiran 2. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Kategori Lapangan Usaha						
	B,D,E	C	D	G	H	I	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Banggai Kep.	101	8 875	350	4 910	668	942	275
Banggai	230	14 285	662	15 108	1 964	4 939	818
Morowali	221	2 630	417	9 343	330	2 117	594
Poso	339	4 353	345	9 628	559	2 826	726
Donggala	252	11 933	508	15 642	1 159	4 625	839
Toli-Toli	299	8 166	553	10 582	890	2 932	365
Buol	464	3 839	418	6 179	739	1 370	327
Parigi Moutong	1 214	16 480	974	25 993	2 118	7 100	1 585
Tojo Una-Una	208	7 162	300	6 997	901	2 169	347
Sigi	411	4 059	450	11 459	1 103	3 278	707
Banggai Laut	108	3 866	207	2 810	597	688	107
Morowali Utara	198	1 811	495	6 382	476	1 250	573
Palu	1 114	4 918	1 112	20 166	1 652	10 097	904
Sulawesi Tengah	5 159	92 377	6 791	145 199	13 156	44 333	8 167

Lampiran 2. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kategori Lapangan Usaha						Jumlah
	K	L	M, N	P	Q	R, S, U	
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Banggai Kep.	77	51	108	412	218	205	17 192
Banggai	207	123	517	950	477	782	41 062
Morowali	76	89	203	433	172	396	17 021
Poso	190	74	391	701	348	548	21 028
Donggala	106	46	333	886	210	573	37 112
Toli-Toli	148	145	278	670	231	589	25 848
Buol	58	71	187	443	129	301	14 525
Parigi Moutong	303	149	596	1 389	555	1 000	59 456
Tojo Una-Una	45	47	209	625	137	246	19 393
Sigi	56	78	427	710	211	461	23 410
Banggai Laut	58	21	62	230	121	168	9 043
Morowali Utara	71	49	149	501	228	268	12 451
Palu	352	1 334	1 126	743	388	2 258	46 164
Sulawesi Tengah	1 747	2 277	4 586	8 693	3 425	7 795	343 705

Lampiran 3. Banyaknya Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Kategori Lapangan Usaha						
	B,D,E	C	D	G	H	I	J
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Banggai Kep.	244	17 237	2 197	7 423	932	1 204	328
Banggai	762	36 005	5 864	23 639	2 665	7 732	1 110
Morowali	3 573	10 215	3 716	14 777	540	3 215	934
Poso	1 139	9 219	3 484	14 571	864	4 252	936
Donggala	1 475	27 278	3 310	21 397	1 624	5 992	1 002
Toli-Toli	975	18 030	4 009	18 202	1 746	4 573	560
Buol	945	7 954	3 391	10 121	1 253	2 190	456
Parigi Moutong	1 848	48 310	6 764	41 265	2 569	10 633	2 190
Tojo Una-Una	470	15 073	2 319	10 210	1 295	3 007	506
Sigi	637	9 277	2 805	18 586	1 294	4 668	1 067
Banggai Laut	238	7 378	2 000	4 623	850	968	127
Morowali Utara	2 298	4 327	4 479	9 409	743	1 806	658
Palu	3 281	12 704	13 392	42 280	4 099	18 932	2 231
Sulawesi Tengah	17 885	223 007	57 730	236 503	20 474	69 172	12 105

Lampiran 3. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kategori Lapangan Usaha						Jumlah
	K	L	M, N	P	Q	R, S, U	
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Banggai Kep.	341	54	239	3 907	855	235	35 196
Banggai	2 114	165	1 083	10 331	2 556	1 321	95 347
Morowali	477	363	793	3 111	1 192	680	43 586
Poso	1 559	152	859	7 099	1 834	919	46 887
Donggala	576	51	697	8 049	1 003	947	73 401
Toli-Toli	1 460	211	586	6 399	1 863	1 044	59 658
Buol	492	109	434	4 618	719	551	33 233
Parigi Moutong	2 230	180	1 472	11 064	2 640	1 797	132 962
Tojo Una-Una	461	58	427	4 538	843	347	39 554
Sigi	290	206	927	6 822	1 174	800	48 553
Banggai Laut	293	23	155	2 274	408	216	19 553
Morowali Utara	481	53	287	3 712	914	381	29 548
Palu	5 794	2 117	3 974	13 100	5 493	4 980	132 377
Sulawesi Tengah	16 568	3 742	11 933	85 024	21 494	14 218	789 855

Lampiran 4. Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Kabupaten/Kota dan Skala Usaha dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Skala Usaha			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Banggai Kepulauan	16 162	997	33	17 192
Banggai	36 821	3 888	353	41 062
Morowali	15 550	1 368	103	17 021
Poso	19 072	1 780	176	21 028
Donggala	34 279	2 685	148	37 112
Toli-Toli	23 773	1 876	199	25 848
Buol	13 546	884	95	14 525
Parigi Moutong	52 957	6 250	249	59 456
Tojo Una-Una	17 914	1 386	93	19 393
Sigi	21 907	1 446	57	23 410
Banggai Laut	8 434	550	59	9 043
Morowali Utara	11 331	1 020	100	12 451
Palu	40 342	4 354	1 468	46 164
Sulawesi Tengah	312 088	28 484	3 133	343 705

Lampiran 5. Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Skala Usaha dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Skala Usaha			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Banggai Kepulauan	27 806	7 076	314	35 196
Banggai	62 565	24 421	8 361	95 347
Morowali	25 216	7 484	10 886	43 586
Poso	31 018	12 196	3 673	46 887
Donggala	53 861	15 654	3 886	73 401
Toli-Toli	42 551	13 219	3 888	59 658
Buol	24 448	6 867	1 918	33 233
Parigi Moutong	91 877	37 517	3 568	132 962
Tojo Una-Una	28 994	8 773	1 787	39 554
Sigi	37 375	10 211	967	48 553
Banggai Laut	14 517	4 247	789	19 553
Morowali Utara	17 893	7 095	4 560	29 548
Palu	67 032	26 766	38 579	132 377
Sulawesi Tengah	525 153	181 526	83 176	789 855

Lampiran 6. Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Skala Usaha			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	3 816	75	122	4 013
C. Industri Pengolahan	84 679	7 580	118	92 377
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	494	25	74	593
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	511	23	19	553
F. Konstruksi	5 515	970	306	6 791
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	132 023	12 114	1 062	145 199
H. Pengangkutan dan pergudangan	12 640	222	294	13 156
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	42 966	1 310	57	44 333
J. Informasi Dan Komunikasi	7 912	150	105	8 167
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	706	434	607	1 747
L. Real Estat	2 178	55	44	2 277
M,N. Jasa Perusahaan	4 118	287	181	4 586
P. Pendidikan	3 664	4 944	85	8 693
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	3 210	186	29	3 425
R,S,U. Jasa Lainnya	7 656	109	30	7 795
Jumlah	312 088	28 484	3 133	343 705

Lampiran 7. Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Skala Usaha			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	5 853	498	7 118	13 469
C. Industri Pengolahan	158 705	50 726	13 576	223 007
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	743	66	1 822	2 631
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	743	326	716	1 785
F. Konstruksi	31 252	16 063	10 415	57 730
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	193 621	28 734	14 148	236 503
H. Pengangkutan dan pergudangan	15 979	1 245	3 250	20 474
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	61 898	5 614	1 660	69 172
J. Informasi Dan Komunikasi	10 015	330	1 760	12 105
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	2 933	2 793	10 842	16 568
L. Real Estat	2 590	350	802	3 742
M,N. Jasa Perusahaan	8 420	1 830	1 683	11 933
P. Pendidikan	11 999	66 428	6 597	85 024
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	7 396	5 750	8 348	21 494
R,S,U. Jasa Lainnya	13 006	773	439	14 218
Jumlah	525 153	181 526	83 176	789 855

Lampiran 8. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota dan Lama Beroperasidi Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Skala Usaha				Jumlah
	< 1 tahun	1-5 tahun	6-10 tahun	> 10 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banggai Kepulauan	909	6 485	3 635	6 163	17 192
Banggai	2 410	17 385	8 519	12 748	41 062
Morowali	1 845	9 081	3 236	2 859	17 021
Poso	1 814	9 617	4 301	5 296	21 028
Donggala	2 749	15 185	7 746	11 432	37 112
Toli-Toli	2 670	11 214	4 470	7 494	25 848
Buol	849	6 839	3 081	3 756	14 525
Parigi Moutong	4 634	26 584	12 088	16 150	59 456
Tojo Una-Una	1 334	7 752	3 874	6 433	19 393
Sigi	2 026	11 377	4 397	5 610	23 410
Banggai Laut	631	4 017	1 835	2 560	9 043
Morowali Utara	981	6 666	2 363	2 441	12 451
Palu	4 642	22 093	9 293	10 136	46 164
Sulawesi Tengah	27 494	154 295	68 838	93 078	343 705

Lampiran 9. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Lama Beroperasi Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Skala Usaha				Jumlah
	< 1 tahun	1-5 tahun	6-10 tahun	> 10 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. Pertambangan dan penggalan	368	1 913	968	764	4 013
C. Industri Pengolahan	3 688	30 946	18 576	39 167	92 377
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	77	365	77	74	593
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	33	230	121	169	553
F. Konstruksi	211	1 983	1 801	2 796	6 791
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	13 256	72 709	29 279	29 955	145 199
H. Pengangkutan dan pergudangan	597	6 698	2 892	2 969	13 156
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	6 143	22 719	7 870	7 601	44 333
J. Informasi Dan Komunikasi	1 360	5 437	1 095	275	8 167
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	103	788	443	413	1 747
L. Real Estat	235	1 372	371	299	2 277
M,N. Jasa Perusahaan	437	2 345	1 073	731	4 586
P. Pendidikan	96	1 862	1 968	4 767	8 693
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	157	1 196	796	1 276	3 425
R,S,U. Jasa Lainnya	733	3 732	1 508	1 822	7 795
Jumlah	27 494	154 295	68 838	93 078	343 705

Lampiran 10. Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Badan Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Kode status badan usaha				
	PT/PT Persero/ Perum	CV	Firma	Koperasi/Dana Pensiun	Yayasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banggai Kepulauan	24	34	0	38	99
Banggai	276	204	8	126	260
Morowali	65	139	2	46	63
Poso	129	136	0	113	210
Donggala	100	75	0	63	182
Toli-Toli	135	157	4	100	140
Buol	64	86	0	29	79
Parigi Moutong	145	196	0	166	300
Tojo Una-Una	66	66	0	30	132
Sigi	40	57	3	30	214
Banggai Laut	31	87	2	23	63
Morowali Utara	75	203	0	37	104
Palu	1 138	692	13	163	330
Sulawesi Tengah	2 288	2 132	32	964	2 176

Lampiran 10. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kode status badan usaha			Jumlah
	Ijin Khusus	Perwakilan perusahaan/ lembaga asing	Tidak berbadan usaha	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Banggai Kepulauan	824	0	16 173	17 192
Banggai	2 547	5	37 636	41 062
Morowali	1 435	8	15 263	17 021
Poso	3 726	5	16 709	21 028
Donggala	432	3	36 257	37 112
Toli-Toli	1 997	1	23 314	25 848
Buol	1 464	0	12 803	14 525
Parigi Moutong	1 530	0	57 119	59 456
Tojo Una-Una	712	3	18 384	19 393
Sigi	405	1	22 660	23 410
Banggai Laut	411	0	8 426	9 043
Morowali Utara	864	5	11 163	12 451
Palu	2 897	15	40 916	46 164
Sulawesi Tengah	19 244	46	316 823	343 705

Lampiran 11. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Status Badan Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Kode status badan usaha				
	PT/PT Persero/ Perum	CV	Firma	Koperasi/ Dana Pensiun	Yayasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	100	22	0	0	0
C	97	200	3	39	3
D	70	2	0	2	0
E	16	1	0	1	0
F	341	931	0	4	0
G	479	550	16	89	26
H	290	118	0	6	0
I	32	72	3	8	12
J	67	29	0	2	1
K	552	4	0	800	1
L	37	21	0	0	5
M, N	173	154	5	12	5
P	1	0	0	0	2 107
Q	7	5	5	0	14
R, S, U	26	23	0	1	2
Jumlah	2 288	2 132	32	964	2 176

Lampiran 11. Lanjutan

Lapangan Usaha	Ijin Khusus	Perwakilan perusahaan/ lembaga asing	Tidak berbadan usaha	Jumlah
B	93	0	3 798	4 013
C	2 629	3	89 403	92 377
D	70	1	448	593
E	29	2	504	553
F	0	0	5 515	6 791
G	10 640	16	133 383	145 199
H	531	8	12 203	13 156
I	1 966	0	42 240	44 333
J	271	0	7 797	8 167
K	86	2	302	1 747
L	112	1	2 101	2 277
M, N	608	11	3 618	4 586
P	9	1	6 575	8 693
Q	1 582	0	1 812	3 425
R, S, U	618	1	7 124	7 795
Jumlah	19 244	46	316 823	343 705

Lampiran 12. Banyaknya Usaha/Perusahaan dengan/ijin Khusus atau Tidak Berbadan Usaha menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Laporan/Catatan Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Laporan/catatan keuangan		Jumlah
	Memiliki	Tidak memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Banggai Kepulauan	750	16 247	16 997
Banggai	1 941	38 242	40 183
Morowali	992	15 706	16 698
Poso	1 493	18 942	20 435
Donggala	802	35 887	36 689
Toli-Toli	878	24 433	25 311
Buol	736	13 531	14 267
Parigi Moutong	2 487	56 162	58 649
Tojo Una-Una	988	18 108	19 096
Sigi	791	22 274	23 065
Banggai Laut	367	8 470	8 837
Morowali Utara	805	11 222	12 027
Palu	3 091	40 722	43 813
Sulawesi Tengah	16 121	319 946	336 067

Lampiran 13. Banyaknya Usaha/Perusahaan Dengan Ijin Khusus atau Tidak Berbadan Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha dan Kepemilikan Laporan/Catatan Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah

	Lapangan Usaha	Laporan/catatan keuangan		Jumlah
		Memiliki	Tidak memiliki	
	(1)	(2)	(3)	(4)
B.	Pertambangan dan penggalian	20	3 871	3 891
C.	Industri Pengolahan	1 583	90 449	92 032
D.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	100	418	518
E.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	39	494	533
F.	Konstruksi	120	5 395	5 515
G.	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	5 226	138 797	144 023
H.	Pengangkutan dan pergudangan	284	12 450	12 734
I.	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1 175	43 031	44 206
J.	Informasi Dan Komunikasi	462	7 606	8 068
K.	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	193	195	388
L.	Real Estat	97	2 116	2 213
M,N.	Jasa Perusahaan	425	3 801	4 226
P.	Pendidikan	4 678	1 906	6 584
Q.	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1 228	2 166	3 394
R,S,U.	Jasa Lainnya	491	7 251	7 742
	Jumlah	16 121	319 946	336 067

Lampiran 14. Banyaknya Usaha/Perusahaan Konstruksi menurut Kabupaten/Kota dan Kode Kualifikasi Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Kode Kualifikasi Usaha				
	Perorangan	K1	K2	K3	M1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banggai Kepulauan	323	6	6	0	3
Banggai	528	31	10	6	36
Morowali	312	25	14	19	5
Poso	214	62	17	9	22
Donggala	479	5	4	2	3
Toli-Toli	496	8	2	2	12
Buol	356	12	20	4	12
Parigi Moutong	872	42	12	9	7
Tojo Una-Una	255	8	4	3	8
Sigi	424	0	1	1	5
Banggai Laut	134	44	2	1	7
Morowali Utara	314	77	48	5	10
Palu	801	49	23	22	100
Sulawesi Tengah	5 508	369	163	83	230

Lampiran 14. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kode Kualifikasi Usaha				Jumlah
	M2	B1	B2	Non Kualifikasi	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Banggai Kepulauan	0	0	0	12	350
Banggai	3	1	1	46	662
Morowali	3	0	0	39	417
Poso	4	0	0	17	345
Donggala	0	0	0	15	508
Toli-Toli	1	0	0	32	553
Buol	2	0	0	12	418
Parigi Moutong	0	0	0	32	974
Tojo Una-Una	0	0	0	22	300
Sigi	0	1	0	18	450
Banggai Laut	0	1	0	18	207
Morowali Utara	0	0	0	41	495
Palu	18	2	4	93	1 112
Sulawesi Tengah	31	5	5	397	6 791

Lampiran 15. Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Kabupaten/Kota dan Jaringan Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Jaringan usaha/perusahaan						Jumlah
	Tunggal	Kantor pusat	Cabang	Perwakilan	Pabrik (manufaktur)	Unit pembantu/penunjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Banggai Kepulauan	16 916	0	58	0	0	218	17 192
Banggai	40 442	3	267	34	3	313	41 062
Morowali	16 839	0	88	19	0	75	17 021
Poso	20 683	0	127	24	0	194	21 028
Donggala	36 905	0	79	7	0	121	37 112
Toli-Toli	25 406	8	141	13	3	277	25 848
Buol	14 317	2	54	2	0	150	14 525
Parigi Moutong	58 987	0	210	18	0	241	59 456
Tojo Una-Una	19 235	1	65	7	0	85	19 393
Sigi	23 234	0	79	2	3	92	23 410
Banggai Laut	8 884	0	54	3	0	102	9 043
Morowali Utara	12 237	0	76	20	1	117	12 451
Palu	44 458	53	850	61	7	735	46 164
Sulawesi Tengah	338 543	67	2 148	210	17	2 720	343 705

Lampiran 16. Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Jaringan Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Jaringan usaha/perusahaan						Jumlah
	Tunggal	Kantor pusat	Cabang	Perwakilan	Pabrik (manufaktur)	Unit pembantu/penunjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	3 955	0	39	0	0	19	4 013
C	92 210	8	69	3	17	70	92 377
D	503	0	25	2	0	63	593
E	518	1	14	2	0	18	553
F	6 724	6	43	4	0	14	6 791
G	143 962	28	650	61	0	498	145 199
H	12 436	7	161	31	0	521	13 156
I	44 179	2	114	3	0	35	44 333
J	8 083	1	48	4	0	31	8 167
K	903	5	472	39	0	328	1 747
L	2 257	2	10	0	0	8	2 277
M, N	4 412	5	96	34	0	39	4 586
P	8 319	0	283	17	0	74	8 693
Q	2 365	1	67	4	0	988	3 425
R, S, U	7 717	1	57	6	0	14	7 795
Jumlah	338 543	67	2 148	210	17	2 720	343 705

Lampiran 17. Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja				Jumlah
	<5	5-19	20-99	>=100	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banggai Kepulauan	16 161	954	77	0	17 192
Banggai	37 522	3 240	286	14	41 062
Morowali	16 039	872	98	12	17 021
Poso	19 548	1 297	180	3	21 028
Donggala	34 895	2 054	157	6	37 112
Toli-Toli	23 886	1 778	175	9	25 848
Buol	13 343	1 078	102	2	14 525
Parigi Moutong	54 119	5 105	228	4	59 456
Tojo Una-Una	18 095	1 212	85	1	19 393
Sigi	21 912	1 380	118	0	23 410
Banggai Laut	8 454	531	58	0	9 043
Morowali Utara	11 493	842	112	4	12 451
Palu	41 741	3 602	756	65	46 164
Sulawesi Tengah	317 208	23 945	2 432	120	343 705

Lampiran 18. Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Jumlah tenaga kerja				Jumlah
	<5	5-19	20-99	>=100	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	3 757	184	66	6	4 013
C	84 679	7 580	101	17	92 377
D	523	47	20	3	593
E	505	33	13	2	553
F	8	6 062	711	10	6 791
G	142 738	2 217	227	17	145 199
H	12 766	323	64	3	13 156
I	43 429	841	61	2	44 333
J	8 050	95	18	4	8 167
K	771	800	163	13	1 747
L	2 203	62	10	2	2 277
M, N	4 177	380	24	5	4 586
P	3 125	4 790	763	15	8 693
Q	3 074	168	162	21	3 425
R, S, U	7 403	363	29	0	7 795
Jumlah	317 208	23 945	2 432	120	343 705

Lampiran 19. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota dan Nilai Omset Usaha/Perusahaan Selama 1 Tahun di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Nilai Pengeluaran Usaha/Perusahaan Selama 1 Tahun				Jumlah
	≤300juta	300 juta -2,5 milyar	2,5 milyar - 50 milyar	> 50 milyar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banggai Kepulauan	16 420	757	15	0	17 192
Banggai	38 160	2 669	205	28	41 062
Morowali	15 575	1 359	71	16	17 021
Poso	19 340	1 563	114	11	21 028
Donggala	34 908	2 078	119	7	37 112
Toli-Toli	24 198	1 527	114	9	25 848
Buol	13 650	802	69	4	14 525
Parigi Moutong	55 516	3 758	173	9	59 456
Tojo Una-Una	18 356	971	63	3	19 393
Sigi	22 187	1 178	41	4	23 410
Banggai Laut	8 565	436	38	4	9 043
Morowali Utara	11 428	951	66	6	12 451
Palu	40 660	4 632	791	81	46 164
Sulawesi Tengah	318 963	22 681	1 879	182	343 705

Lampiran 20. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Nilai Omset Usaha/Perusahaan Selama 1 TahunTahun di Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Nilai Pengeluaran Usaha/Perusahaan Selama 1 Tahun				Jumlah
	≤300juta	300 juta - 2,5 milyar	2,5 milyar - 50 milyar	> 50 milyar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	3 820	115	64	14	4 013
C	91 015	1 276	68	18	92 377
D	507	51	33	2	593
E	513	33	7	0	553
F	5 445	1 048	282	16	6 791
G	132 105	12 259	767	68	145 199
H	12 788	312	52	4	13 156
I	42 971	1 320	42	0	44 333
J	7 957	176	28	6	8 167
K	887	547	269	44	1 747
L	2 185	72	20	0	2 277
M, N	4 222	336	26	2	4 586
P	3 668	4 830	192	3	8 693
Q	3 212	188	20	5	3 425
R, S, U	7 668	118	9	0	7 795
Jumlah	318 963	22 681	1 879	182	343 705

Lampiran 21. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota dan Pemanfaatan Media Internet di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Media Internet			Jumlah
	Ya, untuk Jual Beli	Ya, selain untuk Jual Beli	Tidak memanfaatkan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Banggai Kepulauan	45	42	17 105	17 192
Banggai	454	531	40 077	41 062
Morowali	288	169	16 564	17 021
Poso	336	182	20 510	21 028
Donggala	244	184	36 684	37 112
Toli-Toli	442	165	25 241	25 848
Buol	119	93	14 313	14 525
Parigi Moutong	620	769	58 067	59 456
Tojo Una-Una	182	111	19 100	19 393
Sigi	211	220	22 979	23 410
Banggai Laut	59	25	8 959	9 043
Morowali Utara	120	103	12 228	12 451
Palu	2 053	1 289	42 822	46 164
Sulawesi Tengah	5 173	3 883	334 649	343 705

Lampiran 22. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha dan Pemanfaatan Media Internet di Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Pemanfaatan Media Internet			Jumlah
	Ya, untuk Jual Beli	Ya, selain untuk Jual Beli	Tidak memanfaatkan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B	21	26	3 966	4 013
C	413	290	91 674	92 377
D	95	41	457	593
E	8	5	540	553
F	329	178	6 284	6 791
G	2 098	1 303	141 798	145 199
H	128	149	12 879	13 156
I	311	294	43 728	44 333
J	533	242	7 392	8 167
K	290	232	1 225	1 747
L	42	26	2 209	2 277
M, N	409	203	3 974	4 586
P	241	620	7 832	8 693
Q	55	105	3 265	3 425
R, S, U	200	169	7 426	7 795
Jumlah	5 173	3 883	334 649	343 705

Lampiran 23. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota dan Penerapan Sistem Waralaba di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Penerapan Sistem Waralaba			Jumlah
	Ya, sebagai pemberi Waralaba	Ya, sebagai penerima Waralaba	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Banggai Kepulauan	1	2	17 189	17 192
Banggai	12	57	40 993	41 062
Morowali	7	4	17 010	17 021
Poso	2	17	21 009	21 028
Donggala	0	3	37 109	37 112
Toli-Toli	12	11	25 825	25 848
Buol	1	5	14 519	14 525
Parigi Moutong	20	27	59 409	59 456
Tojo Una-Una	4	13	19 376	19 393
Sigi	0	15	23 395	23 410
Banggai Laut	0	1	9 042	9 043
Morowali Utara	2	3	12 446	12 451
Palu	21	109	46 034	46 164
Sulawesi Tengah	82	267	343 356	343 705

Lampiran 24. Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Kategori lapangan Usaha dan Penerapan Sistem Waralaba di Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Penerapan Sistem Waralaba			Jumlah
	Ya, sebagai pemberi Waralaba	Ya, sebagai penerima Waralaba	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B	0	0	4 013	4 013
C	1	5	92 371	92 377
D	0	0	593	593
E	0	0	553	553
F	0	0	6 791	6 791
G	41	143	145 015	145 199
H	6	11	13 139	13 156
I	11	50	44 272	44 333
J	4	6	8 157	8 167
K	0	0	1 747	1 747
L	0	4	2 273	2 277
M, N	7	14	4 565	4 586
P	7	13	8 673	8 693
Q	0	4	3 421	3 425
R, S, U	5	17	7 773	7 795
Jumlah	82	267	343 356	343 705

Lampiran 25. Banyaknya Usaha/Perusahaan yang Menerapkan Sistem Waralaba menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan STPW di Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Kepemilikan STPWD		Jumlah
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Banggai Kepulauan	1	2	3
Banggai	24	45	69
Morowali	6	5	11
Poso	10	9	19
Donggala	3	0	3
Toli-Toli	11	12	23
Buol	3	3	6
Parigi Moutong	19	28	47
Tojo Una-Una	8	9	17
Sigi	8	7	15
Banggai Laut	1	0	1
Morowali Utara	0	5	5
Palu	82	48	130
Sulawesi Tengah	176	173	349

Lampiran 26. Banyaknya Usaha/Perusahaan yang Menerapkan Sistem Waralaba menurut Kategori Lapangan Usaha dan Kepemilikan STPW di Provinsi Sulawesi Tengah

Lapangan Usaha	Kepemilikan STPW		Jumlah
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan penggalian	0	0	0
C. Industri Pengolahan	3	3	6
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0	0	0
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0	0	0
F. Konstruksi	0	0	0
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	88	96	184
H. Pengangkutan dan pergudangan	8	9	17
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	33	28	61
J. Informasi Dan Komunikasi	3	7	10
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0	0	0
L. Real Estat	2	2	4
M,N. Jasa Perusahaan	13	8	21
P. Pendidikan	9	11	20
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	3	1	4
R,S,U. Jasa Lainnya	14	8	22
Jumlah	176	173	349

Lampiran 27. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kab. Banggai Kepulauan

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	0	0	0	-	-	-	-
C	1	0	0	1	-	-	-
F	0	0	0	-	-	-	-
G	0	1	0	1	-	-	-
H	1	1	1	3	√	-	-
I	0	1	1	2	-	√	-
J	0	1	0	1	-	-	-
K	0	1	1	2	-	√	-
L	0	1	0	1	-	-	-
M, N	0	0	0	-	-	-	-
P	1	1	1	3	√	-	-
Q	0	1	1	2	-	√	-
R, S, U	0	1	1	2	-	√	-

Lampiran 28. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Banggai

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	0	1	1	2	-	√	-
C	1	1	1	3	√	-	-
F	0	0	0	-	-	-	-
G	0	0	0	-	-	-	-
H	1	0	0	1	-	-	-
I	0	0	0	-	-	-	-
J	0	0	0	-	-	-	-
K	1	0	0	1	-	-	-
L	0	0	0	-	-	-	-
M, N	0	0	0	-	-	-	-
P	1	0	0	1	-	-	-
Q	0	0	0	-	-	-	-
R, S, U	0	0	0	-	-	-	-

Lampiran 29. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Morowali

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	1	1	1	3	√	-	-
C	0	1	1	2	-	√	-
F	1	0	0	1	-	-	-
G	1	0	0	1	-	-	-
H	0	0	0	-	-	-	-
I	0	0	0	-	-	-	-
J	1	0	0	1	-	-	-
K	0	0	0	-	-	-	-
L	1	0	0	1	-	-	-
M, N	1	0	0	1	-	-	-
P	0	0	0	-	-	-	-
Q	1	0	0	1	-	-	-
R, S, U	0	0	0	-	-	-	-

Lampiran 30. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Poso

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	1	0	0	1	-	-	-
C	0	0	0	-	-	-	-
F	1	1	0	2	-	-	√
G	1	1	0	2	-	-	√
H	0	1	1	2	-	√	-
I	1	1	1	3	√	-	-
J	1	1	0	2	-	-	√
K	1	1	1	3	√	-	-
L	0	1	0	1	-	-	-
M, N	1	0	0	1	-	-	-
P	1	1	1	3	√	-	-
Q	1	1	1	3	√	-	-
R, S, U	1	1	1	3	√	-	-

Lampiran 31. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Donggala

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ tn	LQ pdrb	Klasen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	0	1	0	1	-	-	-
C	1	0	0	1	-	-	-
F	0	1	0	1	-	-	-
G	0	1	0	1	-	-	-
H	0	0	0	-	-	-	-
I	0	0	0	-	-	-	-
J	0	0	0	-	-	-	-
K	0	0	0	-	-	-	-
L	0	0	0	-	-	-	-
M, N	0	0	0	-	-	-	-
P	1	0	0	1	-	-	-
Q	0	0	0	-	-	-	-
R, S, U	0	0	0	-	-	-	-

Lampiran 32. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Tolitoli

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	0	0	0	-	-	-	-
C	1	0	0	1	-	-	-
F	0	1	0	1	-	-	-
G	1	1	0	2	-	-	√
H	1	1	1	3	√	-	-
I	0	1	1	2	-	√	-
J	0	1	0	1	-	-	-
K	1	1	1	3	√	-	-
L	0	1	1	2	-	-	√
M, N	0	0	0	-	-	-	-
P	0	1	1	2	-	√	-
Q	1	1	1	3	√	-	-
R, S, U	0	1	0	1	-	-	-

Lampiran 33. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Buol

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	1	0	0	1	-	-	-
C	0	1	0	1	-	-	-
F	1	0	0	1	-	-	-
G	1	0	0	1	-	-	-
H	1	1	1	3	√	-	-
I	0	1	0	1	-	-	-
J	0	0	0	-	-	-	-
K	0	0	0	-	-	-	-
L	0	1	0	1	-	-	-
M, N	0	0	0	-	-	-	-
P	1	1	1	3	√	-	-
Q	0	1	1	2	-	√	-
R, S, U	0	1	0	1	-	-	-

Lampiran 34. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Parigi Moutong

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	0	0	0	-	-	-	-
C	1	0	0	1	-	-	-
F	0	1	0	1	-	-	-
G	1	1	0	2	-	-	√
H	0	1	0	1	-	-	-
I	0	1	1	2	-	√	-
J	1	0	0	1	-	-	-
K	0	0	0	-	-	-	-
L	0	0	0	-	-	-	-
M, N	0	0	0	-	-	-	-
P	0	0	1	1	-	-	-
Q	0	0	0	-	-	-	-
R, S, U	0	1	1	2	-	√	-

Lampiran 35. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Tojo Una-Una

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	0	0	0	-	-	-	-
C	1	0	0	1	-	-	-
F	0	0	0	-	-	-	-
G	0	1	0	1	-	-	-
H	1	0	0	1	-	-	-
I	0	1	1	2	-	√	-
J	0	1	0	1	-	-	-
K	0	0	0	-	-	-	-
L	0	1	1	2	-	√	-
M, N	0	0	0	-	-	-	-
P	1	1	1	3	√	-	-
Q	0	1	1	2	-	√	-
R, S, U	0	1	0	1	-	-	-

Lampiran 36. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Sigi

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	0	0	0	-	-	-	-
C	0	0	0	-	-	-	-
F	0	1	0	1	-	-	-
G	1	1	0	2	-	-	√
H	1	0	0	1	-	-	-
I	1	1	0	2	-	-	√
J	1	0	0	1	-	-	-
K	0	1	1	2	-	√	-
L	0	1	1	2	-	√	-
M, N	1	0	0	1	-	-	-
P	1	1	1	3	√	-	-
Q	0	1	1	2	-	√	-
R, S, U	0	0	1	1	-	-	-

Lampiran 37. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Banggai Laut

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	0	0	0	-	-	-	-
C	1	0	0	1	-	-	-
F	1	0	0	1	-	-	-
G	0	1	0	1	-	-	-
H	1	1	0	2	-	-	√
I	0	1	0	1	-	-	-
J	0	0	0	-	-	-	-
K	0	1	1	2	-	√	-
L	0	1	1	2	-	√	-
M, N	0	0	0	-	-	-	-
P	1	1	1	3	√	-	-
Q	0	1	1	2	-	√	-
R, S, U	0	1	1	2	-	√	-

Lampiran 38. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kabupaten Morowali Utara

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	1	1	0	2	-	-	√
C	0	0	0	-	-	-	-
F	1	1	1	3	√	-	-
G	1	0	0	1	-	-	-
H	0	0	0	-	-	-	-
I	0	0	0	-	-	-	-
J	1	0	0	1	-	-	-
K	0	0	0	-	-	-	-
L	0	0	0	-	-	-	-
M, N	0	0	0	-	-	-	-
P	1	0	0	1	-	-	-
Q	1	0	0	1	-	-	-
R, S, U	0	0	0	-	-	-	-

Lampiran 39. Pengukuran Potensi Ekonomi menurut Kategori di Kota Palu

Kategori Lapangan Usaha	Metode Pengukuran				Hasil Pemetaan		
	LQ Tenaga Kerja	LQ PDRB	Tipologi Klassen	Total	Unggulan	Potensi 1	Potensi 2
B, D, E	1	0	0	1	-	-	-
C	0	0	0	-	-	-	-
F	1	0	0	1	-	-	-
G	1	0	0	1	-	-	-
H	1	1	1	3	√	-	-
I	1	1	1	3	√	-	-
J	1	1	1	3	√	-	-
K	1	1	0	2	-	-	√
L	1	1	1	3	√	-	-
M, N	1	1	1	3	√	-	-
P	0	1	1	2	-	√	-
Q	1	1	1	3	√	-	-
R, S, U	1	0	0	1	-	-	-

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulteng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof. Mohamad Yamin No 48 Palu 94114

Telp : (0451) 483610, 4836111, 483613, Fax: (0451) 483612

Homepage : <http://sulteng.bps.go.id> Email : bps7200@bps.go.id

